



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH
KE LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) pada Program Kajian Strategik
Ketahanan Nasional**

**Agung Karyanto
NPM : 0706190332**

**Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Agung Karyanto
NPM : 0706190332
Program Studi : Kajian Stratejik Ketahanan Nasional
Judul Tesis : DAMPAK KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK
TANAH KE LPG TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA
(Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

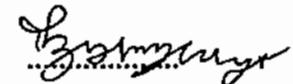
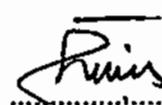
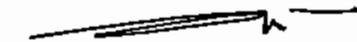
DEWAN PENGUJI

Ketua Tim Penguji : DR. Amirsyah Sahil, SE, MSi

Pembimbing I : Prof DR Wan Usman, MA

Pembimbing II : Margaretha Hanita, SH, MSi.

Penguji : Prof. DR. Burhan Magenda



Jakarta, 1 Mei 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam rangka meraih gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selama proses studi maupun dalam penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan do'a restu dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Nitibaskoro, selaku Ketua Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional yang telah memberikan bantuan sarana dan kesempatan untuk studi.
2. Bapak DR. Amirsyah Sahil, SE, MSi, selaku Sekretaris Program dan Ketua Tim Penguji, yang banyak memberikan arahan dan masukan serta membantu dalam penyelesaian dokumen-dokumen untuk kepentingan penelitian.
3. Bapak Prof. DR Wan Usman, MA, selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta koreksi, khususnya dalam isi dan materi tesis.
4. Ibu Margaretha Hanita, SH, MSi, selaku dosen pembimbing dua atas koreksi dan bimbingannya dalam penyusunan tesis.
5. Bapak Prof. DR Burhan Magenda, selaku Tim Penguji yang banyak memberikan masukan serta koreksi, demi kesempurnaan tesis.
6. Bapak Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur beserta staf dan jajarannya yang telah mengizinkan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
7. Pimpinan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara serta Departemen Pertahanan yang telah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia.
8. Staf KSKN UI yang telah memberikan bantuan administrasi baik selama proses belajar mengajar maupun dalam penyelesaian tesis.
9. Rekan-rekan KSKN UI, khususnya Angkatan 26, atas kekompakan dan semangat kerjasamanya, sehingga memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

10. Kedua orang tua, saudara, isteri serta ketiga permataku Adila, Akmal dan Afrina yang telah memberikan roh semangat serta inspirasi untuk menyelesaikan studi di Universitas Indonesia.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai akhir kata "Tak ada gading yang tak retak", demikian pula dengan tulisan ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik, saran serta masukan demi kesempurnaan karya ini sangat diharapkan.

Jakarta, Mei 2009

Penulis



Agung Karyanto

ABSTRAK

Nama : Agung Karyanto
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Judul : Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Timur)

Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif.

Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 Kecamatan dari 10 Kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara itu beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan untuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal.

Kata Kunci :
Ketahanan keluarga, pemakaian minyak tanah, pemakaian LPG.

ABSTRACT

Name : Agung Karyanto
Study Program : Strategic Study of National Resilience
Title : Policy Impact of Kerosene Conversion to LPG
To Family resilience (Case study in Kota
Administration Jakarta East)

This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by government through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Petroleum Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design.

Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliography study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster sampling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample T Test.

From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % from score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage (before executed [by] conversion) has score 61 % from score expected; 3) Resilience of family at usage LPG (after conversion is executed) reaches score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly differs in, is meaning that usage of LPG in general affects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage. Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requires gets division. In the case of usage of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compared to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal.

Keyword :

Family resilience, kerosene usage, usage LPG.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Abstraction	vi
Daftar Isi	vii
1. PENDAHULUAN ..	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan masalah	5
1.4. Pertanyaan Penelitian	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5.1. Tujuan Penelitian	6
1.5.2. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	7
2. KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG	9
2.1.1. Latar Belakang dan Pengertian	9
2.1.2. Jenis Kebijakan	12
2.1.3. Siklus Kebijakan	15
2.1.3.1. Analisis dan Perumusan Kebijakan	16
2.1.3.2. Implementasi Kebijakan	19
2.1.3.3. Evaluasi Kebijakan	25
2.1.3.4. Dampak Kebijakan	26
2.2. Ketahanan keluarga	30
2.3. Indikator Ketahanan Keluarga	33
2.3.1. Ekonomi	36
2.3.2. Konsep Sosial	39
2.3.3. konsep Keamanan	41
2.3.4. Konsep Lingkungan	42
3. METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3. Unit Analisa	44
3.4. Populasi dan Sampel	45
3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	47
3.5.1. Instrumen Penelitian	47
3.5.1.1. Variabel Penelitian	47
3.5.1.2. Konstruk Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG	49
3.5.1.3. Konstruk Ketahanan Keluarga pada	

	Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	51
3.5.2.	Teknik Pengumpulan Data	53
3.6.	Analisis Data	53
4.	DISKRIPSI TEMPAT PENELITIAN	56
4.1.	Geografi	56
4.2.	Pemerintahan	57
4.3.	Penduduk	58
4.4.	Kondisi Sosial ekonomi	59
4.4.1.	Pendidikan	59
4.4.2.	Kesehatan	61
4.5.	Kondisi Ekonomi	61
5.	ANALISIS HASIL PENELITIAN	65
5.1.	Diskripsi Karakteristik Responden	65
5.2.	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	67
5.2.1.	Pengujian Konstruk Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah Ke LPG	68
5.2.2.	Pengujian Konstruk Pemakaian Minyak Tanah	69
5.2.3.	Pengujian Konstruk Pemakaian LPG	71
5.3.	Uji Normalitas Data	73
5.4.	Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG	74
5.4.1.	Diskripsi Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG	74
5.4.2.	Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG	78
5.4.2.1.	Karakteristik jenis Kelamin	79
5.4.2.2.	Karakteristik Pendidikan	80
5.4.2.3.	Karakteristik Pendapatan	80
5.4.2.4.	Karakteristik Jenis Pekerjaan	80
5.5.	Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah	81
5.5.1.	Diskripsi ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah	81
5.5.1.1.	Indikator Ekonomi	83
5.5.1.2.	Indikator Sosial	85
5.5.1.3.	Indikator Keamanan	87
5.5.1.4.	Indikator Lingkungan	88
5.5.2.	Korelasi Karakteristik Responden terhadap Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah	90
5.5.2.1.	Karakteristik Jenis Kelamin	90
5.5.2.2.	Karakteristik Pendidikan	90
5.5.2.3.	Karakteristik Pendapatan	91
5.5.2.4.	Karakteristik Jenis Pekerjaan	92
5.6.	Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG	93
5.6.1.	Diskripsi ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG	93
5.6.1.1.	Indikator Ekonomi	95
5.6.1.2.	Indikator Sosial	97
5.6.1.3.	Indikator Keamanan	98

5.6.1.4.	Indikator Lingkungan	100
5.6.2.	Korelasi Karakteristik Responden terhadap Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG	102
5.6.2.1.	Karakteristik Jenis Kelamin	102
5.6.2.2.	Karakteristik Pendidikan	103
5.6.2.3.	Karakteristik Pendapatan	103
5.6.2.4.	Karakteristik Jenis Pekerjaan	104
5.7.	Komparasi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	104
5.7.1.	Komparasi Variabel Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	105
5.7.2.	Perbandingan Indikator Ekonomi Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	107
5.7.3.	Perbandingan Indikator Sosial Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	111
5.7.4.	Perbandingan Indikator Keamanan Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	113
5.7.5.	Perbandingan Indikator Lingkungan Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG	116
5.8.	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah Ke LPG	119
6.	KESIMPULAN DAN SARAN	122
6.1.	Kesimpulan	122
6.2.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	125
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.	Sumber daya, Cadangan, Produksi serta Rasio Energi Fosil Indonesia	14
Tabel 3.4.	Jumlah dan Penyebaran Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	45
Tabel 3.5.1.1.	Variabel dan Indikator Penelitian	48
Tabel 3.5.1.2.	Kisi-Kisi variabel Pelaksanaan Konversi	50
Tabel 3.5.1.3.	Kisi-Kisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	51
Tabel 3.5.1.	Kisi-Kisi Penelitian	47
Tabel 4.2	Jumlah Kelurahan, RW, RT dan KK	47
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Penyebarannya menurut Kecamatan	49
Tabel 4.4.1.	Jumlah Prosentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke Atas berdasar Pendidikan	51
Tabel 4.4.2.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan	61
Tabel 4.5.	Prosentase Penduduk Menurut Pengeluaran	

	Per Kapita Per bulan	63
Tabel 5.1.	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin (a), Pendidikan (b), Pendapatan (c), dan Pekerjaan (d)	66
Tabel 5.2.1.	Pengujian Konstruk Pelaksanaan Konversi	68
Tabel 5.2.2.	Pengujian Konstruk Pemakaian Minyak Tanah	69
Tabel 5.2.3.	Pengujian Konstruk Pemakaian LPG	71
Tabel 5.3.	Uji Normalitas Data	73
Tabel 5.4.1.	Data Karakteristik Responden terhadap Pelaksanaan Konversi	78
Tabel 5.4.2.	Koelasi Karakteristik Responden terhadap Pelaksanaan konversi	80
Tabel 5.5.1.	Skor Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah	81
Tabel 5.5.1.1.	Frekwensi Indikator Ekonomi pada Minyak Tanah	83
Tabel 5.5.1.2.	Frekwensi Indikator Sosial pada Minyak Tanah	85
Tabel 5.5.1.3.	Frekwensi Indikator Keamanan pada Minyak Tanah	87
Tabel 5.5.1.4.	Frekwensi Indikator Lingkungan pada Minyak Tanah	88
Tabel 5.5.2.	Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pemakaian Minyak Tanah	90
Tabel 5.6.1.	Skor Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG	93
Tabel 5.6.1.1.	Frekwensi Indikator Ekonomi pada LPG	95
Tabel 5.6.1.2.	Frekwensi Indikator Sosial pada LPG	97
Tabel 5.6.1.3.	Frekwensi Indikator Keamanan pada LPG	98
Tabel 5.6.1.4.	Frekwensi Indikator Lingkungan pada LPG	100
Tabel 5.6.2.	Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pemakaian LPG	102
Tabel 5.7.1.	Komparasi Variabel Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	105
Tabel 5.7.2.	Skor Perbandingan Indikator Ekonomi Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	107
Tabel 5.7.2.	Analisis Perbandingan Indikator Ekonomi pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG (a,b,c).....	107
Tabel 5.7.3.	Skor Perbandingan Indikator Sosial Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	111
Tabel 5.7.3.	Analisis Perbandingan Indikator Sosial pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG (a,b,c)	111
Tabel 5.7.4.	Skor Perbandingan Indikator Keamanan Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	113
Tabel 5.7.4.	Analisis Perbandingan Indikator Keamanan pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG (a,b,c)	113
Tabel 5.7.5.	Skor Perbandingan Indikator Lingkungan Pemakaian Minyak Tanah dan LPG	116
Tabel 5.7.5.	Analisis Perbandingan Indikator Lingkungan pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG a,b,c)	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Pelaksanaan Konversi
- Lampiran 3. Data Hasil Penelitian Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah
- Lampiran 4. Data Hasil Penelitian Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG
- Lampiran 5. Data Karakteristik Responden terhadap Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah
- Lampiran 6. Data Karakteristik Responden terhadap Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG
- Lampiran 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
- Lampiran 8. Peta Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
- Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Walikota Jakarta Timur



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan krusial dunia saat ini adalah berkaitan dengan kelangkaan energi. Issue tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga minyak dunia melonjak, sehingga setiap negara berdaya upaya untuk mennyiasati gejolak dunia tersebut. Di lain pihak tuntutan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan warganya yang memang menjadi kewajiban setiap negara tidak bisa ditawar dan dikesampingkan, lebih-lebih bagi negara-negara berkembang, peningkatan kesejahteraan adalah mutlak jika menginginkan negaranya masuk daftar negara yang diperhitungkan dalam pencatatan kehidupan global.

Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dengan keadaan sebagai salah satu penghasil minyak, meskipun tidak sebanding dengan tuntutan penggunaan, sehingga sekaligus menjadi negara pengimport minyak mau tidak mau turut serta menghadapi permasalahan dunia tersebut, lebih-lebih subsidi energi, khususnya BBM selama ini selalu menjadi momok menakutkan bagi pengambil keputusan di negeri ini. Oleh karena itulah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap.

Sebagai anggota WTO dan aplikasi kesepakatan peminjaman hutang terhadap IMF dan Bank Dunia, Indonesia terlibat dalam alur perdagangan internasional yakni pasar bebas. Terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan dunia telah berpengaruh pada perekonomian nasional, terutama terhadap sektor migas yang menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi. Seperti ketika konsumsi bahan bakar AS meningkat saat terjadi liburan musim panas, sementara disisi lain produksi minyak dunia tetap, maka berimbas pada kelangkaan minyak yang berbuntut pada kenaikan harga. Di lain pihak harga BBM di Indonesia tidak ditetapkan berdasarkan biaya produksinya, tapi dihitung

berdasarkan harga minyak rata-rata dunia, sehingga ketika harga minyak dunia naik maka akan berpengaruh pada harga BBM di Indonesia.

Kondisi semacam itu berakibat perubahan kebijakan di dalam negeri, yakni pada akhir Januari 2008, pemerintah mengubah APBN 2008 karena terjadi defisit yang dikarenakan kenaikan harga minyak dunia yang menembus angka US \$ 100 per barel. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, selain dengan meningkatkan ekspor migas juga dilakukan dengan memotong subsidi BBM. Dalam hal ini subsidi BBM dalam negeri dianggap pos pengeluaran anggaran terbesar. Dengan begitu maka harga BBM di dalam negeri akan kembali di plot untuk mengalami kenaikan.

Kebijakan dengan mengurangi subsidi BBM menimbulkan permasalahan yang rumit, ketika harus behadapan dengan ekonomi rakyat sebagai akibat inflasi dari dampak kenaikan BBM. Oleh karena itulah terobosan kebijakan yang bertujuan mengurangi konsumsi minyak, sehingga meringankan subsidi, namun sekaligus dapat membantu perekonomian rakyat sangat diperlukan dalam hal ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan melakukan konversi penggunaan minyak tanah dengan bahan bakar berbentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dapat dianggap kebijakan yang sangat penting dalam mengatasi tekanan RAPBN akibat subsidi BBM maupun membantu perekonomian masyarakat, sekaligus tantangan baru untuk mengembangkan pemanfaatan potensi energi yang ada di Republik Indonesia.

Konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah RI melalui Peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2007 tanggal 28 November 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Pelaksanaan konversi dilakukan secara bertahap mulai awal tahun 2007. Target yang akan dicapai adalah mengalihkan konsumsi minyak tanah sebesar 90 % atau sekitar 10 juta kilo liter selama antara 4 sampai dengan 6 tahun. Dari target tersebut, menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla yang dikutip dari Tempo (Terbit tanggal 30 Agustus 2006), diperkirakan anggaran pemerintah dapat dihemat sampai dengan 30 triliun, di sisi lain

masyarakat yang selama ini sebagai pengguna minyak tanah dapat menghemat pengeluaran dengan kenaikan pendapatan kurang lebih 20.000 sampai dengan 25.000 per bulan. Dengan demikian kebijakan ini dapat diandalkan untuk mempercepat program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain sektor ekonomi baik nasional maupun rumah tangga mengalami peningkatan, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dianggap memiliki tingkat kebersihan dan efisiensi tinggi yang sangat diperlukan masyarakat. Hal ini cukup beralasan oleh karena menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 diperkirakan 1,5 juta orang meninggal akibat polusi ruangan yang diakibatkan pemakaian bahan bakar yang berpolusi.¹ Dengan demikian konversi minyak tanah ke LPG sekaligus membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Namun demikian kebijakan yang dinilai sebagai terobosan untuk menghemat BBM yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan mengurangi pengeluaran serta meningkatkan kebersihan dan efisiensi, telah mendapatkan banyak kritikan dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat, yang intinya bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar yang terjadi pada masyarakat. Beberapa media massa menyebutkan bahwa pasca dikeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, kondisi pasokan minyak tanah mulai berkurang, sehingga di beberapa tempat bahkan sulit ditemukan minyak tanah, walaupun ada harganya sangat tinggi. Di sisi lain bagi masyarakat miskin kemampuan untuk membeli gas dengan ukuran terkecil 3 kg untuk satu tabung yang harganya sekitar 15.000 mengalami kesulitan. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dampak protes dan kecaman terhadap pemerintah. Bahkan yang lebih ironis lagi pasokan tabung gas di beberapa tempat mengalami hambatan yang menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan gas LPG, walaupun dari keterangan pihak Pertamina hal tersebut dikarenakan telah terjadi kerusakan teknis pada kilang LNG, namun setelah

¹ Kompas 10 Nopember 2007, hal 5

terjadi perbaikan kondisi masih belum berubah, sehingga semakin lengkaplah permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Berkenaan dengan hal tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang kebijakan tersebut, khususnya dampak terhadap kondisi rumah tangga masyarakat yang sangat erat terhadap pencapaian ketahanan keluarga. Dengan demikian dapat dimengerti apakah kebijakan tersebut memang merupakan terobosan yang tepat bagi usaha pemerintah dalam penghematan pemakaian BBM yang sekaligus mampu memberi peningkatan terhadap tercapainya ketahanan keluarga ataukah kebijakan yang kurang tepat dihadapkan pada peningkatan ketahanan keluarga masyarakat. Dengan demikian sekaligus mampu menjawab permasalahan maupun gejolak yang muncul di masyarakat sehubungan dengan dilaksanakannya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Ketahanan keluarga tercakup didalamnya kesejahteraan dan keamanan keluarga sangat menentukan bagi terciptanya ketahanan wilayah, yang secara berjenjang akan menentukan tercapainya ketahanan nasional. Dengan demikian peningkatan ketahanan keluarga sangat diperlukan bagi negara yang menginginkan memiliki ketahanan nasional tinggi. Dengan mengetahui dan memahami perbandingan ketahanan keluarga sebagai dampak dari satu kebijakan sangat diperlukan baik dalam bidang akademis maupun praktisi, khususnya bidang kebijakan.

Adapun wilayah Jakarta Timur dipilih secara purposive untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni ;

Pertama, Wilayah DKI (Jabodetabek) merupakan wilayah terbesar dalam penggunaan minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga dibandingkan wilayah lainnya. Data tahun 2007 dari Pertamina menyebutkan bahwa jumlah target wilayah Jabodetabek sebesar 3.802.000 KK, Bandung 209.000 KK, Cirebon 131.000 KK, Semarang 244.000 KK, Yogyakarta 39.000 KK, Surabaya 621.000

KK serta Bali 313.000 KK. Oleh karena itu wilayah Jabodetabek sekaligus dijadikan barometer bagi keberhasilan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.²

Kedua, Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI bulan Januari 2008 menunjukkan bahwa wilayah Jakarta Timur memiliki penduduk yang paling besar dibandingkan dengan wilayah kota administrasi DKI, yakni 28,7 % atau 2.167.928 penduduk, sementara itu untuk Jakarta Utara sebanyak 15,7 % (1.184.19), Jakarta Pusat 11,6 % (874.817), Jakarta Barat 20,8 % (1.571.456), Jakarta Selatan 23,1 % (1.745.347) dan kepulauan Seribu 0,3 % (20.039), dengan adanya penduduk yang besar ini diharapkan lebih dapat mewakili dalam pemilihan responden.

Ketiga, Laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor : 23/Humas DESDM/ 2008, bulan April 2008 menempatkan wilayah Jakarta Timur termasuk wilayah pengguna minyak tanah sebagai konsumsi rumah tangga yang tinggi, yakni 442.384, yang menempati urutan kedua setelah wilayah Jakarta Barat dari seluruh wilayah di propinsi DKI yang berjumlah = 1.761.408. Adapun jumlah rincian masing-masing wilayah adalah: Jakarta Utara = 274.188, Jakarta Timur = 442.384, Jakarta Pusat = 178.000, Jakarta Selatan = 441.887 dan Jakarta Barat = 454.949.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut diharapkan pemilihan studi kasus dalam penelitian dapat lebih representatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa permasalahan penelitian berkaitan dengan :

” Adanya dampak terhadap ketahanan keluarga pada masyarakat sebagai sasaran kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, khususnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. ”

² Sumber Data Pertamina Tahun 2007.

1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan tentang dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, dihadapkan pada kondisi rumah tangga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah bagian Daerah Khusus Ibukota (DKI), dimana masyarakatnya terbesar dalam mengkonsumsi minyak tanah untuk konsumsi keluarga dibandingkan daerah lainnya.

1.4. Pertanyaan Penelitian.

Dari permasalahan tersebut dapat diajukan empat pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg ?
2. Bagaimana kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah sebelum kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan ?
3. Bagaimana kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian LPG sesudah kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan ?
4. Bagaimana perbandingan kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG) dengan kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (sesudah dilaksanakan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG) untuk keperluan konsumsi rumah tangga (memasak) ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

- a. Mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg.
- b. Mendiskripsikan dan menjelaskan kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan).
- c. Mendiskripsikan dan menjelaskan kondisi ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (sesudah konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan).
- d. Membandingkan dampak pemakaian minyak tanah sebelum pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dan pemakaian LPG sesudah pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dalam mendukung ketahanan keluarga di wilayah Jakarta Timur.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- a. Agar didapatkan gambaran dan pemahaman tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.
- b. Agar diperoleh kejelasan tentang ketahanan keluarga baik dengan pemakaian minyak tanah maupun LPG untuk keperluan rumah tangga.
- c. Agar didapatkan kejelasan perbandingan dampak ketahanan keluarga akibat pemakaian minyak tanah maupun LPG dalam keperluan rumah tangga.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun pustaka tambahan bagi kalangan peneliti bidang kebijakan pada khususnya dan bidang ketahanan nasional pada umumnya.

1.6. Sistematika Penulisan

- I Pendahuluan. Berisikan tentang; Latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- II Kajian Teori. Menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terlingkup didalamnya pembahasan pengertian kebijakan publik, jenis, siklus serta dampak kebijakan serta teori tentang konsep ketahanan keluarga.
- III Metode Penelitian. Menjelaskan tentang jenis, tempat dan waktu, instrumen dan teknik pengumpulan data serta analisis data dalam penelitian.
- IV Gambaran Umum Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai tempat penelitian, meliputi kondisi geografi dan kondisi sosial ekonomi penduduk.
- V Analisis Hasil Penelitian. Mencakup tentang deskripsi dan penjelasan serta analisis data penelitian, yang pada akhirnya dapat dideskripsikan serta dijelaskan jawaban atas rumusan permasalahan penelitian.

VI Kesimpulan dan Saran. Menguraikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang berkenaan dengan hasil serta proses penelitian.



2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG

2.1.1. Latar Belakang dan Pengertian

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu kebijakan yang digulirkan pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Kebijakan ini merupakan hasil penjabaran dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 yang mengatur kebijakan energi. Menurut Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu kebijakan energi nasional adalah dengan cara diversifikasi energi, yakni kebijakan energi yang dilaksanakan melalui penyediaan energi baru maupun terbarukan yang wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang yang mengatur tentang kebijakan energi tersebut merupakan salah satu jawaban atas terbitnya Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang menyebutkan bahwa Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Terbitnya Undang-Undang ini dilatarbelakangi permasalahan yang muncul akibat kelangkaan energi, khususnya yang bersumber dari minyak bumi yang memang sudah menjadi permasalahan tingkat global.

Permasalahan kelangkaan energi yang sudah menjadi wacana dunia tidak dapat dilepaskan dengan globalisasi, yang dimaknai sebagai keseluruhan proses dimana masyarakat di dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yakni *global society*.³ Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang bersifat multidimensial. Teknologi informasi, dan jenis-jenis teknologi lainnya berkembang secara pesat dan merebak secara luas, perdagangan berkembang secara global serta arus investasi dan dana juga bergerak secara cepat, sehingga memunculkan kesalingtergantungan hampir di setiap kehidupan manusia.

³ Martin Allbrow dan Elizabeth King, eds, *Globalization, Knowledge and Society*, London: Sage Publication, 1990, P 11.

Anthony Giddens menyebutnya sebagai suatu intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian-bagian dunia lainnya, atau sebaliknya. Lebih lanjut diterangkan bahwa setiap negara tidak mungkin dapat lari dari globalisasi, oleh sebab itu satu-satunya jalan harus menerima globalisasi dengan serius dan berperspektif global.⁴ Sebagai ilustrasi (seperti sudah disebutkan dalam bab pendahuluan) adalah ketika terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar di Amerika Serikat pada saat liburan musim panas, sementara disisi lain produksi minyak dunia tetap, maka berimbas pada kelangkaan minyak yang berbuntut pada kenaikan harga, dan oleh karena harga BBM di Indonesia tidak ditetapkan berdasarkan biaya produksinya, tapi dihitung berdasarkan harga minyak rata-rata dunia, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pada harga BBM di Indonesia.

Permasalahan kelangkaan energi (BBM) yang sangat erat berhubungan dengan masa depan bangsa, lebih-lebih dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi dan informasi sejalan dengan penggunaan energi yang relatif lebih tinggi, mengharuskan setiap bangsa untuk berlomba memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan energi menjadi sangat strategis bukan hanya untuk dalam negeri suatu bangsa, namun menyangkut bangsa di dunia. Terobosan-terobosan untuk mendapat energi baik dengan memperbaharui maupun dengan penggantian energi alternatif menjadi wacana global yang setiap bangsa menjalankannya. Hal tersebut senada dengan konsep Giddens dalam *The Third Way* bahwa negara harus berperan dalam meringankan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Salah satu kebijakan energi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah dengan melaksanakan program diversifikasi energi dengan menjalankan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Kebijakan ini mulai diimplementasikan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan

⁴ Anthony Giddens, *The Third Way and It's Critics*, 2000, dalam terjemahan "Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya", 2005, hal 98.

penetapan harga LPG 3 kg. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui dua tahap, baik jangka pendek yang diperkirakan sampai dengan tahun 2009, maupun jangka menengah melalui peningkatan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG (2010 – 2014).⁵

Salah satu alasan kuat dikeluarkannya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah bahwa selama ini subsidi terbesar BBM diberikan kepada minyak tanah (lebih dari 50 % anggaran subsidi BBM), dari tahun ke tahun anggaran ini mengalami kenaikan, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat. Adapun penghitungan secara teori dapat disebutkan bahwa pemakaian 1 liter minyak tanah dapat disetarakan dengan pemakaian 0,57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg akan lebih kecil dari pada subsidi 1 liter minyak tanah.

Sebelum pelaksanaan konversi dilakukan, Pertamina telah melaksanakan uji pasar LPG 3 kg kepada 500 responden di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran pada bulan Agustus 2006. Dari pengujian diperoleh bahwa 99 % responden memilih untuk menggunakan LPG 3 kg dan tidak akan kembali ke minyak tanah, 93 % tidak menemui kendala dalam menggunakan LPG, 97,4 % menyatakan bahwa LPG lebih hemat dari pada minyak tanah, dengan tingkat penghematan Rp 2000 – Rp 3000 per minggu serta 94 % responden menyatakan kompor gas mudah untuk digunakan.

Secara nasional jika kebijakan konversi minyak tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan menghemat 15-20 Trilyun subsidi BBM per tahun. Pada mekanisme pelaksanaannya pemerintah akan membagikan secara gratis peralatan memasak kepada rumah tangga pengguna minyak tanah sejumlah 1 set kompor 1 pit (berikut selang dan regulator) serta 1 tabung 3 kg beserta isinya. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa kebijakan konversi minyak tanah ke LPG ini dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan energi nasional sekaligus dapat

⁵ Evita H. Legowo, "Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Ketahanan Energi dan Peran Minyak dan Gas Bumi", Makalah Seminar Membangun Strategi Ketahanan Energi yang berkelanjutan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional, September 2008.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah sebagai sasaran kebijakan. Namun demikian konsep kebijakan tersebut akan menjadi sebaliknya, jika dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan maupun ketidakadilan, khususnya ketika berhadapan dengan lonjakan harga LPG akibat terjadi permintaan yang besar sebagai dampak kebijakan konversi.

Dengan mendasarkan referensi sistem ekonomi pasar sosial yang diperkenalkan oleh Prof. Ludwig Erhard di Jerman Barat pada tahun 1948, pada waktu menjabat Menteri Perekonomian dalam kabinet Kenrad Adenaur, yang membawanya menjadi Konselir I Jerman Barat pasca Perang Dunia II, yakni suatu sistem ekonomi yang mengkombinasikan kebebasan pasar dengan keadilan sosial, maka lonjakan harga yang berdampak ketidakadilan antara masyarakat pengguna LPG dengan pengusaha dapat dihindarkan. Lebih jauh tentang sistem ekonomi pasar sosial Alfred Muller Armack, Kepala Departemen Perencanaan Kementerian Perekonomian Erhard, menjelaskan bahwa sistem tersebut merupakan usaha untuk membangun sebuah sintesa yang sungguh-sungguh antar pasar dan jaringan sosial, dimana kemampuan dan kekuatan pasar menanggung program jaminan sosial dan sebaliknya jaminan sosial menjamin keberhasilan dan kelanjutan dari kekuatan-kekuatan pasar.⁶ Adapun tugas utama negara adalah menetapkan kebijakan untuk menata tata tertib ekonomi. Dalam hal ini negara berkewajiban menyusun “aturan main” untuk kegiatan ekonomi melalui Undang-Undang yang terkait dan negara berkewajiban untuk menjaga agar para pelaku ekonomi mentaati dan bukannya melanggar aturan main tadi.

Secara umum sistem ekonomi pasar sosial dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pasar harus secara bebas menuntun keputusan-keputusan ekonomi, jadi bukan oleh sistem perencanaan yang terpusat.
- b. Melindungi persaingan bebas adalah tugas utama negara.
- c. Akses ke pasar harus selalu terbuka, juga bagi pelaku bisnis asing.

⁶ M Husni Thamrin, "Ekonomi Pasar Sosial", Juni 2007, diakses dari <http://www.article.com>.

- d. Penataan tata tertib ekonomi adalah lebih penting daripada intervensi pada proses pasar.
- e. Dalam melakukan intervensi maka prinsip keserasian sistem dan keserasian pasar harus tetap dijaga.
- f. Kebijakan sosial (keadilan) tidak boleh dicapai dengan intervensi pada proses pasar, namun harus dicapai melalui pembagian hasil dari proses pasar.

Meskipun tidak keseluruhan sistem ekonomi pasar sosial dapat dengan tepat diterapkan di Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila, khususnya dalam memberikan kebebasan penuh kepada pasar dan persaingan usaha termasuk bagi pelaku bisnis asing, namun demikian dalam penerapannya pada program kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, sistem tersebut dapat dijadikan referensi bahwa pemerintah atau negara harus mengatur proses tata tertib ekonomi yang memungkinkan adanya keadilan baik bagi usaha dalam bidang LPG maupun minyak tanah juga terhadap masyarakat sebagai pengguna minyak tanah yang beralih ke LPG. Dengan demikian lonjakan harga LPG harus tetap memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat.

Dengan melihat tujuan kebijakan, yakni yang bermuara pada tercapainya tujuan nasional dan kewenangan formal yang mengatur program kebijakan serta sifat kebijakan, maka kebijakan konversi minyak tanah ke LPG termasuk dalam kategori kebijakan publik. Selanjutnya akan diuraikan tentang kebijakan publik tercakup didalamnya terminologi, pengertian, jenis serta siklus kebijakan, yang pada gilirannya dapat mendasari pengetahuan tentang kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Terminologi Kebijakan publik terdiri atas dua konsepsi, yakni "Kebijakan" dan "Publik". Terminologi kebijakan diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan yang tersedia, yang berarti bahwa kebijakan merupakan hasil dari pertimbangan untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari sejumlah pilihan yang ada, yang secara makro diartikan sebagai

porsi pengambilan keputusan. Sedangkan terminologi publik menunjukkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan, yang secara umum erat kaitannya dengan state, market dan civil society. Ketiganya kemudian menjadi aktor dalam arena publik. Oleh karena itu publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang merupakan interaksi dari ketiga aktor tersebut.

Berangkat dari terminologi tersebut, maka secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicitacitakan, atau suatu manajemen untuk pencapaian tujuan nasional.⁷ Pengertian ini mengandung dua makna, yakni kebijakan publik dipahami sebagai hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan pemahaman tentang sejauh mana pencapaian cita-cita sudah ditempuh, yang erat kaitannya dengan ukuran dari kebijakan publik. Dengan demikian kebijakan publik menyangkut faktor politik. Lebih lanjut dalam ensiklopedi bahasa diterangkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sementara itu Hogwood dan Gunn dalam menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.⁸ Hal ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan lain-lain) dan lembaga voluntir lainnya juga memiliki kebijakan. Namun kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik, oleh karena tidak dapat memakai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana pemerintah.

⁷ Riant Nugroho D, "Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", PT Gramedia Jakarta, 2003, hal 52.

⁸ Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, Policy Analysis For The Real World, Oxford University Press, 1986.

Berkenaan dengan pendapat Hogwood dan Gunn tersebut, Bridgman dan Davis dalam Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- c. Kewenangan formal seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah.
- d. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- e. Keluaran (output), yakni apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
- f. Teori yang mengatakan bahwa jika melakukan kegiatan X, maka akan diikuti kegiatan Y.
- g. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang.⁹

Dengan mendasarkan pada pengertian kebijakan publik di atas kemudian dapat diterapkan dalam memahami kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, terutama cakupan yang dikelola dalam kebijakan ini.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG memiliki tujuan umum hendak mengatur penggunaan energi negara, sehingga permasalahan mendasar energi, khususnya energi fosil yang mempunyai karakteristik tak terbarukan, dapat ditekan baik untuk saat ini maupun mendatang. Dengan tujuan tersebut pada gilirannya masyarakat Indonesia akan terhindar dari kesulitan untuk mendapatkan energi, khususnya bagi konsumsi keseharian yang erat kaitannya dengan kesejahteraan maupun kehidupan secara langsung terhadap warga masyarakat .

⁹ Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Publik : Panduan praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta Bandung 2005.

Oleh karena itu tujuan utama kebijakan ini bermuara pada tujuan nasional yang berupa cita-cita bangsa untuk memakmurkan dan meningkatkan kehidupan rakyat.

Kebijakan konversi telah dipilih pemerintah sekarang tentu saja telah melalui serangkaian analisis yang pada akhirnya diputuskan kebijakan ini yang diimplementasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, yang kemudian dijabarkan dengan peraturan-peraturan dibawahnya, misalnya Peraturan Menteri, keputusan Menteri dan sebagainya.

2.1.2. Jenis Kebijakan

Bertolak dari pengertian kebijakan publik tersebut, maka dapat didefinisikan jenis-jenis kebijakan publik yang dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni :¹⁰

Pertama, berdasarkan maknanya, kebijakan publik bermakna setiap hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Dalam pengertian ini pemerintah dihadapkan pada dua opsi pilihan untuk memilih dan tidak memilih atau mengerjakan dan tidak mengerjakan suatu kebijakan publik, yang didasarkan atas sifat kegiatan (strategis atau tidak strategis bagi pencapaian tujuan nasional) maupun kondisi kemampuan masyarakat. Matriks untuk dapat memahami jenis kebijakan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

¹⁰ Riant Nugroho D, "Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", PT Gramedia Jakarta, 2003, hal 63.

	Kegiatan Strategis	Kegiatan Kurang/Tidak Strategis
Masyarakat mampu	I Pemerintah (dengan masyarakat)	II Masyarakat
Masyarakat tidak Mampu	III Pemerintah	IV Pemerintah (dibiarkan)

Dari matriks di atas dapat dijelaskan bahwa pada kwadran I, oleh karena masyarakat mampu melaksanakan meskipun kegiatan bersifat strategis, maka pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang terjadi misalnya pada bidang pendidikan dan transportasi.

Pada kwadran II sifat kegiatan kurang strategis, sementara itu masyarakat mampu melaksanakan, sehingga kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak mengambil untuk dikerjakan meskipun menghasilkan laba besar, Contoh kebijakan ini misalnya bidang perdagangan maupun mie instan.

Kwadran III, sifat kegiatan strategis dan masyarakat tidak mampu melaksanakan, maka sepenuhnya pemerintah mengerjakan kebijakan ini. Contoh kebijakan dalam bidang persenjataan maupun bidang energi, termasuk didalamnya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG merupakan kebijakan strategis dilihat dari sumber daya yang diolah serta kebutuhan bagi masyarakat. Saat ini sumber daya energi dunia maupun nasional masih sangat menggantungkan pada minyak bumi (sumber daya fosil), sehingga dengan sifat yang terbatas dan tak terbarukan, maka bidang ini sangat strategis dan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang bertujuan

mengurangi pemakaian minyak tanah dengan mengalihkan pemakaiannya ke LPG, dengan asumsi mengurangi kelangkaan minyak bumi (tanah) dan mengoptimalkan pemakaian energi lainnya untuk keperluan konsumsi keluarga merupakan kebijakan strategis yang langsung bertautan kepada masyarakat dan bersifat nasional, serta secara tidak langsung dapat menjawab permasalahan global. Oleh karena itu kebijakan ini menjadi perhatian khusus bukan hanya masyarakat nasional namun juga masyarakat dunia.

Kwadran ke IV, sifat kegiatan kurang strategis, namun masyarakat mampu melaksanakan, maka tanggung jawab oleh pemerintah dengan sifat rutinitas (dibiarkan), misalnya pada kegiatan perintisan catatan sipil, dan sebagainya.

Kedua, berdasarkan bentuknya, kebijakan publik dapat dibagi dua kelompok, yakni kebijakan publik dalam bentuk peraturan pemerintah yang tertulis, misalnya peraturan perundangan, serta peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut dengan konvensi.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah salah satu bentuk kebijakan tertulis, yakni yang didasarkan atas aturan yang dituangkan secara tertulis melalui Peraturan Presiden yang kemudian diatur secara berjenjang dengan Peraturan-Peraturan dibawahnya. Adapun peraturan tertulis bagi pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg; yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan-peraturan di bawahnya, Peraturan maupun Keputusan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri ESDM No 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG bersubsidi (PSO), serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1661 Tahun 2008 tentang Harga Patokan LPG bersubsidi tahun 2008.

Ketiga, karakter kebijakan publik, yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Dalam hal ini dapat dibagi dua, yakni regulatif versus deregulatif atau restriktif versus non restriktif, yaitu kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan.

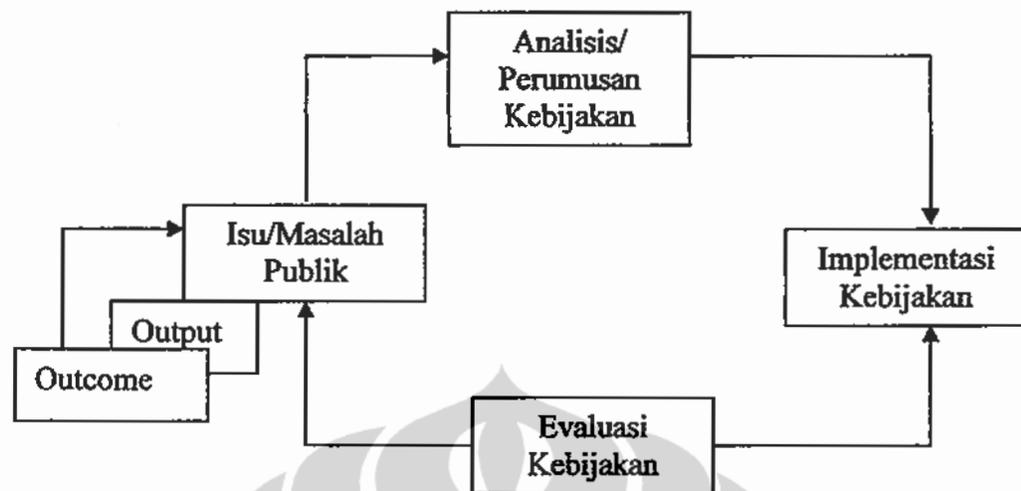
Sebagian besar kebijakan berkenaan dengan hal-hal yang regulatif/restruktif. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah salah satu kebijakan yang memiliki karakter ini. Dalam kebijakan konversi minyak tanah ke LPG didalamnya diatur tentang masyarakat sebagai sasaran kebijakan dengan ketentuan atau pembatasan tertentu, yakni masyarakat pengguna minyak tanah untuk memasak (konsumsi) yang seelumnya tidak/belum memakai LPG untuk keperluan memasak. Dengan demikian sasaran kebijakan bersifat pembatasan dan pembebasan bagi masyarakat yang tidak terkena kebijakan.

Jenis karakter kebijakan kedua, yaitu kebijakan alokatif versus distributif / redistributif yang berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik. Fungsi dari kebijakan keuangan publik adalah; Pertama, fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasikan barang-barang publik dan mekanisme alokasi barang dan jasa yang tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pasar; Kedua, fungsi distribusi yang bertautan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk didalamnya perpajakan; Ketiga fungsi stabilisasi, yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi; Keempat fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horisontal dan vertikal.

2.1.3. Siklus Kebijakan

Secara garis besar dapat disebutkan siklus kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan yang dalam penyusunannya harus mendasarkan pada analisis kebijakan, implementasi kebijakan yang berisikan cara agar kebijakan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya serta evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu mekanisme pengawasan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan dan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Adapun gambar dari siklus kebijakan publik sebagai berikut :¹¹

¹¹ Riant Nugroho D, Opcit, hal 63.



Selanjutnya dari siklus kebijakan tersebut penerapannya dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG akan diuraikan dibawah :

2.1.3.1. Analisis dan Perumusan Kebijakan

Secara umum analisis kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses evaluasi yang sistematis tentang kebijakan yang diambil, strategi pelaksanaan, serta konsekuensi yang mungkin didapat. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky,¹² analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Adapun peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, bukan pengambil kebijakan semata.

William Dunn menyebutkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis dalam menaksir dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan

¹² Patton, Carl V dan David S. Sawicky, "Basic Methods of Policy Analysis and Planning, London : Prentice-Hall, 1993.

kebijakan.¹³ Dengan demikian analisis kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik. Oleh karena itu analisis kebijakan dapat disebutkan juga sebagai proses intelektual yang mengawali perumusan kebijakan.

Bertolak dari pengertian analisis kebijakan tersebut maka setiap analisis kebijakan harus dilakukan dengan mendasarkan pada struktur analisa yang runtut, yang paling tidak mencakup latar belakang permasalahan, yakni berupa isue-isue terhadap masalah yang terjadi, sehingga dapat diidentifikasi masalahnya. Adanya permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya, yang kemudian akan dipilih alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat. Setelah didapat alternatif kebijakan selanjutnya ditentukan rencana implementasinya yang didalamnya mencakup monitor dan evaluasi kebijakan yang ditentukan.

Konsep kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dilakukan oleh pemerintah Indonesia didasarkan atas adanya isu / permasalahan global yang menyangkut kelangkaan energi. Permasalahan global ini dialami pula oleh Indonesia, meskipun Indonesia termasuk negara kaya akan potensi sumber daya energi. Kelangkaan energi berakibat terjadinya krisis energi, sehingga beberapa kebijakan harus ditempuh untuk menjawab adanya permasalahan ini. Krisis energi listrik harus menempuh jalan dengan melakukan pemadaman listrik secara bergilir yang berdampak meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha yang membutuhkan energi listrik secara kontinyu. Energi batubara menurut iaporan Departemen ESDM memiliki sumber daya cadangan paling tinggi diantara energi fosil lainnya, mengalami hal serupa dengan kasus laporan kesulitan PLN dalam memperoleh batu bara untuk keperluan sebagai pembangkitnya. Tidak ketinggalan pula kasus energi minyak, khususnya minyak tanah yang langsung digunakan masyarakat unrtuk keperluan konsumsi memasak,

¹³ William N. Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", Gadjah Mada University Press, 1992, hal 204.

di beberapa tempat terjadi antrean minyak tanah yang berakibat semakin lengkaplah permasalahan masyarakat kalangan ekonomi bawah.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut yang menyangkut seluruh masyarakat dan bukan hanya satu negara namun seluruh negara di dunia, sehingga menjadikan permasalahan ini begitu strategis untuk segera diambil tindakan, maka dirumuskanlah beberapa kebijakan yang bertujuan terjadi penghematan energi yang pada gilirannya dapat mengurangi kelangkaan energi. Salah satu kebijakan itu adalah kebijakan diversifikasi energi dengan menjalankan konversi penggunaan minyak tanah ke LPG untuk keperluan konsumsi masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung adanya keputusan kebijakan ini adalah :

- a. Pemanfaatan gas bumi masih relatif kecil dibandingkan dengan ketersediaannya. Pada tahun 2003 tercatat cadangan gas bumi sekitar 182 triliun kaki kubik. Dengan menggunakan angka produksi gas bumi pada tahun yang sama sebesar 3,0 triliun kaki kubik, maka sumber daya gas bumi mampu melayani selama 61 tahun ke depan. Pada tahun tersebut data resmi yang dikeluarkan pemerintah, total sumber gas bumi sebesar 384,7 TSCF.¹⁴ (lihat tabel 2.3.).
2. Gas bumi merupakan jenis energi bersih dengan tingkat polusi yang jauh lebih kecil dari BBM, serta memiliki efisiensi pembakaran yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan program langit biru yang dicanangkan, serta konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mempersyaratkan pemakaian energi yang efisien serta ramah lingkungan.
3. Berkurangnya cadangan minyak bumi Indonesia (10 milyar barel) dan akhir-akhir ini produktifitas mengalami penurunan dengan tidak mencapai 1 juta barel, serta rencana penghapusan subsidi BBM yang mendorong untuk peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif yang

¹⁴ Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025, ESDM 2005

salah satunya adalah gas bumi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan *energi supply security*.

4. Bagi pemakaian sendiri penggunaan LPG untuk keperluan rumah tangga mendatangkan manfaat antara lain; Berpotensi mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga karena harga gas relatif lebih murah, tidak beracun serta memiliki tingkat kebersihan dan titik bakar yang tinggi.

Tabel 2.3.

**Sumber Daya, Cadangan, Produksi serta Rasio Energi Fosil
Indonesia**

Jenis Energi Fosil	Sumber Daya	Cadangan	Produksi	Rasio Cad/Prod (Tahun)
Minyak	86,9 miliar barel	9,1 miliar barel	387 juta barel	23
Gas	384,7 TSCF	185,8 TSCF	2,95 TSCF	62
Batubara	58 miliar ton	19,3 miliar ton	132 juta ton	146

Sumber : Departemen ESDM, 2007

2.1.3.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Donald S Van Meter, dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sasaran dan standard kebijakan. Faktor ini akan menentukan performance (penampakan) suatu kebijakan, yang dapat diukur sejauhmana sasaran dan standard kebijakan dapat dianalisis.
- b. Sumber daya kebijakan. Meliputi keuangan atau insentif dalam program, untuk mendorong atau memudahkan implementasi yang aktif.
- c. Komunikasi antar organisasi dan efektifitas pelaksanaan. Faktor ini berfungsi memindahkan pesan dari atas ke bawah atau dari organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.

- d. Karakteristik agen Implementasi. Faktor ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi performance kebijakan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap performance agen atau instansi yang mengimplementasikan kebijakan.
- f. Disposisi.¹⁵

Dilain sisi Hogwood dan Gunn, yang ditulis dalam Abdul Wahab, memberikan persyaratan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara, yang meliputi :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber daya yang memadai.
3. Tersedia perpaduan sumber-sumber yang diperlukan.
4. Kebijakan yang diimplementasikan memiliki hubungan kausalitas yang handal, serta hubungan ini bersifat langsung, dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
5. Memiliki hubungan saling ketergantungan yang relatif kecil
6. Terdapat pemahaman yang mendalam serta kesepakatan terhadap tujuan.
7. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
8. Komunikasi dan koordinasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁶

Sementara itu Edwards III mengatakan bahwa terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

¹⁵ Donald Van Meter and Carl Van Horn, *The Policy Implementation Process, Conceptual Frame Work*, Sage Publication, 1975, P 46.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 57.

Dari teori di atas dapat disebutkan bahwa pengetahuan tentang kebijakan baik sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik dan kondisi sosial ekonomi dari berbagai elemen yang terlibat dalam kebijakan sangat menentukan dalam implementasi kebijakan. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan persepsi dari masing-masing yang terlibat. Oleh karena persepsi seseorang terhadap suatu objek akan membawa implikasi bagi orang tersebut untuk melakukan sejumlah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan apa yang dipersepsikan sesuai tafsirannya.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Luthans yang menyebutkan tentang persepsi, sebagai berikut:

“Perseption is much brother than sensation. The perception process involves a complicated interaction of selection, organization, and interpretation.”¹⁷

Dengan mendasarkan pada teori di atas maka dapat dianalisis implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, sebagai berikut :

a. Sasaran Kebijakan.

Kelompok sasaran kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok sasaran penerima (benefeciaries) merupakan masyarakat yang menerima manfaat secara langsung terhadap kebijakan dan kelompok sasaran target, yaitu masyarakat atau organsasi yang mendapatkan pengaruh dari kebijakan.

Kelompok sasaran penerima kebijakan adalah masyarakat atau rumah tangga dan usaha mikro. Rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sedangkan Kelompok Usaha mikro, yaitu konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah

¹⁷ F. Luthans, *Organizational Behavior*, Graw Hill International Book Company, New York, 1981.

untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. (Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007).

Program pelaksanaan pembagian diatur oleh PT Pertamina sebagai pemegang Public Service Obligation (PSO). Pelaksanaannya adalah pembagian dilakukan oleh sebuah Tim Konversi PT Pertamina didampingi Tim Konsultan dan pengurus RT/RW. Pembagian dilaksanakan di setiap Kelurahan dan bergulir ke Kelurahan lain dalam tiap Kecamatan, sehingga seluruh wilayah Kecamatan akan terbagi. Untuk mendukung kelancaran pemakaian LPG masyarakat penerima program akan diberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan kompor gas serta tabung LPG. Selain itu juga akan didirikan posko pelayanan informasi sebagai pusat informasi mengenai tata cara penggunaan kompor dan tabung LPG.

Dari kelompok sasaran inilah dapat diukur sejauhmana sasaran dan standard kebijakan atau output maupun outcome kebijakan dianalisis, yang pada gilirannya dapat diketahui dampak dari kebijakan. Oleh karena itulah kelompok sasaran ini selanjutnya dijadikan populasi dalam penelitian tentang dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

b. Sumber Daya Kebijakan.

Meliputi sumber keuangan atau insentif dalam program pelaksanaan kebijakan yang akan mendorong atau mempermudah pelaksanaan kebijakan. Menurut laporan kementerian ESDM melalui surat Menteri ESDM kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Dirjen Migas, dan PT Pertamina (Persero), anggaran untuk pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG berasal dari pengurangan subsidi minyak tanah yang dialihkan ke LPG sebesar Rp 1,93 triliun. Program ini diperkirakan terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah mencapai 988,280 kilo liter, sedangkan konsumsi LPG naik sebesar 567.700 ton.¹⁸

Pada pelaksanaan program proses pengurangan subsidi minyak tanah dilakukan dengan mekanisme penarikan alokasi minyak tanah secara berangsur dari pangkalan ataupun agen minyak tanah, dimana konversi ke LPG mulai

¹⁸ Tempo, 30 Agustus 2006.

dilakukan. Jumlah pengurangan alokasi minyak tanah setara dengan alokasi LPG, dengan perbandingan 570 kg LPG setara dengan 1.000 liter minyak tanah. Mekanisme pelaksanaan dengan menarik langsung minyak tanah dari wilayah yang telah dikonversi inilah menimbulkan kelangkaan minyak tanah di berbagai tempat, yang menimbulkan kericuhan dan protes di masyarakat, sehingga melalui pengarahannya Presiden pelaksanaan itu dirubah untuk melakukan pengurangan minyak tanah secara bertahap, jadi tidak serta merta sama dengan jumlah pasokan LPG yang dialokasikan ke masyarakat.¹⁹

Adapun anggaran selain diperuntukkan bagi pengadaan tabung elpiji beserta perlengkapannya yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan masyarakat juga untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan konversi. Untuk pembagian secara gratis kepada masyarakat memang merupakan program yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG Tabung 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. (Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007).

c. Komunikasi,

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antar organisasi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi ini berfungsi untuk memindahkan pesan dari organisasi level atas ke bawah maupun organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG membutuhkan komunikasi baik pada level Kementerian meliputi Menteri ESDM selaku penanggung jawab utama dalam kebijakan ini dengan Menteri terkait, diantaranya Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Pertamina, yang dilakukan baik intern organisasi sendiri maupun

¹⁹ Sinar Harapan, 25 Juli 2008.

dengan organisasi terkait, termasuk didalamnya adalah para pimpinan wilayah dimana konversi akan dilaksanakan.

Menurut Peneliti LIPI bidang analisis kebijakan publik, Syafuan Rozy dalam Sinar Harapan (25 Juli 2008), adanya kelangkaan minyak tanah menggambarkan adanya koordinasi atau komunikasi yang lemah antara pihak-pihak yang terkait dalam program kebijakan konversi minyak tanah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting dijalankan untuk tercapainya implementasi kebijakan sesuai dengan rencana program yang ditentukan.

d. Karakteristik agen kebijakan

Meliputi sikap maupun struktur birokrasi dari agen kebijakan. Pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah yang dilakukan oleh Pertamina, sehingga karakteristik PT Pertamina menentukan dalam implementasi kebijakan, baik menyangkut situasi maupun kondisi organisasi. Selain itu juga birokrasi pelaksanaan kebijakan, dari organisasi perencana sampai dengan kelompok sasaran. Sebagai gambaran misalnya kesiapan Pertamina ketika harus membagikan jutaan tabung LPG kepada masyarakat, apakah proses penyediaan bisa terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan, juga kesiapan anggaran, sehubungan dengan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk konversi, misalnya pembangunan tangki timbun gas LPG di sejumlah kota yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Birokrasi pelaksanaan program juga menentukan dalam implementasi kebijakan. Adanya program pelaksanaan kebijakan yang langsung ke bawah, yakni Pertamina langsung ke masyarakat dalam hal ini melalui Ketua RT/RW menentukan terhadap efisiensi dan efektifitas program, namun perlu dilakukan penelitian yang cermat terhadap situasi maupun kondisi wilayah, dimana proses pelaksanaan kebijakan sangat sedikit melibatkan Pemerintah Daerah setempat (Camat, Walikota/Bupati maupun Gubernur).

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi negara RI yang masih dalam suasana kebangkitan dari krisis ekonomi ditambah dengan krisis energi yang mengglobal turut serta menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan konversi, sebagai contoh kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tidak bisa langsung mentransfer dari hasil subsidi minyak tanah, oleh karena bersifat berkesinambungan, sehingga mutlak dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Adanya anggaran sangat tergantung dari kondisi perekonomian negara. Dengan demikian kondisi ekonomi negara menjadi salah satu penentu pada implementasi kebijakan. Demikian pula dengan kondisi sosial dan politik yang sangat erat dengan disposisi kebijakan. Kondisi sosial masyarakat, khususnya kelompok sasaran perlu diperhitungkan dalam mengimplementasi kebijakan, termasuk didalamnya kondisi politik nasional pasca reformasi dan terpilihnya kepemimpinan nasional (Presiden) yang bukan berasal dari Partai besar yang tidak mendapatkan dukungan kuat dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.3.3. **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauhmana tujuan kebijakan dapat tercapai, dengan kata lain evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut William Dunn, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), sehingga evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Berkenaan dengan pengertian evaluasi kebijakan tersebut, maka evaluasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG meliputi evaluasi terhadap perumusan kebijakan, sehingga akan diperoleh informasi tentang alternatif pemecahan inti, yakni kelangkaan energi dalam hal ini minyak bumi dihadapkan dengan alternatif pemecahan, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan konversi yang dikaitkan dengan optimalisasi sumber daya LPG, juga dalam mendayagunakan waktu, dana maupun sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan yang mendukung terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG.

Disamping itu yang lebih utama adalah evaluasi terhadap implementasi kebijakan, yang mana sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan berada pada domain implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG berkenaan dengan kinerja pelaksanaan kebijakan yang berupa variasi dari hasil (output maupun outcome), sehingga sejauhmana pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat terlaksana sesuai perencanaan, sejauhmana dampak kebijakan konversi minyak tanah mempengaruhi terhadap tujuan yang sudah ditetapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap variasi dampak kebijakan adalah domain dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan konversiminyak tanah ke LPG. Berkenaan dengan evaluasi ini maka dapat disebutkan bahwa hasil penelitian yang berupa diskripsi tentang pelaksanaan serta dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu wujud evaluasi secara mendalam, khususnya evaluasi implementasi kebijakan.

2.1.3.4. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan adalah akibat dari hasil kebijakan (Output dan Outcome). Hasil kebijakan merupakan keluaran dari analisis implementasi kebijakan yang merupakan sumber informasi utama dalam pemantauan kebijakan. Pemantauan adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik.²⁰

Dalam pemantauan keluaran dan dampak kebijakan kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima (benefeciaries), yakni kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan itu, namun juga diperhatikan kepada kelompok sasaran (target groups), yaitu individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program.

²⁰ William N. Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", Gadjah Mada University Press, 1999 hal 509.

Sementara itu menurut Dye dan Anderson, seperti dikutip oleh Antonius Tarigan mengungkapkan bahwa dampak kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²¹

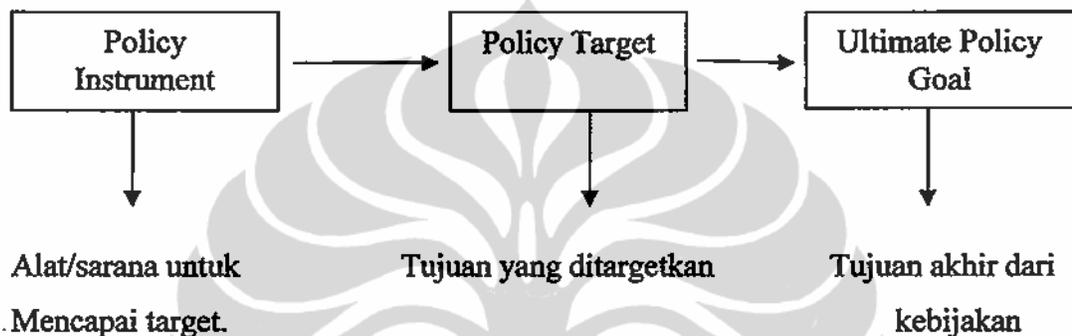
- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, yakni objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas dan dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok sasaran / target, yang disebut dengan efek eksternalitas atau spillover, karena sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
- b. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang maupun biaya langsung kebijakan, dalam bentuk dana dan sumber dana yang digunakan dalam program dan biaya tidak langsung, mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, serta manfaat secara tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas.

Dengan demikian secara teoritis dapat disebutkan bahwa dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan, oleh karena itulah penting diperhatikan untuk tidak mengukur manfaat kebijakan dalam bentuk aktivitas pemerintah semata yang sering terjadi dalam menganalisis output kebijakan publik. Berdasarkan teori di atas dalam menganalisis dampak kebijakan publik perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dalam upaya mengukur aktivitas pemerintah, sebagai berikut :

Pertama, dampak kebijakan terhadap kelompok target atau sasaran kebijakan, dalam hal ini adalah masyarakat yang langsung menerima program kebijakan, terdiri atas rumah tangga dan kelompok usaha mikro. Dampak kebijakan dapat diketahui langsung dari kelompok masyarakat ini dan kelompok

²¹ Antonius Tarigan, "Mencermati Dampak kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan", hal 3.

ini pula menjadi target atau objek utama kebijakan. Ukuran untuk mengetahui dampak kebijakan berupa tercapainya target kebijakan (Policy Target) dengan mempergunakan sarana (Policy Instrument) yang sudah ditentukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada gilirannya akan tercapai tujuan akhir dari adanya kebijakan (Ultimate Policy Goal). Adapun hubungan dari ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut :²²



Dari model di atas dapat dijelaskan : Target kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah tercapainya pemakaian 90 persen dari konsumsi minyak tanah beralih ke LPG dalam jangka waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Tujuan akhir kebijakan adalah bagi pemerintah dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun menjadi 17,5 triliun dan untuk kelompok masyarakat sebagai sasaran kebijakan adalah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya konsumsi rumah tangga serta memiliki tingkat lingkungan yang lebih sehat/bersih atau dengan kata lain akan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

Adapun sarana/alat yang dipergunakan untuk mencapai target tersebut terdiri atas beberapa cara yang dituangkan melalui peraturan maupun prosedur pelaksanaan. Beberapa alat yang dipergunakan adalah :

Pertama, dengan cara sosialisasi program kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti serta memahami arti serta tujuan kebijakan.

²² Model disadur dari Wan Usman, "Daya Tahan Bangsa, 2003 hal 108.

Kedua, dilakukan dengan membagi secara gratis tabung LPG beserta perlengkapannya kepada masyarakat kelompok sasaran.

Ketiga, melakukan pelatihan tata cara pemakaian perlengkapan tabung LPG, baik dengan secara langsung ke masyarakat maupun dengan menerbitkan petunjuk pemakaian.

Selanjutnya dampak terhadap kelompok sasaran akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kedua, dampak kebijakan terhadap kelompok lain diluar kelompok target (eksternalitas / spillover). Diantara Kelompok ini adalah kelompok usahawan yang bergerak dalam bidang minyak tanah. Adanya konversi minyak tanah berdampak kepada para pengusaha minyak tanah, sehingga perlu diberikan jalan keluar, sehingga kelompok ini tidak menjadi kelompok yang dirugikan, jangan sampai dengan adanya kebijakan banyak pengusaha yang menutup usahanya lebih-lebih bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada usaha minyak tanah. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap kelompok ini diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kelompok ini untuk mengalihkan usahanya ke LPG. Untuk mempermudah proses peralihan ini, karena usaha di bidang LPG relatif lebih membutuhkan modal tinggi dapat dilakukan dengan memberikan kredit lunak, sehingga kesulitan modal dapat diatasi.

Ketiga. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang maupun yang akan datang. Adanya kelangkaan minyak tanah disusul dengan kelangkaan LPG di beberapa wilayah adalah salah satu dampak kondisi sekarang setelah konversi dilaksanakan. Dampak untuk kondisi mendatang salah satunya dapat dilihat baik secara makro maupun mikro. Secara makro bisa diukur dari perubahan surplus anggaran negara akibat berkurangnya subsidi BBM dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menjawab permasalahan kelangkaan energi. Dampak kondisi mikro terjadi dalam masyarakat, yakni adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan ketahanan keluarga.

Keempat. Dampak terhadap biaya langsung maupun tidak langsung,

termasuk kehilangan peluang untuk kegiatan lain. Dampak ini berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, meskipun akan diganti dengan hasil pengurangan subsidi, namun paling tidak untuk modal awal pelaksanaan program membutuhkan anggaran, sehingga perlu dipikirkan asal anggaran, jika harus mengurangi anggaran bidang lain maka akan berdampak terhadap bidang tersebut atau jika mengandalkan investor, perlu dijelaskan dampak yang terjadi terhadap investor tersebut. Termasuk didalamnya bahwa dengan melaksanakan kebijakan ini maka berarti peluang untuk melakukan kebijakan alternatif lainnya tidak terpenuhi. Hal ini perlu dijelaskan dampak kerugiannya.

Kelima. Dampak manfaat secara tidak langsung terhadap masyarakat. Dampak ini dapat dipahami sebagai efek yang secara tidak langsung menguntungkan bagi masyarakat. Sebagai contoh adalah terbukanya peluang usaha baru dalam bidang LPG, misalnya penambahan tenaga kerja untuk pengadaan tabung LPG, kompor dan segala perlengkapannya. Juga menambah peluang usaha untuk penjualan peralatan LPG dan sebagainya. Tentu saja analisis dampak kemanfaatan ini harus diimbangi dengan dampak kerugian secara tidak langsung yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

2.2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga berasal dari padanan kata "ketahanan" dan "keluarga". Kata ketahanan diartikan sebagai kemampuan untuk tetap hidup (exist), meskipun terdapat hambatan, gangguan maupun tantangan yang dialami, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Kata keluarga, dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa keluarga terdiri atas bapak, ibu, anak-anak dan penghuni seluruh isi rumah. Keluarga dapat dibagi menjadi keluarga batih atau keluarga elementer, terdiri atas bapak, ibu dan anak-anak (keluarga inti) serta keluarga parsial terdiri dari bapak dan ibu tanpa anak.²³ Dari sudut pandang psikologi,

²³ Yandianto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia, M 2 S Bandung, hal 250.

keluarga bermakna sebagai suatu kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, dimana individu belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.²⁴ Dengan demikian ketahanan keluarga dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan dalam diri keluarga untuk tetap exist, meskipun banyak tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari dalam maupun luar

Dari beberapa pengertian keluarga tersebut dapat disampaikan bahwa kelompok sosial pertama bagi individu adalah keluarga, dimana didalamnya terdiri atas bapak, ibu dan anak-anak. Dengan demikian konsep pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok sosial pertama adalah keluarga, yang dalam hal ini mengacu pada hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, lebih lanjut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat pengeluaran atau efisiensi rumah tangga, pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peningkatan taraf hidup sangat erat kaitannya dengan fungsi keluarga, yakni sebagai wahana untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi setiap anggota, agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya berdasarkan kesetaraan. Horton dan Chester dalam Sudjadi dan Siti Wahyu Iryani, menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai pengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan serta ekonom. Jika salah satu fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik, maka keluarga rentan mendapatkan masalah, sehingga keluarga tidak sejahtera.²⁵ Adapun kesejahteraan berarti suatu kondisi kehidupan dimana keseimbangan lahir dan batin manusia tercipta dalam kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rokhani.

Kesejahteraan keluarga merupakan indikasi untuk tercapainya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 diartikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan

²⁴ Abu Ahmadi, "Psikologi Sosial, PT Rineka Cipta, Semarang, 1990, hal 255.

²⁵ Sudjadi dan Siti Wahyu Iryani, "Profil Kesejahteraan Sosial keluarga melalui Home Industri", 1998

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan mental spiritual guna hidup mandiri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Lebih lanjut tentang ketahanan keluarga, Soemarno Soedarsono berpendapat bahwa ketahanan keluarga bertumpu pada manusia sebagai individu yang merupakan kekuatan unsumnya, yang disebut dengan ketahanan individu/pribadi. Adapun ketahanan keluarga/rumah tangga sangat menentukan terhadap tercapainya ketahanan daerah/wilayah, selanjutnya dengan ketahanan daerah pada akhirnya akan menentukan tercapainya ketahanan nasional.²⁶

Mengacu definisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tersebut, maka suatu keluarga dapat disebut memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi bila mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam keluarga. Dengan demikian ketahanan keluarga erat sekali kaitannya dengan penggerakan fungsi-fungsi dalam keluarga, khususnya ketika harus berhadapan dengan tantangan maupun gangguan dalam menuju kehidupan yang mandiri serta harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Adapun upaya untuk menyejahterakan keluarga berarti meningkatkan kualitas keluarga untuk menuju tercapainya wahana kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mampu sebagai manusia pembangunan bagi bangsa dan negara.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah salah satu kebijakan publik yang berarti suatu cara atau jalan untuk mencapai tujuan bersama sesuai yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan konversi minyak tanah ke LPG harus bermuara ke arah cita-cita tersebut. Salah satu indikator tercapainya masyarakat adil makmur adalah adanya peningkatan kesejahteraan warga negara, yang berarti kesejahteraan setiap keluarga bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG harus

²⁶ Soemarno Soedarsono, "Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai tumpuan Ketahanan Nasional", PT Intermasa, 1997, hal 63.

memiliki tujuan untuk kesejahteraan keluarga, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan keluarga.

2.3. Indikator Ketahanan Keluarga.

Definisi ketahanan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tersebut merupakan definisi yang merujuk pada pengertian umum ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Konsep Ketahanan Nasional tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dua hal, yaitu :

- a. Kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga mampu selalu mempertahankan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan dan ancaman.
- b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara agar dapat menghadapi perubahan lingkungan strategiknya di waktu sekarang dan yang akan datang agar dapat berkembang.

Sebagai kondisi maka mengandung pemahaman kemampuan untuk menyusun seluruh kekuatan yang dimiliki suatu bangsa. RM Sunardi mengatakan bahwa unsur utama dalam ketahanan nasional adalah berupa keuletan dan ketangguhan bangsa yang merupakan sinergi dari seluruh aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara.²⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlingkup didalamnya kehidupan seluruh wilayah nasional. Oleh karena itulah unsur-unsur dalam wilayah nasional adalah bagian dari bangsa dan negara, yang berarti keuletan dan ketangguhan wilayah menentukan keuletan dan ketangguhan nasional. Sementara itu keuletan dan ketangguhan keluarga akan menentukan ketahanan wilayah serta

²⁷ RM Sunardi, Teori Ketahanan Nasional, Bahan Kuliah PKN UI, 1999.

keuletan dan ketangguhan individu/pribadi akan menentukan keuletan dan ketahanan keluarga.

Dari pengertian ketahanan nasional tersebut memiliki aspek-aspek yang terdiri atas; Aspek dinamis meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan; Serta aspek statis terdiri geografi, penduduk dan sumber daya alam. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi, yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama, yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.

Begitu pula dengan halnya ketahanan keluarga yang memiliki beberapa aspek sebagai indikator yang berujung pada tercapainya kesejahteraan dan keamanan sebagai dasar terciptanya ketahanan keluarga. Menurut Ahmad Yani dalam satu makalahnya menyebutkan beberapa indikator ketahanan keluarga, yaitu:²⁸

- a. Memiliki Kemandirian Nilai. Suatu keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan jika memiliki nilai-nilai baik nilai sosial, budaya maupun agama yang diyakininya, sehingga meskipun mendapatkan tantangan maupun gangguan darimanapun dapat bertahan dengan nilai-nilai yang diyakininya, meskipun hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung terhadap nilai-nilai tersebut.
- b. Kemandirian ekonomi, yakni suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan pelengkap, yang kesemuanya itu membutuhkan pendanaan yang sangat erat sekali dengan kemampuan ekonomi.
- c. Tahan terhadap goncangan. Berkaitan dengan keamanan yang mengganggu keberlangsungan keluarga, baik dari dalam keluarga maupun dari luar (lingkungan).

²⁸ Ahmad Yani, "Ketahanan Keluarga", Majalah Sabili No. 01 Tahun XVI tanggal 24 Juli 2008.

d. Keuletan dan ketangguhan berperan dalam kehidupan sosial. Keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan jika mampu memainkan peran dalam kehidupan sosial sebagai tempat hidup bagi keluarga tersebut.

e. Mampu menyelesaikan problema yang dihadapi. Setiap kehidupan pasti akan menemukan problema atau permasalahan yang harus dihadapi. Ketahanan keluarga dapat terwujud jika segala problema tersebut dapat terselesaikan, baik problema dalam keluarga maupun problema yang terjadi di luar keluarga yang masih berkaitan dengan keluarga.

Pendapat tersebut dapat ditunjukkan bahwa ketahanan keluarga dapat dibangun dari aspek nilai dan peran sosial yang dapat diringkas menjadi satu, yakni aspek sosial; Kemandirian ekonomi yang menjadi aspek ekonomi serta adanya ketahanan terhadap guncangan maupun problema yang dapat disebut aspek keamanan baik keamanan keluarga maupun lingkungan.

Merujuk definisi ketahanan keluarga khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yang berdasarkan pada pengertian ketahanan nasional dilengkapi dengan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga terdiri atas dua mata rantai yang tidak terpisahkan, yakni kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan terbagi atas aspek ekonomi dan aspek sosial. Sementara itu keamanan meliputi keamanan dalam keluarga atau yang disebut keamanan dan keamanan lingkungan, yang kemudian disebut dengan istilah lingkungan. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa keempat aspek yang terdiri atas ekonomi, sosial, keamanan dan lingkungan merupakan indikator dalam ketahanan keluarga.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat dikatakan mampu meningkatkan ketahanan keluarga, jika keempat indikator tersebut mengalami perubahan, yakni terjadi peningkatan, atau dapat disebutkan bahwa pemakaian LPG untuk konsumsi keluarga sebagai tujuan kebijakan memiliki nilai indikator ketahanan keluarga yang lebih tinggi dari pada pemakaian minyak tanah, sebelum

dilaksanakan kebijakan konversi. Adapun penjelasan lebih lanjut dari keempat indikator tersebut akan diuraikan di bawah.

2.3.1. Ekonomi

Pembicaraan terhadap bidang ekonomi sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi kelahiran ekonomi sebagai ilmu baru dimulai sejak terbitnya buku Adam Smith tahun 1776 yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth on Nations*, yang kemudian dinobatkannya menjadi Bapak Ilmu Ekonomi.

Pengertian ekonomi sendiri secara teori merupakan abstraksi dari kenyataan ekonomi yang berupa konsep-konsep tentang variabel, andaian, perilaku dan prediksi variabel dengan metodologi yang jelas. Uraian teori dilakukan dengan sistematis yang konsisten. Teori ekonomi berkembang terus karena masalah-masalah ekonomi yang dihadapi manusia mengalami perubahan. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut lahirlah pemikiran-pemikiran yang diakui sebagai teori. Teori ini merupakan jawaban teoretik terhadap masalah tadi. Adapun pembahasan ekonomi secara umum dapat dibagi dua, yakni ilmu ekonomi makro yang membahas variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan) dan ilmu ekonomi mikro yang membahas ekonomi dalam lingkup kecil.

Untuk selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada lingkup kecil, yakni ekonomi keluarga. Pembahasan tentang ekonomi keluarga sangat erat berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran/konsumsi yang terjadi dalam keluarga.

Menurut Keynes yang terkenal dengan *Absolut Income Theory* (Teori pendapatan absolut), menyatakan bahwa terdapat hubungan pengeluaran/konsumsi dengan pendapatan, yang dapat diukur berdasarkan harga konstan. Dari pengukuran diperoleh bahwa besarnya konsumsi sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Dalam hal ini semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi dan sebaliknya.

Dengan merujuk teori Keynes dapat disebutkan bahwa keberhasilan

kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Apabila dampak pengeluaran/konsumsi keluarga setelah kebijakan lebih rendah dari pada sebelumnya, sementara diasumsikan pendapatan tetap, maka yang akan terjadi adalah adanya peningkatan ekonomi keluarga, oleh karena terjadi pengurangan konsumsi untuk memasak, namun jika yang terjadi sebaliknya, yakni pengeluaran/konsumsi lebih tinggi dari sebelum kebijakan, maka akan terjadi penurunan ekonomi keluarga.

Teori J.M. Keynes ini mendapatkan kritik dari pakar ekonomi terkemuka Keuzen, menurutnya perlu dibedakan antara fungsi konsumsi jangka panjang (Long run Consumption Function) dan fungsi konsumsi jangka pendek (Short run Consumption Function) karena kedua macam fungsi konsumsi tersebut dari hasil struktur empirisnya mempunyai bentuk yang berbeda. Sementara itu Keynes tidak membedakannya. Menurut Keuzen konsumsi jangka pendek ternyata memiliki tendensi meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan untuk konsumsi jangka panjang tetap.

Lain halnya dengan teori konsumsi dari James Duesenbery yang berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat di tentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Ia berpendapat bahwa apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving. Dengan demikian apabila kebijakan konversi minyak tanah ke LPG berdampak terhadap kenaikan pengeluaran konsumsi keluarga, maka akan terjadi saving dalam keluarga, artinya keluarga akan menyesuaikan dengan mengolah pengeluaran kembali yang disesuaikan dengan pengeluaran bidang lainnya. Namun jika terjadi penurunan pengeluaran konsumsi sebagai dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, maka pengeluaran konsumsi yang akan terjadi bergantung dari nilai penurunan tersebut.

Sementara itu dalam teori *Life Cycle Hipotesis* yang dikemukakan oleh A.

Ando, R. Bruimberg dan F. Modigliani. S, dikatakan bahwa panjang hidupnya seseorang/masyarakat dapat mempengaruhi konsumsinya, sehingga menurutnya dissaving bisa ditutup oleh saving tahun sebelumnya. Dalam teori ini digambarkan bahwa begitu seseorang lahir, ia sudah mempunyai kebutuhan-kebutuhan hidup yang menuntut untuk dipenuhi, meskipun dengan jelas pada usia tersebut ia sama sekali belum dapat berpartisipasi dalam pembentukan pendapatan. Hal ini berarti pendapatan sebesar nol dan jumlah pengeluaran konsumsinya positif, sehingga memaksa orang tersebut melaksanakan dissaving. Baru setelah dia dewasa dan memasuki angkatan kerja ia dapat memperoleh pendapatan, dan pada usia tertentu akan terjadi dissaving sampai kemudian pendapatan tersebut meningkat, sehingga terjadi saving sampai dengan umur tertentu.

Berdasarkan teori tersebut dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap pengeluaran konsumsi keluarga akan berpengaruh terhadap adanya saving dan dissaving dalam keluarga. Apabila terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi berarti kondisi keluarga melakukan saving dan sebaliknya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika saving terjadi dalam keluarga, maka akan terjadi perubahan ekonomi keluarga yang tentu saja dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, meskipun dalam teori ini pada waktu tertentu akan terjadi dissaving kembali.

Disisi lain Milton Fridman dalam teori *Permanent Income Hipotesis* berasumsi bahwa konsumen bersikap rasional dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh selama hidupnya selama kurun waktu yang dihadapinya, serta menghendaki pola-pola konsumsi yang kurang lebih merata dari waktu ke waktu. Milton Fridman menarik kesimpulan bahwa konsumsi permanen seseorang konsumen atau suatu masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya/pendapatan mereka yang bersangkutan.

Dengan adanya teori Fridman ini dapat melengkapi teori-teori sebelumnya, yakni masyarakat tetap akan bersikap rasional terhadap pengeluaran konsumsi sebagai akibat adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG,

sehingga jika konsumsi naik akibat konversi minyak tanah, maka yang terjadi adalah perubahan alokasi konsumsi lainnya yang menyesuaikan besarnya konsumsi akibat adanya kebijakan konversi minyak tanah, dan hal ini akan terjadi sebaliknya.

Dari beberapa teori konsumsi di atas dapat disebutkan bahwa secara umum apabila dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG menaikkan pengeluaran/konsumsi keluarga dari sebelumnya atau dapat diartikan pendapatan berkurang, maka yang terjadi penurunan ekonomi keluarga, meskipun dalam keluarga akan terjadi penyesuaian baik berupa saving maupun rasionalitas penyesuaian konsumsi secara keseluruhan, namun dampak tersebut pada gilirannya membawa kesejahteraan keluarga menurun. Namun apabila dampak konversi minyak tanah ke LPG mampu menekan atau mengurangi pengeluaran/konsumsi keluarga maka kesejahteraan keluarga akan meningkat.

2.3.2. Konsep Sosial

Max Weber menawarkan permasalahan sosial dengan menggabungkan berbagai daerah spektrum untuk membuktikan bahwa sebab akibat dalam sejarah manusia bukan hanya didasarkan satu segi saja misalnya motif ekonomi. Menurutnyanya harus digabungkan dari berbagai segi, termasuk didalamnya ide-ide religius dan etis yang justru memiliki pengaruh besar. Hal ini didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan bahwa dengan adanya kapitalisme di barat, ternyata mengalami kesulitan jika diberlakukan di bagian dunia timur.

Sementara itu Antony Giddens dalam buku *The Third Way*, mempercayai bahwa Negara atas dasar demokrasi mampu memiliki peran besar dalam masyarakat. Hal ini senada dengan teori kesejahteraan rakyat (*Welfare State*), yakni sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Dengan demikian terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara negara dengan rakyat sehubungan dengan fungsi sosial dari keberadaan suatu negara.

Pengertian sosial memiliki makna yang beragam. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Wan Usman memberikan pengertian sosial sebagai berikut :

Pertama. Sosial bermakna hiburan atau sesuatu yang menyenangkan, misalnya objek wisata dibangun agar pengunjung dapat terhibur atau mampu menikmati objek dengan senang, sehingga objek wisata memiliki kepentingan sosial.

Kedua. Sosial bermakna sebagai lawan dari individu. Makna sosial ini berkaitan dengan pengertian kelompok (masyarakat) atau society, sehingga suatu kelompok bukanlah merupakan penjumlahan dari individu. Oleh karena itu pengertian keuntungan sosial adalah keuntungan yang ditujukan bagi masyarakat.

Ketiga. Kata sosial bermakna umum, yakni melibatkan manusia dalam berinteraksi dengan kelompoknya, sehingga manusia sosial diartikan sebagai orang yang senang berada di lingkungan kelompok masyarakat.

Keempat. Makna sosial sering kali dilawankan dengan ekonomi, sehingga pengertian pembangunan sosial bermakna bukan pembangunan ekonomi, yakni dilihat dari aspek kemanfaatannya.

Kelima. Makna sosial berhubungan dengan konsep hak asasi sebagai anggota masyarakat. Seseorang dikatakan mempunyai hak sosial mengandung makna bahwa dia memiliki hak dalam kehidupan sosial, seperti memiliki hak untuk dapat kesempatan kerja dan sebagainya.

Dari berbagai macam pengertian sosial tersebut menunjukkan bahwa kata sosial dimaknai berlainan ketika harus dipergunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam konteks pembahasan ketahanan keluarga yang dikaitkan dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, maka makna sosial lebih banyak mengandung pengertian berhubungan dengan aspek-aspek non ekonomi. Dengan demikian makna sosial sebagai hiburan dan sosial dalam pengertian umum yang melibatkan kehidupan bermasyarakat lebih mendekati dalam

penggunaannya.

2.3.3. Konsep Keamanan.

Kata keamanan merujuk pada suatu kondisi yang bebas dari segala tekanan, ancaman maupun gangguan, sehingga pengertian umum keamanan yang dikaitkan dengan kedaulatan negara adalah terlindunginya suatu negara dari berbagai agresi baik dari dalam maupun dari luar atau terlindunginya segala kepentingan nasionalnya. Sementara itu menurut Thakur, mengartikan keamanan dengan pengertian manusia, yakni keamanan merupakan kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan kesempatan yang memungkinkannya untuk menikmati hidup yang sebesar-besarnya tanpa menghalangi orang lain untuk mengejar tujuan yang sama.²⁹

Dilain sisi UNDP tahun 1994 memberikan batasan keamanan yaitu adanya kebebasan dari segala kekurangan, kelaparan, diskriminasi, penyiksaan, penahanan tanpa melalui proses pengadilan yang bebas dan adil, dan sebagainya.³⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa komponen keamanan meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, perumahan, komunitas dan keamanan politik.

Pengertian keamanan memang lebih banyak dipergunakan dalam sektor yang lebih besar seperti halnya negara maupun dunia. Namun demikian konsep keamanan tersebut dapat dijadikan referensi untuk menuntun mendefinisikan keamanan dalam lingkup yang lebih kecil, seperti rumah tangga atau keluarga. Pengertian di atas mengandung beberapa makna keamanan, yaitu keamanan berarti adanya perlindungan, keamanan merupakan kebebasan dan keamanan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain.

Keamanan sebagai perlindungan berarti adanya jaminan untuk melindungi diri maupun kelompok dari segala bahaya yang mengancamnya, sehingga

²⁹ Ramesh Thakur, "Human Security Regimes", in William T. Tow et al (ed) "Asia's Emerging Regional Order Reconciling Traditional and Human Security, 2000, p. 230.

³⁰ Raymond Atje, "Pertumbuhan Ekonomi dan Keamanan Nasional", dalam "Perspektif Baru Keamanan Nasional", CSIS, 2005 hal 103.

keamanan keluarga dapat diartikan bahwa keluarga terlindungi dari kecelakaan / bahaya yang sewaktu-waktu mengancam. Keamanan dalam pengertian kebebasan dalam rumah tangga memberikan makna bebas melakukan perbuatan/tindakan tanpa beresiko membahayakan dirinya. Sementara itu keamanan dalam arti pemberian kesempatan mempunyai pengertian dapat memberikan kesempatan yang sama kepada anggota keluarga untuk melakukan tindakan tanpa membahayakan keluarga tersebut. Oleh karena itu analisis terhadap dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dalam hal ini adalah seberapa jauh kebijakan konversi minyak berpengaruh terhadap indikator keamanan yang dijelaskan di atas.

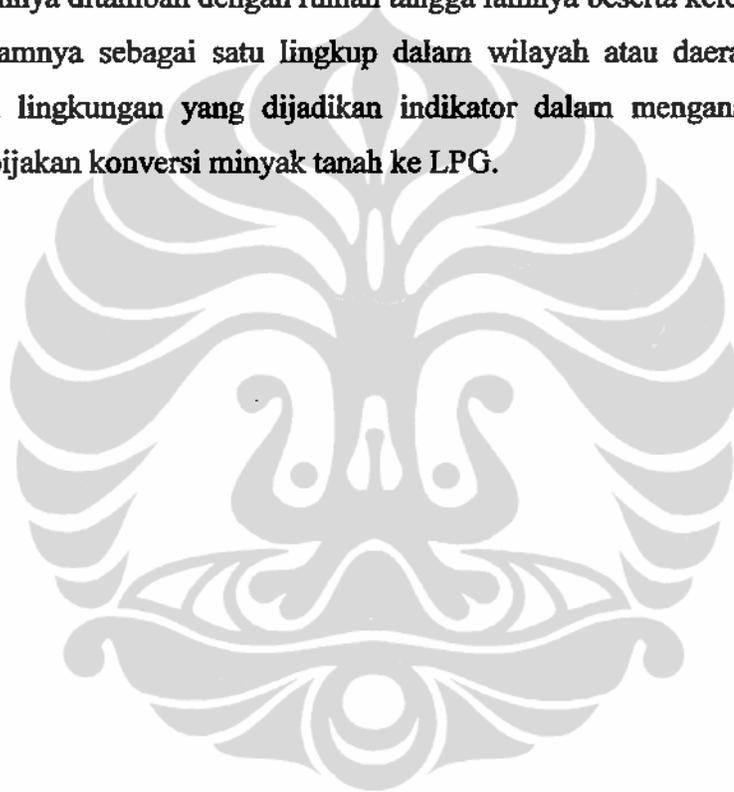
2.3.4. Konsep Lingkungan.

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup maupun lingkungan hidup manusia, seringkali digunakan secara bergantian dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai; Pertama, Daerah di mana sesuatu makhluk hidup berada; Kedua, Keadaan / kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup; Ketiga Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, terutama bersangkutan dengan; Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup; serta Gabungan dari kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas makhluk hidup.

Adapun menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pengertian lingkungan di atas dalam konteks lingkungan keluarga dapat disebutkan definisinya, yakni suatu kesatuan ruang dalam keluarga / rumah tangga yang terdiri atas benda, daya, keadaan dan penghuninya, termasuk didalamnya perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan keluarga serta keluarga lainnya. Dengan demikian elemen dalam lingkungan keluarga yang terdiri atas rumah tangga suatu keluarga beserta kelengkapan yang ada didalamnya ditambah dengan rumah tangga lainnya beserta kelengkapan yang ada di dalamnya sebagai satu lingkup dalam wilayah atau daerah yang sama merupakan lingkungan yang dijadikan indikator dalam menganalisis dampak adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan deskriptif dan komparatif. Penelitian dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar konversi minyak tanah ke LPG untuk mendapatkan jawaban dari masyarakat sebagai objek penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan demikian terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada sekarang, yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada dan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai variabel-variabel yang diteliti.¹ Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sesuatu hal seperti adanya, sehingga dapat memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan sesuai apa adanya.²

Pendekatan deskriptif digunakan khususnya dalam mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan penelitian nomor satu, dua dan tiga, yakni mendeskripsikan dan menjelaskan tentang; Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG; Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah sebelum pelaksanaan konversi; serta Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG setelah dilaksanakan konversi.

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam hal ini variabel masih sama dengan variabel mandiri, namun sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Pendekatan komparatif dipergunakan dalam menjelaskan permasalahan ke empat dari penelitian, yakni membandingkan ketahanan keluarga pada pemakaian minyak

¹ Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, Cet pertama, 1990, hal 26.

² Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta STIA LAN Press, 2002, hal 15.

tanah (sebelum terjadi konversi) dengan ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi). Hasil perbandingan tersebut sekaligus dapat dijelaskan dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dimaksudkan untuk pengolahan data berupa angka dalam memperoleh gambaran yang mendalam dari proses dan dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga di lokasi penelitian.

Hasil dari pengumpulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan *indepth interviews* yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap masyarakat sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. **Tempat Penelitian.** Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Timur. Tempat tersebut dipilih secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa Jakarta Timur yang merupakan bagian wilayah DKI merupakan salah satu target utama kebijakan ini, oleh karena masyarakat DKI paling banyak mengkonsumsi penggunaan minyak tanah.

b. **Waktu Penelitian.** Penelitian dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Desember 2008 sampai dengan Pebruari 2009.

3.3. Unit Analisis.

Penelitian ini menggunakan unit analisis masyarakat di wilayah Jakarta Timur, yang sebelumnya memakai minyak tanah untuk keperluan konsumsi keluarga, kemudian beralih dengan LPG setelah dilaksanakan kebijakan Konversi minyak tanah ke LPG.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga / penduduk Jakarta Timur yang mendapatkan (terlibat langsung) program konversi minyak tanah ke LPG yang berjumlah 442.384 kepala keluarga.

Tabel 3.4.

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur

(Sumber BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, 2008)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penyebaran
Pasar Rebo	162.747	7,50
Ciracas	202.815	9,35
Cipayung	125.716	5,80
Makasar	180.581	8,33
Kramat Jati	206.327	9,51
Jatinegara	263.949	12,17
Duren Sawit	320.925	14,80
Cakung	232.14	10,70
Pulo Gadung	280.147	12,92
Matraman	193.254	8,91
Jumlah	2.168.601	100,00

Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel harus representatif (mewakili) dari populasi yang ada. Proses pengambilan sampel dilakukan secara probability sampling, yakni pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama terhadap anggota populasi.³ Adapun tekniknya menggunakan cluster sampling (area sampling), yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

³ Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi", Alfabeta Bandung, 2004, hal 92.

Tahap pertama menentukan daerah sampel oleh karena daerah populasi terlalu luas. Dalam hal ini Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 Kecamatan, maka akan diambil sampel sebanyak 7 kecamatan dengan dasar jumlah dan kepadatan / penyebaran penduduk yang tinggi. Tabel 3.4. menunjukkan jumlah dan penyebaran penduduk di 10 kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dari tabel 3.4. dapat ditentukan bahwa Kecamatan Ciracas, Makasar, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, dan Pulo Gadung adalah tujuh kecamatan diantara 10 kecamatan yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tujuh kecamatan tersebut diambil sebagai sampel wilayah penelitian. Sementara itu kecamatan Matraman, Cipayung dan Pasar Rebo tidak dipilih untuk menjadi sampel penelitian.

Tahap kedua ditentukan orang-orang pada daerah terpilih untuk dijadikan sampel. Di dalam menentukan orang-orang ini digunakan teknik stratified random sampling dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik dari sampel, sehingga ditemukan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun karakteristik dari sampel meliputi jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti berpedoman pada rumus Slovin, yakni :⁴

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

n = ukuran sample
 N = ukuran populasi
 e = nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan)

Apabila dihitung dari jumlah N (populasi) sebesar 442.384, dengan menggunakan batas ketelitian 7 %, maka akan diperoleh angka 203,98 dengan pembulatan diperoleh nilai angka 200. Dengan demikian jumlah sampel yang

⁴ Consuelo G. Sevilla (et, all), Pengantar Metode Penelitian, Penerjemah Alimuddin Tuwu, Jakarta, UI Press, 1993, hal 160.

akan digunakan dalam penelitian ini sesuai metode Slovin berjumlah 200 kepala keluarga (penerima kebijakan konversi).

3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

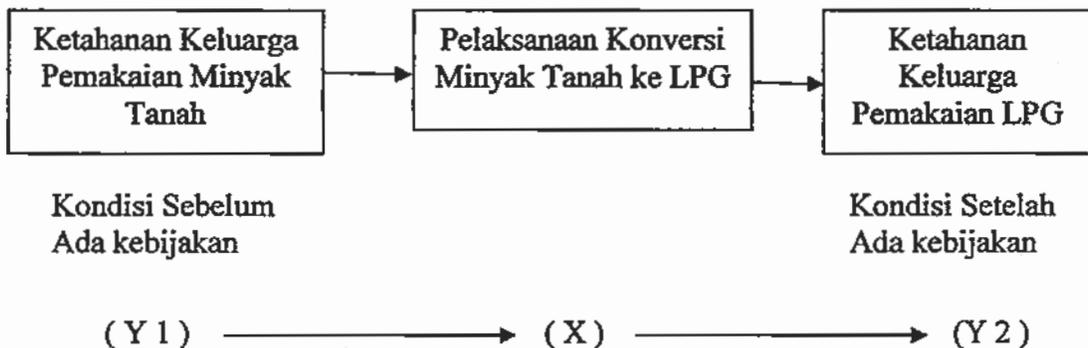
Dua hal utama yang sangat mempengaruhi kualitas data penelitian, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap hasil penelitian, yakni kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.

3.5.1. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kuantitatif. Dengan demikian fungsi instrumen sangat menentukan dalam pengumpulan data. Hal ini berbeda dengan penelitian yang bersifat kualitatif yang lebih banyak menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Selain itu instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur fenomena yang dijadikan objek penelitian, yang disebut dengan variabel penelitian. Oleh karena itu jumlah instrumen tergantung dari jumlah variabel dalam penelitian.

3.5.1.1. Model Analisis

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua kondisi, yakni Y1 kondisi *sebelum ada kebijakan, Pelaksanaan Konversi (X)*, serta Y2 kondisi *sesudah ada kebijakan..* Hubungan diantara ketiga variabel dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual di bawah, yang selanjutnya akan dijadikan model dalam penelitian ini.



Model dapat dijelaskan sebagai berikut : Sebelum dilakukan kebijakan Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG, telah ada ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (Y 1). Setelah dilaksanakan konversi minyak tanah ke LPG muncul Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG (Y 2).

Dari kerangka konseptual selanjutnya penelitian ini akan memfokuskan pada : Diskripsi tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG (X); Diskripsi Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) (Y 1); Diskripsi ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah pelaksanaan konversi) (Y 2); dan Perbandingan ketahanan keluarga antara pemakaian minyak tanah dengan pemakaian LPG. (Y1 : Y 2).

Dengan adanya 3 variabel penelitian, maka dibutuhkan 3 instrumen untuk mengukur masing-masing variabel tersebut. Untuk memudahkan penyusunan instrumen maka dibuat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Dalam pembuatan kisi-kisi instrumen ketiga variabel dijabarkan dalam beberapa indikator penelitian. Indikator-indikator variabel sering disebut dengan "construct" (Konstruk) dari instrumen penelitian, yang dalam penyusunannya didasarkan pada teori, konsep maupun hasil-hasil penelitian.

Indikator tersebut dijabarkan dalam item-item instrumen yang akan menjadi butir-butir pertanyaan. Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, terlebih dahulu instrumen penelitian dilakukan uji coba terhadap sampel penelitian (uji coba dilakukan kepada 30 sampel). Adapun kisi-kisi instrumen penelitian setelah dilakukan uji coba dapat dilihat dalam tabel berikut (Kuesioner dapat dilihat dalam lampiran) :

Tabel 3.5.1.1.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Jumlah Butir	No. Item Instrumen
Pelaksanaan Konversi	1. Sosialisasi Program	1	1
	2. Pembagian Perlengkapan LPG	2	2,4
	3. Objek / Sasaran Program	1	3
	4. Pelatihan penggunaan Peralatan LPG	1	5
Ketahanan Keluarga Pada Pemakaian Minyak Tanah	1. Ekonomi	6	1, 2, 3, 4, 5, 6
	2. Sosial	3	7, 8, 9
	3. Keamanan	3	10,11,12
	4. Lingkungan	4	13,14,15,16.
Ketahanan Keluarga Pada Pemakaian LPG	1. Ekonomi	6	1, 2, 3, 4, 5, 6
	2. Sosial	3	7, 8, 9
	3. Keamanan	3	10,11,12
	4. Lingkungan	4	13,14,15,16.
Jumlah		37	37

3.5.1.2. Konstruk Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG**(X)****a. Definisi Konseptual**

Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG adalah satu kebijakan untuk merubah penggunaan minyak tanah ke LPG dalam keperluan memasak keluarga sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg.

b. Definisi Operasional

Adalah Kebijakan pemerintah untuk merubah penggunaan minyak tanah ke LPG dalam keperluan memasak keluarga, yang terdiri atas : Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat mengerti serta memahami arti serta tujuan kebijakan; Melaksanakan pembagian secara gratis paket tabung LPG beserta perlengkapannya; Pembagian ditujukan bagoi masyarakat yang terdiri atas rumah tangga dan usaha mikro yang masing-masing memiliki legalitas penduduk serta sebelumnya menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak; Melakukan pelatihan / pengenalan tata cara pemakaian perlengkapan tabung LPG sebelum dilaksanakan pembagian perlengkapan LPG.

Dari definisi tersebut dapat dibuat kisi-kisi instrumen penelitian pada variabel pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG (X) sebagai berikut :

Tabel 3.5.1.2.

Kisi-Kisi Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

No	Indikator (Konstruk Penelitian)	No. Item Instrumen (Sebelum Uji Coba)	Jumlah
1	Sosialisasi Program	1	1
2	Pembagian Perlengkapan LPG	2, 4	2
3	Objek / Sasaran Program	3, 5	2
4	Pelatihan penggunaan peralatan LPG	6	1
	Jumlah	6	6

3.5.1.3. **Konstruk Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah (Y1)**

a. Definisi Konseptual

Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah adalah Suatu kondisi dinamik keluarga dengan menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak, yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan mental spiritual guna hidup mandiri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

b. Definisi Operasional

Adalah Suatu kondisi dinamik keluarga pada pemakaian minyak tanah, terdiri atas Kondisi Sejahtera yang meliputi aspek ekonomi, terdiri dari kemudahan dalam mendapatkan, menyimpan serta mempergunakan kompor minyak tanah, dan aspek sosial keluarga terdiri atas adanya kerja sama, kesenangan dan kenyamanan dalam memasak dengan minyak tanah; serta Kondisi Keamanan yang meliputi keamanan dalam keluarga terdiri atas perasaan takut baik pada diri dan anggota keluarga dengan bahaya kebakaran dan ledakan yang ditimbulkan minyak tanah, serta keamanan lingkungan yang meliputi kebersihan baik pemasak, tempat tinggal, udara maupun suara akibat memasak dengan minyak tanah.

Kisi-kisi instrumen kondisi Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dapat disebutkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.1.3.

Kisi-Kisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah

No	Indikator (Konstruk Penelitian)	No. Item Instrumen (Sebelum Uji Coba)	Jumlah
1	Ekonomi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Sosial	8, 9, 10, 11	4
3	Keamanan	12, 13, 14, 15	4
4	Lingkungan	16, 17, 18, 19.	4
	Jumlah	29	29

3.5.1.4. **Konstruk Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG (Y2)**

a. **Definisi Konseptual**

Kondisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG adalah Suatu kondisi dinamik keluarga dengan menggunakan LPG untuk keperluan memasak, yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan mental spiritual guna hidup mandiri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

b. **Definisi Operasional**

Adalah Suatu kondisi dinamik keluarga pada pemakaian LPG, terdiri atas Kondisi Sejahtera yang meliputi aspek ekonomi, terdiri dari kemudahan dalam mendapatkan, menyimpan serta mempergunakan kompor LPG, dan aspek sosial keluarga terdiri atas adanya kerja sama, kesenangan dan kenyamanan dalam memasak dengan LPG; serta Kondisi Keamanan yang meliputi keamanan dalam keluarga terdiri atas perasaan takut baik pada diri dan anggota keluarga dengan bahaya kebakaran dan

ledakan yang ditimbulkan LPG, serta keamanan lingkungan yang meliputi kebersihan baik pemasak, tempat tinggal, udara maupun suara akibat memasak dengan LPG.

Kisi-kisi instrumen kondisi Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1.4.

Kisi-Kisi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG

No	Indikator (Konstruk Penelitian)	No. Item Instrumen (Sebelum Uji Coba)	Jumlah
1	Ekonomi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Sosial	8, 9, 10, 11	4
3	Keamanan	12, 13, 14, 15	4
4	Lingkungan	16, 17, 18, 19.	4
	Jumlah	29	29

Setelah dilakukan uji coba terhadap kisi-kisi penelitian tersebut kepada 30 responden, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Adapun hasil sebelum dan sesudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap dapat dilihat tabel 3.4.1. dibawah :

Tabel 3.4.1.
Perbandingan Kisi-Kisi Penelitian Sebelum dan Sesudah Uji Coba

Variabel dan Indikator Penelitian	No. Instrumen (Sebelum Uji Coba)	Jml	No. Instrumen (Sesudah Uji Coba)	Jml
Pelaksanaan Konversi				
1. Sosialisasi Program	1	1	1	1
2. Pembagian Perlengkapan LPG	2,4	2	2,4	2
3. Objek / Sasaran Program	3,5	2	3	1
4. Pelatihan penggunaan Peralatan LPG	6	1	5	1
Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah				
1. Ekonomi	1, 2, 3, 4, 5, 6,7	7	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
2. Sosial	8, 9,10,11	4	7, 8, 9	3
3. Keamanan	12,13,14,15	4	10,11,12	3
4. Lingkungan	16,17,18,19	4	13,14,15,16.	4
Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG				
1. Ekonomi	1, 2, 3, 4, 5, 6,7	7	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
2. Sosial	8, 9,10,11	4	7, 8, 9	3
3. Keamanan	12,13,14,15	4	10,11,12	3
4. Lingkungan	16,17,18,19	4	13,14,15,16.	4
Jumlah		44		37

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. **Kuesioner**, yakni pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam

memberikan jawaban disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih dari salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia.

b. **Observasi**, dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi serta dengan wawancara secara mendalam (Indepth interview) dengan informan (masyarakat) yang dianggap memiliki karakteristik penelitian, sehingga akan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui kuesioner.

c. **Pengumpulan data sekunder**, dilakukan dengan study kepustakaan, merupakan bahan tambahan yang dapat berasal dari buku-buku, majalah ilmiah maupun dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian serta dengan menghimpun laporan-laporan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pelaksana kebijakan.

3.6. Analisis Data

Data kuesioner yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan *rating scale*. Dengan demikian data kuesioner yang berupa angka atau kuantitatif dapat ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert untuk menjawab butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, yang terdiri atas empat pilihan jawaban, yakni sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1 (untuk pertanyaan yang bersifat positif), namun bagi pertanyaan yang bersifat negatif berlaku sebaliknya. Dalam menjawab pertanyaan responden bebas memilih jawaban yang ada sesuai dengan pendapat, perasaan dan kejadian yang dialaminya.

Pertimbangan pemilihan dengan menggunakan skala Likert adalah karena kemudahan dalam menyusun kuesioner, interval respon yang relatif lebih besar yang dapat memberikan keterangan lebih nyata atau tegas maupun nyata dari

sikap responden tentang sesuatu yang ditanyakan, serta dapat memperlihatkan alternatif responden terhadap suatu pertanyaan.

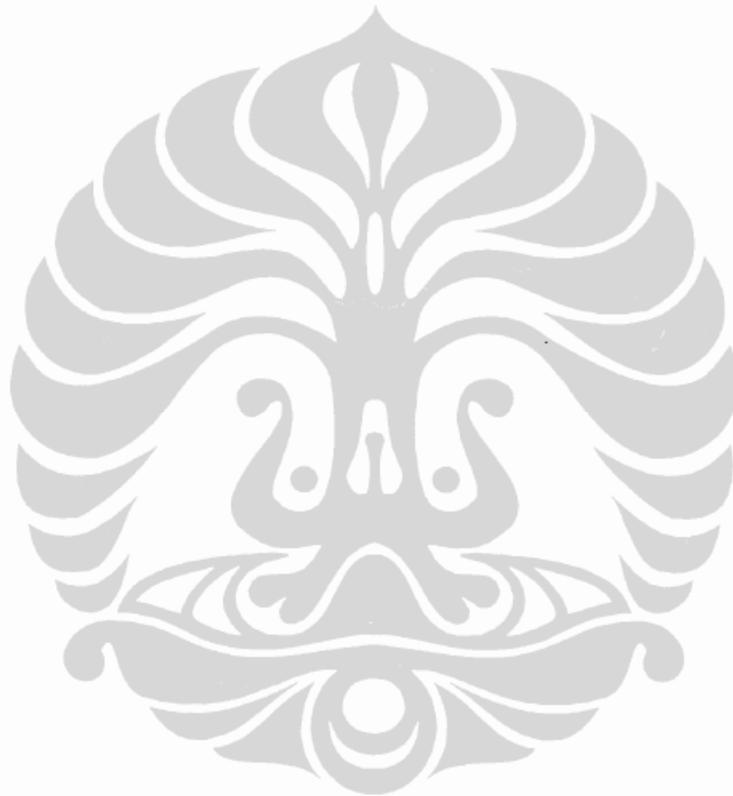
Dari keseluruhan jawaban responden selanjutnya akan dihitung jumlah maupun prosentase jawaban yang diberikan. Dari jawaban yang ada dapat diketahui tinggi rendahnya atau baik buruknya isu terhadap sesuatu yang ditanyakan sesuai dengan pendapat responden. Hasil jawaban disusun dalam sebuah data yang bersifat kualitatif yang diangkakan mulai dari angka 4 (sangat setuju) sampai dengan angka 1 (sangat tidak setuju), yang disebut dengan data interval atau rasio (pertanyaan negatif berlaku sebaliknya).

Analisis data untuk mendiskripsikan dan menjelaskan rumusan permasalahan satu, dua dan tiga, yakni permasalahan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) dan ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (sesudah pelaksanaan konversi), dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk frekwensi jawaban, selanjutnya diperbandingkan dengan skor ideal atau skor yang diharapkan, sehingga akan diperoleh diskripsi skor sesuai permasalahan. Diskripsi selanjutnya dengan melakukan uji korelasi variabel penelitian dihadapkan pada kondisi karakteristik responden yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan, terhadap jawaban yang diberikan yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi.

Adapun untuk menganalisis perbandingan/komparasi untuk menjawab permasalahan keempat, yakni perbandingan ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum konversi) dengan ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (sesudah konversi) yang akan menghasilkan kesimpulan adanya dampak positif maupun negatif terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke LPG digunakan analisis *Paired Sample T Test*, yakni teknik analisis perbandingan terhadap dua sampel yang berpasangan (satu sampel yang mendapatkan dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda), yang dalam hal ini sampel

berdistribusi normal / mendekati normal atau memiliki sampel banyak (lebih dari 30)⁵. Adapun analisis data dilakukan dengan komputer melalui program SPSS.

Dari hasil penghitungan secara kuantitatif tersebut, kemudian dikombinasi dengan hasil analisis data kualitatif yang diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun dari kepustakaan, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.



⁵ Singgih Santoso, Mengatasi Berbagai Masalah Statistik Dengan SPSS”, Jakarta, Elek Media Kompetindo, 2004, hal 257.

4. Diskripsi Tempat Penelitian

4.1 Geografi

Kota administrasi Jakarta Timur merupakan bagian wilayah propinsi DKI Jakarta. Letak geografis Jakarta Timur antara 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'3" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 188,03 Km² merupakan 28,39 % dari keseluruhan wilayah provinsi DKI Jakarta yang memiliki luas 662,33 km². Dari seluruh wilayah Jakarta Timur terdiri atas 95 % daratan dan selebihnya rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata 50 m dari permukaan air laut. Adanya kondisi tersebut Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki iklim panas dengan suhu rata-rata sepanjang tahun sekitar 27 derajat celcius. Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun sampai dengan maksimum bulan Januari.

Letak wilayah Jakarta timur yang berdekatan dengan pantai utara Jawa mengakibatkan banyak dilewati sungai-sungai sungai kanal antara lain : Cakung Drain, Kali Ciliwung, Kali Malang, Kali Sunter, dan Kali Cipinang. Sungai-sungai tersebut pada musim puncak hujan sekitar bulan Pebruari umumnya tidak mampu menampung volume air, sehingga beberapa kawasan terkena banjir. Adapun batas-batas wilayah Kota Administrasi Jakarta adalah sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah selatan dengan Kabupaten Daerah Tk.II Bogor, serta sebelah timur dengan Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi.

4.2. Pemerintahan

Secara administratif wilayah Jakarta Timur dibagi menjadi 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 673 Rukun Warga dan 7.513 Rukun Tetangga. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulo Gadung dan Kecamatan Matraman.

Dalam menjalankan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil walikota yang dibantu oleh sekitar 15 ribu pegawai dan sekitar 5 ribu anggota Hansip yang membantu tugas ketertiban masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat beberapa instansi vital, yakni Markas Besar TNI Cilangkap dan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dengan potensi yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, maka Visi yang dikembangkan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah "Menjadikan Jakarta Timur sebagai pusat produk unggulan dan tujuan wisata yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berkualitas untuk mensejajarkan Jakarta dengan kota - kota besar dunia. Sedangkan Misinya, yakni :

- a. Membangun Jakarta Timur berbasis pada masyarakat.
- b. Membangun Jakarta Timur sebagai daerah produsen serta wisata dengan pelayanan prima.
- c. Mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kelembagaan keuangan bagi usaha kecil.
- f. Meningkatkan investasi dan promosi

Tabel 4.2.menggambarkan bahwa dengan jumlah Kepala Keluarga 601.841 tersebut sekitar 44.561 keluarga merupakan keluarga pra sejahtera, sementara selitar 103.086 aalah keluarga sejahtera 1, sedangkan sisanya masuk dalam kategori keluarga sejahtera.

Adapun rincian jumlah kelurahan, RW,RT dan Kepala Keluarga dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga
 (Sumber BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, 2007)

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	K. Keluarga
Pasar Rebo	5	52	513	32.03
Ciracas	5	49	593	51.469
Cipayung	8	56	494	32.704
Makasar	5	53	569	41.635
Kramat Jati	7	65	651	54.058
Jatinegara	8	90	1.141	76.501
Duren Sawit	7	95	1.113	90.976
Cakung	7	84	935	86.924
Pulo Gadung	7	91	1.021	74.582
Matraman	6	62	800	60.968
Jumlah	65	697	7.83	601.841

4.3. Penduduk

Berdasarkan data registrasi tahun 2007 jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 2.168.601 jiwa, yang terbagi dalam 601.847 rumah tangga, terdiri dari 1.148.397 jiwa laki-laki dan 1.020.204 jiwa Perempuan, atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk seluruh DKI Jakarta. Kepadatan penduduk Jakarta Timur mencapai sekitar 11.550 jiwa per Km² dengan kecamatan Matraman menduduki kepadatan paling tinggi mencapai 39.846 per km², sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Cipayung sekitar 4.595 per km². Tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,06 persen per tahun dengan pendapatan per Kapita sebesar Rp. 5.057.040,00.

Tabel 4.3.

**Jumlah Penduduk Berdasar jenis kelamin dan Penyebarannya Menurut
kecamatan tahun 2007**

(Sumber BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, 2008)

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Penyebaran
Pasar Rebo	87.489	75.258	162.747	7,50
Ciracas	104.188	98.627	202.815	9,35
Cipayung	66.678	59.038	125.716	5,80
Makasar	94.263	86.318	180.581	8,33
Kramat Jati	107.993	98.334	206.327	9,51
Jatinegara	136.498	127.451	263.949	12,17
Duren Sawit	169.781	151.144	320.925	14,80
Cakung	130.987	101.153	232.14	10,70
Pulo Gadung	144.904	135.243	280.147	12,92
Matraman	105.616	87.638	193.254	8,91
Jumlah	1.148.397	1.020.204	2.168.601	100,00

4.4. Kondisi Sosial

4.4.1. Pendidikan

Sarana dan jumlah siswa di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut data tahun 2007 sebagai berikut : Sarana pendidikan dan jumlah siswa beserta guru Taman Kanak-Kanak 667 sekolah, 24.734 siswa dan 2.596 guru. Sementara itu Sekolah Dasar 850 sekolah, 261 ribu siswa dan 11 ribu guru; Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdiri 569 sekolah, 113 ribu siswa dan 6,9 ribu guru; Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdapat 134 sekolah 57 ribu sekolah, 57 ribu siswa serta 4,8 ribu guru. Dari jumlah tersebut dapat disebutkan bahwa rasio antara jumlah murid dan guru SD sekitar 23,27, SLTP sekitar 16,26 serta SLTA sebesar 11,79.

Adapun prosentasi jumlah penduduk beserta pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4.1.
Jumlah Prosentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
 (Sumber BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, 2007)

Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Tidak Tamat Sekolah	9,26	13,41	11,36
Sekolah Dasar (SD)	15,20	21,06	18,16
Sekolah Menengah Pertama	18,08	19,00	18,56
Sekolah Menengah Atas	40,83	32,33	36,52
Akademi dan Universitas	16,64	14,19	15,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

4.4.2 Kesehatan

Salah satu kondisi kesehatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur a dapat dilihat dari aspek jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Jumlah keseluruhan rumah sakit baik yang berskala besar maupun kecil adalah 27, rumah bersalin 31, Puskesmas 88, dan lain-lain termasuk didalamnya Posyandu, klinik KB maupun klinik laboratorium berjumlah 1225. Tabel 4.4.2. menyebutkan bahwa bahwa rasio antara jumlah fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun rumah tangga adalah jumlah puskesmas 88 dengan penduduk 2.141.228 maka didapat rasio 23.904, jadi setiap puskesmas melayani 23.904 penduduk, demikian pula bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang mencapai 585.984, maka rasio antara jumlah puskesmas dengan rumah tangga adalah 6.306.

Secara rinci data jumlah fasilitas kesehatan per kecamatan dapat disebutkan sebagai berikut :

Tabel 4.4.2.

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut kecamatan tahun 2007 (Sumber BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, 2008)

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu
Pasar Rebo	2	6	19
Ciracas	3	6	43
Cipayung	0	11	33
Makasar	3	7	20
Kramat Jati	5	9	30
Jatinegara	3	12	28
Duren Sawit	4	12	49
Cakung	1	9	49
Pulo Gadung	6	9	32
Matraman	0	7	22
Jumlah	27	88	325

Selain adanya fasilitas kesehatan tersebut Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur juga terdapat penyuluh-penyuluh kesehatan yang berjumlah sekitar 170 orang yang tersebar di setiap kecamatan dengan rata-rata per kecamatan sekitar 16 sampai dengan 25 orang. Dari data juga disebutkan bahwa selama kurun waktu tahun 2007 jumlah keluhan masyarakat terhadap penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit batuk dan pilek dan untuk penyakit diare

menempati urutan terakhir yang berarti kesadaran untuk kebersihan relatif sudah baik.

4.5. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2007 tercatat penerimaan berjumlah 581,128 milyar, dengan pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan menempati urutan pemasukan terbesar yang mencapai 235,784 milyar atau 23,20 persen dari keseluruhan penerimaan. Dari jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercatat Kecamatan duren Sawit memberikan pemasukan yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang mencapai 41.644.297 dari penerimaan, disusul kemudian kecamatan Pulo Gadung mencapai 23.694.600. Sedangkan penerimaan terkecil berasal dari kecamatan Matraman sekitar 5.878.147.

Permasalahan ekonomi makro yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah adanya laju inflasi yang hampir menjadi permasalahan untuk perekonomian propinsi DKI Jakarta, tercatat pada tahun 2007 mencapai 6,04 persen, meskipun apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia inflasi kota Jakarta relatif tidak tinggi, misalnya dibandingkan dengan kota Manado yang mencapai 10,13, Semarang 6,75, Padang 6,90, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kota Bandung yang hanya 5,25 atau Makasar sekitar 5,71.

Adapun untuk perekonomian masyarakat sebagai parameternya dapat dilihat dari konsumsi atau pengeluaran rumah tangga penduduk. Konsumsi penduduk dapat dibagi dua, yakni konsumsi makanan dan non makanan. Apabila konsumsi makanan cenderung lebih besar dari komposisi non makanan maka kesejahteraan masyarakat relatif buruk atau kurang, demikian pula sebaliknya, jika komposisi konsumsi non makanan cenderung lebih besar dari makanan maka berkecenderungan kesejahteraan penduduk meningkat. Jumlah pengeluaran perkapita penduduk sebulan Kota Administrasi Jakarta Timur menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007 sebagai berikut : 0,09 persen

penduduk berpengeluaran 100 sampai dengan 149,99 ribu; 1,12 persen berpengeluaran 150 – 199,99 ribu; 6,91 persen dengan pengeluaran 200 – 299,99 ribu; 34,40 persen berpengeluaran 300 – 499,99 ribu; serta 57,49 berpengeluaran 500 ribu ke atas.

Tabel 4.5.

**Persentase Penduduk Jakarta Timur
Menurut Pengeluaran Per Kapita / bulan
(Sumber Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007)**

No	Pengeluaran / Kapita / Bl (Ribuan)	Jumlah	Persentase
1	100,00 - 149,99	2,255	0,09
2	150,00 - 199,99	27,060	1,12
3	200,00 - 299,99	167,321	6,91
4	300,00 - 499,99	832,997	34,40
5	500,00 +	1.391.786	57,49
	Jumlah Total	2.421.419	100,00

Kondisi masyarakat menurut tempat tinggal, penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sekitar 32,62 persen menempati rumah seluas 20-49 M². Dari jenis lantainya sekitar 97,33 persen berjenis lantai bukan tanah. Sedangkan jenis dinding rumah tercatat 96,19 persen berdinding tembok dengan atap sekitar 63,41 persen beratapkan genteng. Adapun fasilitas lainnya, seperti listrik tercatat 98,86 persen penduduk memakai listrik dan sekitar 15,45 persen menggunakan pompa untuk air minum.

Dalam bidang iindustri yang tergolong atas industri besar/ sedang yang berupa perusahaan/usaha industri pengolahan, termasuk jasa industri yang mempunyai pekerja 20 orang atau lebih dan berbadan hukum.

Adapun industri Kecil dan Rumah Tangga adalah perusahaan usaha industri pengolahan, termasuk jasa industri yang mempunyai pekerja 1-19 orang,

baik berbadan hukum atau tidak. Jumlah Perusahaan Industri Besar/ Sedang di Jakarta Timur dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan. Pada tahun 1999 jumlahnya 449 perusahaan naik menjadi 475 perusahaan pada tahun 2000 (5,79%), dan turun menjadi 466 perusahaan pada tahun 2001 (-2,10%). Salah satu penyebab berkurangnya jumlah perusahaan-perusahaan Industri tersebut adalah adanya kebijaksanaan relokasi Industri dari Jakarta Timur ke Cikarang (Jawa Barat), disamping pengaruh krisis moneter yang dimulai pada bulan Juli 1997. Menurut kategori kode Industri, sebagian besar perusahaan Industri Besar/ Sedang di Jakarta Timur berkode ISIC 32 (22,75%) disusul kemudian oleh kode ISIC 38 (21,89%) dan kode ISIC 35 (18,67%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar perusahaan Industri Besar/Sedang bergerak dalam Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit, kemudian disusul Industri Barang dari Logam, Mesin dan peralatannya, serta Industri Bahan Kimia.

Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Rumah Tangga pada tahun 1999 sekitar 2.170 usaha, tahun 2000 naik menjadi 2.641 usaha (0,61%) dan pada tahun 2001 me-ningkat lagi menjadi 2.657 usaha (21,70 %).

Secara umum, lokasi Industri Kecil ini terkonsentrasi di PIK (Perkampungan Industri Kecil) Penggilingan, serta Pondok Bambu (mebel), Rawa Bening Jatinegara (batu aji/ perhiasan), Lubang Buaya (alat kebersihan), Pisangan Timur Matraman (kompor) dan Bidara Cina Jatinegara (kaleng). Menurut jumlah tenaga kerja, perusahaan Industri Besar/Sedang yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri kode ISIC 38 sekitar 29 ribu lebih, disusul kemudian oleh industri kode ISIC 35 sekitar 25 ribu lebih dan industri kode ISIC 32 sekitar 18 ribu pekerja.

5. Analisis Hasil Penelitian

5.1 Diskripsi Karakteristik Responden

Responden sebagai sampel penelitian berjumlah 200 yang dipilih secara probability sampling, dengan menggunakan teknik cluster sampling (area sampling). Dari 200 kuesioner yang diberikan kepada responden, ternyata terdapat 9 kuesioner yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengolahan. Hal ini karena 4 kuesioner tidak kembali (hilang) dan 5 terjadi kerusakan (pengisian dan jumlah halaman tidak lengkap). Adapun diskripsi karakteristik dari 191 responden yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan dapat terlihat dalam tabel di bawah :

Tabel 5.1.a.

Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekwensi	Prosentase
Laki-Laki	90	47,1
Perempuan	101	52,9
Jumlah	191	100

Tabel 5.1.b.

Karakteristik Pendidikan

Pendidikan	Frekwensi	Prosentase
SD	12	6,28
SMP	24	12,57
SMA	103	53,93
SARJANA	52	27,22
Jumlah	191	100

Tabel 5.1.c.
Karakteristik Pendapatan (Rupiah Per Bulan)

Pendapatan	Frekwensi	Prosentase
100.000 - 500.000	9	4,71
501.000 -1 Juta	63	32,99
1.001.000 -1.500.000	62	32,46
Lebih dari 1.501.000	57	29,84
Jumlah	191	100

Tabel 5.1.d.
Karakteristik Pekerjaan

Pekerjaan	Frekwensi	Prosentase
TNI/Polri	15	7,85
PNS/BUMN	28	14,67
Swasta	81	42,41
Pedagang	41	21,46
Lain-lain	26	13,61
Jumlah	191	100,00

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 90 responden atau 47,1 persen keluarga diisi oleh laki-laki, sedangkan pengisi wanita berjumlah 101 responden atau 52,9 persen. Jumlah tersebut wajar karena dalam urusan rumah tangga seperti penggunaan alat memasak sebagai ibu rumah tangga lebih mengetahui dibandingkan sebagai bapak atau suami. Namun demikian tidak sedikit juga kaum suami yang mewakili keluarga untuk pengisian kuesioner.

Kategori responden untuk pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan kualifikasi pendidikan SMA paling banyak yakni 103 responden atau

53,93 persen dari keseluruhan responden, hal ini sesuai dengan komposisi jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana penduduk dengan tamatan SMA paling banyak. Disusul kemudian responden dengan lulusan Sarjana yang berjumlah 52 responden dengan komposisi S-2 berjumlah 2 responden, S-1 sebanyak 29 responden dan D-3 berjumlah 21 responden. Adapun untuk responden berpendidikan SMP dan SD masing-masing berjumlah 24 dan 12 responden.

Pendapatan responden paling banyak berkisar antara 500 ribu sampai dengan 1 juta berjumlah 63 responden atau sekitar 32,99 persen, disusul kemudian dengan responden yang berpendapatan antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta yang berjumlah 62 atau sekitar 32,46 persen, di atas 1,5 juta berjumlah 57 atau 29,84 persen dan berjumlah 9 responden atau 4,71 yang berpendapatan di bawah 500 ribu. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur dimana lebih dari 57 persen penduduknya berpengeluaran lebih dari 500 ribu per bulan.

Diskripsi responden dengan karakteristik jenis pekerjaan terdiri atas pekerjaan TNI/Polri, PNS/BUMN, Swasta, Pedagang dan lain-lain (di luar yang disebutkan di atas). Frekwensi dari masing-masing karakteristik pekerjaan adalah responden dengan pekerjaan swasta berjumlah 81 responden atau 42,41 persen, pedagang atau kelompok usaha mikro yang kebanyakan berdagang jenis makanan siap makan berjumlah 41 atau 21,46 persen, PNS 28 atau 14,66 persen, TNI/Polri berjumlah 15 atau 7,85 % dan kelompok pekerjaan lain-lain berjumlah 26 atau 13,61 persen.

Diskripsi karakteristik responden tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menganalisis ada dan tidaknya hubungan antara karakteristik responden dengan variabel-variabel dalam penelitian.

5.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada instrumen yang dipergunakan dalam penelitian. Instrumen dikatakan valid jika digunakan untuk

mendapatkan atau mengukur data valid, artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun instrumen yang reliabel artinya instrumen apabila digunakan untuk mengukur beberapa kali terhadap objek yang sama akan menghasilkan data yang sama atau tidak mengubah terhadap hasil yang diperoleh dari pengukuran. Dengan demikian untuk dapat menghasilkan penelitian yang valid dan reliabel dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel pula.

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan mengujicobakan instrumen pada sampel, dalam hal ini berjumlah 30 sampel yang diambilkan dari populasi yang ada. Setelah diperoleh data, selanjutnya tabulasi data dianalisis. Proses analisis dipergunakan program SPSS.

5.2.1 Pengujian konstruk Pelaksanaan Konversi

Tabel 5.2.1.a.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 5.2.1.b

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	5

Tabel 5.2.1.c

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	12.7667	4.530	.596	.803
Q2	13.1667	3.868	.712	.769
Q3	13.2333	4.392	.630	.793
Q4	12.8000	4.717	.599	.802
Q5	12.7000	4.838	.609	.801

Tabel 5.2.1.a. (*Case Processing Summary*) menunjukkan bahwa 30 kasus (responden) telah diproses keseluruhan atau 100 % sudah valid. Tabel 5.2.1.b. disebutkan bahwa secara keseluruhan butir pertanyaan dengan melihat Cronbach's Alpha sebesar 0,828 berarti reliabilitas instrumen pelaksanaan konversi sebesar 0,828. Oleh karena $0,828 > 0,60$ (syarat reliabel) maka instrumen dinyatakan reliabel.

Pada tabel 5.2.1.c. (*Item-Total Statistics*) dapat dibaca bahwa korelasi antara skor butir 1 dengan skor total sebesar 0,596, antara butir 2 dengan skor total = 0,712, butir 3 sebesar 0,630, butir 4 sebesar 0,599 dan butir 5 sebesar 0,609. Sesuai dengan ketentuan bahwa pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan jumlah sampel uji coba = 30 ($dk = 30 - 1 = 29$, sebesar 0,361), apabila skor koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,361 (harga r tabel untuk taraf signifikansi 5 %), maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Dari pengujian ternyata kelima butir pertanyaan bernilai di atas 0,361 yang berarti kelimanya dinyatakan valid.

5.2.2. Pengujian konstruk Pemakaian Minyak Tanah

Tabel 5.2.2.a

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 5.2.2.b.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	16

Tabel 5.2.2.c.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	38.2333	43.978	.729	.894
Q2	38.1333	45.430	.550	.900
Q3	38.0000	46.552	.469	.903
Q4	38.2000	45.476	.603	.898
Q5	37.8333	43.799	.668	.896
Q6	37.7000	44.493	.704	.895
Q7	38.2333	43.633	.714	.894
Q8	37.9667	43.137	.707	.894
Q9	37.9667	43.757	.739	.893
Q10	37.8000	47.545	.396	.905
Q11	38.1667	47.937	.460	.903
Q12	38.0333	47.275	.478	.902
Q13	38.1333	45.361	.605	.898
Q14	38.0667	45.306	.521	.901
Q15	37.9333	46.547	.438	.904
Q16	38.1000	46.576	.464	.903

Tabel 5.2.2.a. menunjukkan bahwa 30 kasus (responden) telah diproses keseluruhan atau 100 % sudah valid. Dari tabel 5.2.2.b. disebutkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,905 dari 16 butir pertanyaan. Oleh karena $0,905 > 0,60$ (syarat reliable), maka instrument pemakaian minyak tanah dinyatakan reliable. Tabel 5.2.2.c. memperlihatkan korelasi antara skor tiap-tiap butir pertanyaan dibandingkan dengan skor total (Corrected Item-Total Correlation), sebagai contoh korelasi skor butir 1 dengan skor total sebesar 0,729, antara butir 2 dengan skor total = 0,550, dan seterusnya. Sesuai dengan ketentuan bahwa apabila skor koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,361 (harga r tabel), maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Dari pengujian ternyata ke-16 butir pertanyaan bernilai di atas 0,361 yang berarti kesemuanya dinyatakan valid.

5.2.3. Pengujian konstruk Pemakaian LPG

Tabel 5.2.3.a.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 5.2.3.b.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	16

Tabel 5.2.3.c.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	39.5000	42.121	.696	.891
Q2	40.0000	40.552	.602	.894
Q3	39.3333	43.816	.444	.899
Q4	39.8000	40.303	.727	.889
Q5	40.0333	42.378	.537	.896
Q6	39.4000	41.766	.608	.893
Q7	39.2333	43.564	.505	.897
Q8	39.9667	40.516	.681	.890
Q9	40.2333	42.530	.583	.894
Q10	39.8667	43.085	.504	.897
Q11	38.9667	44.585	.379	.900
Q12	39.2000	44.234	.388	.900
Q13	39.4667	41.085	.711	.890
Q14	39.8333	39.937	.603	.894
Q15	39.4333	43.082	.437	.899
Q16	39.7333	39.995	.711	.889

Hasil analisis melalui SPSS dapat digambarkan melalui tiga tabel, yakni tabel 5.2.3.a. memperlihatkan bahwa 30 kasus (responden) telah diproses keseluruhan atau 100 % sudah valid. Tabel 5.2.3.b. disebutkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,901 dari keseluruhan butir pertanyaan (16 butir). Oleh karena $0,901 > 0,60$ (syarat reliable), maka instrument pemakaian LPG dinyatakan reliable.

Pada tabel 5.2.3.c. menunjukkan korelasi antara skor tiap-tiap butir pertanyaan dibandingkan dengan skor total (Corrected Item-Total Correlation), yakni korelasi skor butir 1 dengan skor total sebesar 0,696, antara butir 2 dengan skor total = 0,602, butir ke 3 dengan skor total sebesar 0,444, dan seterusnya. Sesuai dengan ketentuan bahwa apabila skor koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,361 (harga r tabel), maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Dari

pengujian ternyata ke-16 butir pertanyaan pemakaian LPG bernilai di atas 0,361 yang berarti kesemuanya dinyatakan valid.

5.3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal ataukah tidak. Oleh karena distribusi data akan berpengaruh terhadap jenis analisis statistik yang akan digunakan. Dalam hal ini akan digunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 5.3.
Hasil Uji Normalitas Data
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pelaksanaan Konversi	Pemakaian Minyak Tanah	Pemakaian LPG
N		191	191	191
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.2932	39.2775	43.2984
	Std. Deviation	2.38590	6.08289	5.24956
Most Extreme Differences	Absolute	.121	.071	.096
	Positive	.120	.050	.096
	Negative	-.121	-.071	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		1.676	.979	1.328
Asymp. Sig. (2-tailed)		.007	.293	.059

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 5.3 menunjukkan hasil uji normalitas data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pada kolom dua terlihat bahwa Asymp.Sig (2-tailed) atau asymptotic significance dua sisi dari variabel pelaksanaan konversi adalah 0,007, atau dapat dikatakan probabilitas kurang dari 0,05 ($0,007 < 0,05$), maka distribusi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG adalah tidak normal.

Kolom tiga terlihat bahwa Asymp.Sig (2-tailed) atau asymptotic significance dua sisi dari variabel ketahanan keluarga pada pemakaian minyak

tanah adalah 0,293, atau dapat dikatakan probabilitas di atas 0,05 ($0,293 > 0,05$), maka distribusi ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah adalah normal.

Pada Kolom tiga terlihat bahwa Asymp.Sig (2-tailed) atau asymptotic significance dua sisi dari variabel ketahanan keluarga pada pemakaian LPG adalah 0,059, atau dapat dikatakan probabilitas di atas 0,05 ($0,059 > 0,05$), maka distribusi ketahanan keluarga pada pemakaian LPG adalah normal.

Dar hasil uji normalitas data, selanjutnya dapat ditentukan statistik yang digunakan untuk pengujian data lebih lanjut, apabila data berdistribusi normal, maka akan digunakan statistik parametrik, sedangkan bila berdistribusi tidak normal menggunakan statistik non parametrik.

5.4. Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

5.4.1. Deskripsi Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dilakukan dengan memberikan lima butir pertanyaan yang mengacu pada program kebijakan konversi minyak tanah. Kelima butir pertanyaan tersebut, yakni :

Pertama tentang sosialisasi program konversi minyak tanah, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan masyarakat dengan program tersebut, sehingga dapat diketahui sekaligus dapat diestimasi pendapat masyarakat ketika mendengar istilah konversi minyak tanah, lebih jauh lagi dengan pengetahuan ini dapat diketahui tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang langsung bertautan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Kedua, pertanyaan tentang hasil pembagian perlengkapan yang berupa kompor gas 1 pit, selang, 1 buah tabung LPG ukuran 3 kg yang sudah ada isinya, apakah kesemuanya dapat dipakai dengan baik, artinya tidak terjadi gangguan dan layak. Hal ini mengacu pada rencana operasional pelaksanaan program kebijakan untuk membagikan paket kompor gas beserta perlengkapannya dengan kondisi masih baru (baik).

Pertanyaan ketiga, tentang proses pembagian yang mengacu pada objek pembagian yakni, apakah seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kriteria telah mendapatkan paket pembagian kompor gas beserta perlengkapannya atautkah tidak. Sedangkan pertanyaan keempat, menanyakan tentang pelaksanaan pembagian paket kompor gas dibagi secara Cuma-Cuma / gratis atautkah harus mengeluarkan uang untuk membayar / membeli. Sementara itu untuk pertanyaan kelima, menanyakan tentang pelatihan penggunaan paket kompor gas beserta perlengkapannya, apakah dilaksanakan kepada masyarakat atautkah tidak.

Untuk menghitung skor pendapat masyarakat dari kelima butir pertanyaan tersebut dilakukan dengan membandingkan skor hasil kelima butir pertanyaan dengan skor ideal / kriterium. Skor kriterium ini merupakan asumsi bahwa setiap responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi.

Skor ideal / kriterium untuk jawaban pertanyaan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG = $4 \times 5 \times 191 = 3.820$ (4 = skor tertinggi, 5 jumlah butir instrumen pertanyaan pelaksanaan konversi, 191 jumlah responden). Adapun data yang terkumpul ditemukan bahwa skor variabel pelaksanaan konversi minyak tanah (lihat Tabel) = 2.921, dengan rincian masing-masing jumlah jawaban dari pertanyaan satu sampai dengan lima = 599, 554, 516, 616, 636. Dengan demikian nilai pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG = $2.921 : 3.820 = 0,76 = 76 \%$ dari yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah 100 %.

Apabila skor 60 dipakai sebagai skor dengan nilai cukup, maka skor 76 dapat dinilai baik, yang berarti bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat terlaksana dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, sehingga terjadi demo di beberapa tempat karena ketiadaan minyak tanah atau kesulitan tabung LPG, bukan disebabkan oleh implementasi dari pelaksanaan kebijakan terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan, namun berasal dari faktor lain sebagai dampak di luar dampak terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dengan melakukan penilaian lebih lanjut terhadap jawaban yang ada dapat dijelaskan bahwa nilai butir pertanyaan kelima, yakni tentang pelaksanaan pelatihan penggunaan kompor LPG beserta perlengkapannya mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 636 atau sekitar 84,25 % dari nilai keseluruhan skor 764 ($4 \times 1 \times 191$). Hal ini menunjukkan bahwa rencana kebijakan untuk memberikan pengenalan dan pelatihan penggunaan peralatan LPG yang ditujukan kepada masyarakat betul-betul dilaksanakan dan memang dapat dirasakan oleh masyarakat melebihi pelaksanaan rencana program lainnya.

Hasil tersebut diperkuat dengan wawancara peneliti terhadap beberapa responden terutama para Ketua RT / RW yang terlibat langsung dalam program ini, bahwa pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan mengumpulkan warga masyarakat dikantor RW/RT, selanjutnya oleh petugas khusus diberikan pelatihan penggunaan kompor gas beserta perlengkapannya. Selain itu dilakukan pula dengan mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat untuk dilatih, selanjutnya warga masyarakat ini bertugas khusus memberitahukan kepada masyarakat lainnya sewaktu pembagian kompor gas dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat langsung dapat mempraktekkannya.

Skor terendah dari pelaksanaan konversi minyak tanah LPG terjadi pada pelaksanaan pembagian kompor gas beserta perlengkapannya kepada masyarakat, yakni berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pembagian, yang ternyata menurut jawaban pelaksanaan ini mendapatkan skor nilai terendah dibandingkan dengan pelaksanaan program lainnya dengan nilai 516 atau sekitar 67,5 % dari keseluruhan nilai skor ideal = 764. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembagian masih dirasa kurang dibandingkan dengan pelaksanaan rencana program lainnya. Data ini diperkuat dengan wawancara di lapangan dari beberapa responden yang ditemui peneliti yang menyebutkan bahwa beberapa warga masyarakat memang belum mendapatkan pembagian atau bahkan tidak tercatat untuk memiliki hak mendapatkan pembagian paket kompor gas. Hal ini menurut keterangan beberapa Ketua RT / RW diterangkan bahwa pemberian

paket kompor gas didasarkan atas Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di kantor Kelurahan, sehingga bagi warga yang tidak / belum memiliki KK secara pasti tidak akan mendapatkan pembagian, sementara itu beberapa warga ada yang belum memilikinya. Dilain sisi dengan berdasarkan KK maka program ini tidak membedakan apakah warga masyarakat sebelumnya telah menggunakan kompor gas atau tidak, sehingga secara keseluruhan warga masyarakat yang memiliki KK mendapatkan paket kompor gas tersebut. Memang dari penelitian jika terdapat wilayah yang sudah memiliki fasilitas saluran gas tidak mendapatkannya seperti wilayah Perumnas Klender dan penghuni rumah susun yang berfasilitas gas alam.

Pertanyaan nomor empat tentang pembagian secara gratis paket kompor gas mendapatkan nilai skor 616 atau 80,6 % dari skor keseluruhan 764. skor ini nomor dua lebih tinggi setelah skor pertanyaan nomor lima, yang menunjukkan bahwa pemberian paket kompor gas beserta perlengkapannya secara gratis / cuma-cuma telah dilaksanakan dengan hasil yang baik, sehingga pungutan liar yang kerap terjadi dibalik pembagian secara gratis perlengkapan tabung LPG tidak terjadi.

Skor untuk pertanyaan tentang kondisi paket kompor gas mendapatkan skor 554 atau sekitar 72,5 % dari keseluruhan skor yang diharapkan 764 atau 100 %, yang berarti bahwa kondisi paket kompor gas yang dibagikan menurut pendapat masyarakat dalam kondisi yang baik. Adapun adanya berita tentang terjadinya kebocoran bahkan ledakan kompor LPG secara umum bukan disebabkan kondisi pembagian perlengkapan LPG yang buruk.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dengan mendalami seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap istilah konversi minyak tanah ke LPG dari jawaban pertanyaan mendapatkan skor 599 atau sekitar 78,4 % dari nilai skor keseluruhan 764. Dengan demikian istilah konversi minyak tanah ke LPG bagi masyarakat dinilai sebagai istilah yang tidak asing dalam hal pengertian dan pelaksanaannya, sehingga sosialisasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian pendalaman melalui wawancara terhadap responden

bahwa sebagian besar responden langsung dapat memahami istilah konversi minyak tanah ke LPG.

Adapun data secara terperinci jawaban yang berhubungan dengan karakteristik responden yang terdiri atas empat karakteristik, yakni jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.1.

Data Karakteristik Responden terhadap Pelaksanaan Konversi

		JML	1	2	3	4	5	TOT
Jenis Kelamin	Laki-Laki	90	272	253	243	281	297	1346
	Perempuan	101	327	301	273	335	339	1575
Pendidikan	SD	12	37	35	32	34	40	178
	SMP	24	73	70	66	77	79	365
	SMA	103	320	295	284	339	340	1578
	SARJANA	52	169	154	134	166	177	800
Pendapatan	100.000 - 500.000	9	30	28	27	30	31	146
	501. 000 -1 Juta	63	186	182	175	198	205	946
	1.001.000 -1.500.000	62	195	176	159	200	201	931
	Lebih dari 1.501.000	57	188	168	155	188	199	898
Pekerjaan	TNI / Polri	15	51	44	42	50	52	239
	PNS / BUMN	28	89	78	72	82	93	414
	Swasta	81	248	233	216	266	267	1230
	Pedagang	41	128	121	115	131	136	631
	Lain-lain	26	83	78	71	87	88	407

5.4.2. Korelasi Karakteristik Responden dengan Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

Korelasi karakteristik responden dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG akan dianalisis dengan menggunakan statistik non parametrik (distribusi tidak normal) memakai uji korelasi Kendall Tau uji korelasi dengan data jumlah data relatif banyak), dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4.2.

Tabel Korelasi Karakteristik Responden Terhadap Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

Correlations

	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pendapatan	Pekerjaan	Konversi
Kendall's tau_Jenis Kelamin	1.000	-.164*	.008	-.034	-.101
Correlation Coefficient					
Sig. (2-tailed)		.016	.904	.620	.108
N	191	191	191	191	191
Pendidikan	-.164*	1.000	.586**	-.299*	-.010
Correlation Coefficient					
Sig. (2-tailed)	.016		.000	.000	.868
N	191	191	191	191	191
Pendapatan	.008	.586**	1.000	-.432**	.032
Correlation Coefficient					
Sig. (2-tailed)	.904	.000		.000	.587
N	191	191	191	191	191
Pekerjaan	-.034	-.299*	-.432**	1.000	.059
Correlation Coefficient					
Sig. (2-tailed)	.620	.000	.000		.317
N	191	191	191	191	191
Konversi	-.101	-.010	.032	.059	1.000
Correlation Coefficient					
Sig. (2-tailed)	.108	.868	.587	.317	
N	191	191	191	191	191

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas dapat dijelaskan korelasi dari masing-masing karakteristik responden terhadap pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, yakni :

5.4.2.1. Karakteristik jenis kelamin.

Korelasi antara karakteristik jenis kelamin dengan pelaksanaan konversi = - 0,101. Oleh karena $- 0,101 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Tanda negatif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yang berarti bahwa semakin banyak perbedaan jenis kelamin akan semakin berkurang (negatif) berpendapat tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

Tingkat signifikan korelasi = 0,108. Oleh karena $0,108 > 0,05$ (Probabilitas 0,108 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis kelamin dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

5.4.2.2. Karakteristik Pendidikan

Korelasi antara karakteristik pendidikan dengan pelaksanaan konversi = - 0,010. Oleh karena $- 0,010 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Nilai negatif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan akan membuat semakin berkurang/negatif pendapat tentang pelaksanaan konversi.

Tingkat signifikan korelasi = 0,868. Oleh karena $0,868 > 0,05$ (Probabilitas 0,868 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik pendidikan dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

5.4.2.3. Karakteristik Pendapatan

Korelasi antara karakteristik pendapatan responden dengan pelaksanaan konversi = 0,032. Oleh karena $0,032 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Sedangkan arah hubungan adalah sama yang ditunjukkan dengan nilai positif korelasi keduanya, yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan akan membuat semakin bertambah atau berpendapat positif tentang pelaksanaan konversi.

Tingkat signifikan korelasi = 0,587. Oleh karena $0,587 > 0,05$ (

Probabilitas 0,587 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis pendapatan dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

5.4.2.4. Karakteristik Jenis Pekerjaan

Korelasi antara karakteristik jenis pekerjaan responden dengan pelaksanaan konversi = 0,059. Oleh karena $0,059 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Sedangkan arah hubungan adalah sama yang ditunjukkan dengan nilai positif korelasi keduanya, yang berarti bahwa semakin banyak jenis pekerjaan responden akan membuat semakin bertambah atau berpendapat positif tentang pelaksanaan konversi.

Tingkat signifikan korelasi = 0,317. Oleh karena $0,317 > 0,05$ (Probabilitas 0,317 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis pekerjaan dengan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

Kesimpulan dari hasil pengujian korelasi antara karakteristik responden yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga dan jenis pekerjaan terhadap pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, menunjukkan bahwa secara keseluruhan karakteristik responden berkorelasi sangat lemah dan tidak ada korelasi yang signifikan terhadap pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG. Hal ini berarti bahwa kesimpulan tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tidak tergantung atau tidak ditentukan oleh karakteristik masyarakat Jakarta Timur sebagai sasaran kebijakan. Hal ini berarti bahwa skor pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tetap bernilai sama dihadapkan dengan kondisi karakteristik masyarakat Jakarta Timur.

5.5. Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah

5.5.1. Diskripsi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah

Data hasil kuesioner persepsi masyarakat tentang pemakaian minyak tanah dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.5.1.

Skor Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah

Pertanyaan	Indikator	Skor	Skor Ideal
1	Ekonomi	418	764
2		435	764
3		471	764
4		452	764
5		508	764
6		520	764
7	Sosial	448	764
8		448	764
9		482	764
10	Keamanan	497	764
11		435	764
12		514	764
13	Lingkungan	420	764
14		464	764
15		441	764
16		549	764
Jml		7502	12224

Dari tabel dapat dilihat bahwa skor pemakaian minyak tanah = 7.502 dari 191 responden. Skor ini apabila dibandingkan dengan skor ideal / kriterium yang merupakan asumsi bahwa setiap responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi adalah :

Skor ideal/kriterium untuk jawaban pertanyaan pemakaian minyak tanah
 $= 4 \times 16 \times 191 = 12.224$ (4 = skor tertinggi, 16 jumlah butir

instrumen pertanyaan, 191 jumlah responden). Skor variabel pemakaian minyak tanah = 7.502 . Dengan demikian nilai pemakaian minyak tanah = $7.501 : 12.224 = 0,614 = 61,4 \%$ dari yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah 100 %. Apabila skor 60 bernilai cukup, sedangkan nilai 65 dinyatakan dengan lebih dari cukup, maka skor ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah bernilai cukup.

Nilai cukup dapat diterjemahkan bahwa selama ini pemakaian minyak tanah sebelum pelaksanaan konversi tidak membuat baik ketahanan keluarga, namun hanya berada pada posisi cukup saja. Dengan demikian subsidi BBM termasuk didalamnya subsidi minyak tanah yang memberatkan anggaran negara, lebih-lebih pada waktu terjadi kenaikan harga minyak dunia pada kenyataannya tidak membuat kesejahteraan keluarga yang lebih baik.

Adapun skor tertinggi dari seluruh butir pertanyaan berada pada pertanyaan nomor 16 pada indikator lingkungan dengan skor 546. Skor terendah pada nomor butir pertanyaan 1 dalam indikator ekonomi dengan skor 418. Dari diskripsi skor tertinggi dan terendah ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian minyak tanah dari segi ekonomi sangat rendah manfaatnya, meskipun dampak lingkungan relatif lebih baik dibandingkan dengan dampak indikator lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi pemakaian minyak tanah dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat berada posisi rendah, sehingga apabila merujuk teori konsumsi baik Duesenbery maupun Friedman, maka selama ini masyarakat berada pada posisi saving dalam menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak.

Adapun diskripsi dari masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1.1. Indikator Ekonomi

Dari tabel 5.5.1. dapat terlihat bahwa indikator ekonomi terdiri dari 6 butir pertanyaan dengan skor mulai dari pertanyaan pertama 418, 435, 471, 452, 508, 520, secara keseluruhan skor berjumlah = 2.804 atau 61,2 % dari skor indikator

ekonomi (764 X 6), yang berarti bahwa nilai ekonomi pemakaian minyak tanah sebesar 61,2. Apabila nilai 50 sebagai batas skor rendah dan tinggi, sedangkan skor 60 berada pada nilai cukup, maka nilai ekonomi pemakaian minyak tanah pada posisi cukup. Dengan demikian pemakaian minyak tanah sebelum konversi tidak membuat ekonomi keluarga lebih baik, namun berada pada kecukupan saja, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga yang tidak membaik.

Dari keseluruhan skor tersebut dapat dilihat frekwensi jawaban atau persetujuan dari masing-masing butir pertanyaan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.5.1.1
Frekwensi Indikator Ekonomi

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	78	6,8 %
Setuju	469	40,9 %
Tidak Setuju	486	42,4 %
Sangat Tidak Setuju	113	9,9 %
Jumlah	1146	100 %

Dari tabel dapat dilihat bahwa jawaban ketidaksetujuan lebih banyak dibandingkan dengan jawaban setuju, yang berarti kategori nilai ekonomi pemakaian minyak tanah bagi keperluan rumah tangga rendah. Adapun nilai tersebut dapat dijelaskan dengan setiap butir pertanyaan yang ada yakni :

Butir pertanyaan nomor satu tentang kemudahan untuk mendapatkan minyak tanah, pada penelitian didapatkan bahwa nilai butir ini = 418 atau 54,7 % dari skor ideal 764, merupakan nilai terendah dalam indikator ekonomi maupun variabel pemakaian minyak tanah. Hal ini menunjukkan bahwa minyak tanah selama ini tidak mudah untuk diperoleh. Beberapa responden menyebutkan bahwa minyak tanah sulit diperoleh walaupun ada selama ini harus pergi ke

pangkalan minyak tanah atau ke pasar yang berjarak relatif jauh, sedangkan apabila menunggu pengecer (biasanya ada penjual keliling) waktunya tidak menentu, kadang-kadang satu hari tidak ditemui.

Nilai ekonomi untuk kemudahan dalam pembelian minyak tanah dengan skala kecil dalam penelitian ini menunjukkan nilai 435 atau sekitar 56,9 % dari skor ideal, yang berarti pembelian minyak tanah walaupun sedikit (kurang dari 1 liter) sulit untuk dapat dilakukan. Adapun harga minyak tanah dikaitkan dengan pendapatan keluarga memiliki skor 471 atau 61,6 % dari skor ideal, nilai inipun tidak terlalu jauh dengan kemudahan dalam pembelian minyak tanah, sehingga dapat disebutkan bahwa harga minyak tanah selama ini relatif memberatkan masyarakat.

Untuk kategori kemudahan dalam membawa dan menyimpan minyak tanah bernilai 452 atau 59,1 % dari skor ideal. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa minyak tanah tidak mudah dalam pembawaan maupun penyimpanannya, sedangkan nilai ekonomi dalam kemudahan memasak dengan minyak tanah memiliki skor 508 atau 66,5 % dari skor ideal 764. Skor ini masih diatas nilai dari penyimpanan/pembawaan maupun harga dari minyak tanah, namun skor tersebut masih dikatakan cukup, sehingga kurang lebih 66,5 % masyarakat merasakan tidak kesulitan memasak dengan kompor minyak tanah. Adapun skor tertinggi dari indikator ekonomi adalah kemudahan dari kompor minyak tanah jika mengalami kerusakan. Skor kemudahan untuk memperbaiki kompor minyak tanah bernilai 520 atau 68,1 % dari skor ideal.

5.5.1.2. Indikator Sosial

Indikator nilai sosial terdiri dari tiga butir pertanyaan dengan skor masing-masing 448, 448, 482. Jumlah skor = 1378 atau 60,1 % dari skor ideal (764 X 3), sehingga bernilai cukup. Artinya selama ini pemakaian minyak tanah tidak lebih baik membawa kesejahteraan keluarga, khususnya dalam segi kehidupan sosial, yang terjadi hanya cukup membuat kehidupan sosial masyarakat/keluarga sejahtera.

Skor tersebut digambarkan dalam tabel frekwensi jawaban sebagai berikut

Tabel 5.5.1.2.

Frekwensi Indikator Sosial

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	3	0,5 %
Setuju	227	41,7 %
Tidak Setuju	258	47,3 %
Sangat Tidak Setuju	57	10,5 %
Jumlah	545	100 %

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sosial pemakaian minyak tanah rendah, hal ini terlihat tingkat persetujuan lebih kecil dari pada ketidaksetujuan dengan perbandingan 42,2 berbanding 57,8. Adapun diskripsi dari tingkat persetujuan tersebut dapat dijelaskan melalui ketiga butir pertanyaan dalam penelitian, yakni :

Pertanyaan pertama tentang nilai sosial yang berkaitan dengan adanya saling kerja sama antar warga masyarakat ketika memasak dengan minyak tanah mendapatkan skor = 448 atau 58,6 % dari skor ideal, yang berarti kategori kurang. Skor ini sama dengan nilai sosial dari pertanyaan kedua yang menjelaskan tentang perasaan nyaman maupun tidak nyaman ketika memasak dengan kompor minyak tanah, ternyata penelitian ini menunjukkan bahwa memasak dengan minyak tanah mendapatkan skor kurang (448 atau 58,6 % dari skor ideal). Hal ini menandakan bahwa memasak dengan minyak tanah berdampak kurang membuat adanya hubungan warga semakin dekat dan kurang nyaman dirasakan bagi si pemasak.

Untuk kategori kesukaan maupun kenyamanan yang dikaitkan dengan jenis masakan, pemakaian dengan kompor minyak tanah memiliki nilai 482 atau

sekitar 63,1 % dari skor ideal. Nilai ini merupakan skor tertinggi dalam indikator sosial yang dapat dikategorikan cukup. Dengan demikian secara keseluruhan nilai sosial dari pemakaian minyak tanah adalah kurang.

5.5.1.3. Indikator Keamanan

Dari tabel 5.5.1 ditunjukkan bahwa indikator keamanan terdiri dari 3 butir pertanyaan dengan skor masing-masing 497, 435, 514 secara keseluruhan jumlah skor = 1.446 atau 63,1 % dari skor indikator keamanan (764 X 3 = 2.292), yang berarti bahwa pemakaian minyak tanah untuk keperluan memasak selama ini cukup membuat aman bagi keluarga, namun belum membawa rasa aman yang lebih baik.

Dari keseluruhan skor tersebut dapat dilihat frekwensi jawaban atau persetujuan dari masing-masing butir pertanyaan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.5.1.3.

Frekwensi Indikator Keamanan

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	47	8,2 %
Setuju	235	41,0 %
Tidak Setuju	262	45,7 %
Sangat Tidak Setuju	29	5,1 %
Jumlah	573	100 %

Tabel frekwensi tingkat persetujuan menunjukkan bahwa perbandingan antara persetujuan dan ketidaksetujuan hampir seimbang. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai keamanan pemakaian minyak tanah berkategori sedang. Adapun rincian tersebut dapat digambarkan dari skor masing-masing butir pertanyaan penelitian.

Nilai keamanan pertama berkaitan dengan bahaya kebakaran yang ditimbulkan akibat menggunakan kompor minyak tanah untuk keperluan memasak yang memiliki skor = 497 atau sekitar 65 % dari skor ideal (764). Skor tersebut bernilai lebih dari cukup, sehingga pemakaian kompor minyak tanah lebih dari cukup tidak berakibat terjadinya kebakaran.

Kategori keamanan kedua berkaitan dengan adanya ancaman kompor minyak tanah akibat kerusakan sehingga dapat menimbulkan ledakan yang memiliki nilai 435 atau 56,9 % dari skor ideal, nilai ini lebih rendah jika dibandingkan bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh kompor minyak tanah. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa bahaya terjadinya ledakan akibat kerusakan kompor minyak tanah dibandingkan dengan bahaya kebakaran masih lebih tinggi kemungkinan terjadinya ledakan.

Penilaian ketiga indikator keamanan menyangkut peralatan pemasangan yang diperlukan dalam pemakaian kompor minyak tanah. Dalam kategori ini skor yang didapat = 514 atau 67,3 % dari skor ideal. Skor ini dalam indikator keamanan adalah skor tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peralatan pemasangan keperluan kompor minyak tanah dinilai lebih aman dibandingkan dengan bahaya kebakaran maupun ledakan yang ditimbulkan oleh kerusakan pada kompor minyak tanah.

5.5.1.4. Indikator Lingkungan

Dari tabel 5.5.1. menunjukkan indikator lingkungan terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan skor masing-masing 420, 464, 441 dan 549. Secara keseluruhan jumlah skor = 1.874 atau 61,3 % dari skor indikator lingkungan ($764 \times 4 = 3.056$). Skor tersebut bernilai cukup, sehingga pemakaian minyak tanah belum membawa kondisi lingkungan yang lebih baik, namun hanya cukup membuat kondisi lingkungan tidak tercemar (bebas polusi).

Tabel frekwensi persetujuan indikator lingkungan terhadap pemakaian minyak tanah dapat dilihat dibawah :

Tabel 5.5.1.4
Frekwensi Indikator Lingkungan

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	44	5,8 %
Setuju	322	42,1 %
Tidak Setuju	334	43,7 %
Sangat Tidak Setuju	64	8,4 %
Jumlah	764	100 %

Tabel 5.5.1.4. menunjukkan tingkat persetujuan penilaian indikator lingkungan memasak dengan kompor minyak tanah relatif bernilai rendah atau lebih kecil dari tingkat ketidaksetujuannya. Adapun skor yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertanyaan pertama menyangkut tingkat kebersihan yang ditimbulkan akibat memasak dengan kompor minyak tanah, yang memiliki skor = 420 atau 54,9 % dari skor ideal yang masuk kategori kurang dari cukup, sehingga dapat dikatakan bahwa memasak dengan kompor minyak tanah dapat menimbulkan lingkungan jadi tidak bersih. Untuk kebersihan diri atau pelaku yang memasak mendapatkan skor 464 atau 60,7 % dari skor ideal. Skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan kebersihan lingkungan akibat memasak dengan kompor minyak tanah.

Adapun polusi udara yang ditimbulkan akibat memasak dengan kompor minyak tanah memiliki skor = 441 atau 57,7 % dari skor ideal, lebih tinggi dari tingkat kebersihan lingkungan akibat memasak dengan minyak tanah, namun lebih rendah dari tingkat kebersihan diri akibat memasak dengan minyak tanah. Skor tertinggi pada indikator lingkungan adalah tingkat kebisingan suara akibat memasak dengan minyak tanah yang memiliki skor 549 atau 71,9 % dari skor ideal. Skor tersebut dapat dinilai tinggi atau baik, yang berarti bahwa memasak

dengan kompor minyak tanah relatif baik untuk tidak menimbulkan kebisingan suara.

5.5.2. Korelasi Karakteristik Responden terhadap Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah

Diskripsi tentang korelasi karakteristik responden terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5.2.
Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pemakaian Minyak Tanah

Correlations

		Jenis Kelamin	Pendidikan	Pendapatan	Pekerjaan	Pemakaian minyak tanah
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	-.168*	.027	.008	.157*
	Sig. (2-tailed)		.020	.710	.917	.030
	N	191	191	191	191	191
Pendidikan	Pearson Correlation	-.168*	1	.614**	-.312**	-.107
	Sig. (2-tailed)	.020		.000	.000	.140
	N	191	191	191	191	191
Pendapatan	Pearson Correlation	.027	.614**	1	-.493**	-.171*
	Sig. (2-tailed)	.710	.000		.000	.018
	N	191	191	191	191	191
Pekerjaan	Pearson Correlation	.008	-.312**	-.493**	1	.057
	Sig. (2-tailed)	.917	.000	.000		.432
	N	191	191	191	191	191
Pemakaian minyak tanah	Pearson Correlation	.157*	-.107	-.171*	.057	1
	Sig. (2-tailed)	.030	.140	.018	.432	
	N	191	191	191	191	191

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel korelasi mengikutsertakan seluruh karakteristik responden, yang berarti pengaruh karakteristik keseluruhan responden tidak berdiri sendiri, serta

menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson (data berdistribusi normal). Hasil korelasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.1. **Karakteristik jenis kelamin.**

Korelasi antara karakteristik jenis kelamin dengan pemakaian minyak tanah = 0,157. Oleh karena $0,152 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat rendah. Nilai positif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang sama, yang berarti bahwa semakin banyak persamaan jenis kelamin akan membuat semakin sama pendapat tentang pemakaian minyak tanah.

Tingkat signifikansi korelasi (Sig. (2 tailed) = 0,030 . Oleh karena $0,030 < 0,05$ (Probabilitas 0,030 lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis kelamin dengan pemakaian minyak tanah. Dalam tabel SPSS ditunjukkan dengan symbol (*), yang berarti bahwa terdapat korelasi secara signifikan pada level 0,05 (tingkat kesalahan 5 %)

5.5.2.2. **Karakteristik Pendidikan**

Korelasi antara karakteristik pendidikan dengan pemakaian minyak tanah = -0,107. Oleh karena $0,107 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Nilai negatif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan akan membuat semakin berkurang atau semakin negatif pendapat tentang pemakaian minyak tanah.

Tingkat signifikan korelasi = 0,140. Oleh karena $0,140 > 0,05$ (Probabilitas 0,140 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik pendidikan dengan pemakaian minyak tanah.

5.5.2.3. **Karakteristik Pendapatan**

Korelasi antara karakteristik pendapatan responden dengan pemakaian minyak tanah = 0,171. Oleh karena $0,171 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat

lemah. Sedangkan arah hubungan bersifat berlawanan yang ditunjukkan dengan nilai negatif korelasi keduanya. Hubungan berlawanan berarti bahwa semakin tinggi pendapatan akan membuat semakin berkurang atau berpendapat negatif terhadap pemakaian minyak tanah.

Tingkat signifikan korelasi = 0,018. Oleh karena $0,018 < 0,05$ (Probabilitas 0,018 lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan secara signifikan antara karakteristik pendapatan dengan pemakaian minyak tanah. (dalam tabel SPSS ditunjukkan dengan symbol (*), yang berarti bahwa terdapat korelasi secara signifikan pada level 0,05 (tingkat kesalahan 5 %)

5.5.2.4. Karakteristik Jenis Pekerjaan

Korelasi antara karakteristik jenis pekerjaan responden dengan pemakaian minyak tanah = 0,057. Oleh karena $0,057 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat rendah. Sedangkan arah hubungan adalah sama, yang ditunjukkan dengan nilai positif korelasi keduanya, yang berarti bahwa semakin banyak jenis pekerjaan responden akan membuat semakin bertambah atau berpendapat positif tentang pemakaian minyak tanah.

Tingkat signifikan korelasi = 0,432. Oleh karena $0,432 > 0,05$ (Probabilitas 0,432 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis pekerjaan dengan pemakaian minyak tanah.

Dari hasil uji korelasi antara karakteristik responden terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dapat disimpulkan bahwa, korelasi seluruh karakteristik responden baik jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah sangat rendah. Adapun sifat korelasi untuk karakteristik tingkat pendidikan dan pendapatan berkorelasi negatif yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maupun pendapatan keluarga, maka semakin rendah tingkat ketahanan keluarga apabila memakai minyak tanah untuk konsumsi, sedangkan untuk

karakteristik lainnya bertanda positif atau berhubungan sama dengan ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah. Pada tingkat signifikansi korelasi terdapat dua karakteristik yang berkorelasi secara signifikan, yakni karakteristik jenis kelamin dan pendapatan.

5.6. Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG

5.6.1. Diskripsi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG

Data hasil quisener persepsi masyarakat tentang pemakaian LPG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6.1.

Skor Ketahanan Keluarga Pemakaian LPG

Pertanyaan	Indikator	Skor	Skor Ideal
1	Ekonomi	538	764
2		405	764
3		552	764
4		541	764
5		582	764
6		451	764
7	Sosial	421	764
8		530	764
9		557	764
10	Keamanan	463	764
11		402	764
12		469	764
13	Lingkungan	601	764
14		582	764
15		587	764
16		589	764
Jml		8270	12.224

Dari tabel dapat dilihat bahwa skor pemakaian LPG = 8.270 dari 191 responden. Selanjutnya untuk menghitung nilai dari hasil tersebut, maka skor pemakaian LPG dibandingkan dengan skor ideal / kriterium yang merupakan asumsi bahwa setiap responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi, yakni

Skor ideal / kriterium untuk jawaban pertanyaan pemakaian LPG = $4 \times 16 \times 191 = 12.224$ ($4 =$ skor tertinggi, 16 jumlah butir instrumen pertanyaan, 191 jumlah responden). Skor variabel pemakaian LPG = 8.270 . Dengan demikian nilai pemakaian LPG = $8.270 : 12.224 = 0,68 \times 100 \% = 68 \%$ dari yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah 100% . Skor 68 dapat dikategorikan memiliki nilai lebih dari cukup atau kerang lebih baik, sehingga adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG membawa dampak ketahanan keluarga pada kondisi lebih dari cukup.

Nilai skor tertinggi dari seluruh butir pertanyaan berada pada pertanyaan nomor 13 pada indikator lingkungan, yakni tingkat kebersihan menggunakan kompor LPG untuk memasak dengan skor 601. Skor terendah pada nomor butir pertanyaan 11 dalam indikator keamanan, yaitu adanya kemungkinan bahaya terjadi ledakan pada pemakaian kompor LPG dengan skor 402.

Perhitungan skor per indikator dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata setiap indikator, selanjutnya dibagi dengan skor ideal/kriteriaum dari setiap butir pertanyaan. Skor indikator ekonomi = $511,5 : 764 = 0,67$ atau 67% dari skor ideal. Indikator sosial = $501 : 764 = 0,66$ atau 66% dari skor ideal. Nilai dari indikator keamanan = $444,7 : 764 = 0,58$ atau 58% dari skor ideal. Skor lingkungan = $589,8 : 764 = 0,77$ atau 77% dari skor ideal. Dengan demikian dari data perhitungan skor tiap indikator diperoleh skor lingkungan mempunyai nilai tertinggi sebesar 77% , sedangkan skor terendah terdapat pada indikator keamanan sebesar 58% .

Dari skor tiap-tiap indikator menunjukkan bahwa pemakaian LPG berdampak terhadap lingkungan yang sangat baik, sedangkan untuk keamanan keluarga pemakaian LPG dalam kondisi kurang aman, namun secara keseluruhan

dampak pemakaian LPG lebih dari cukup atau kurang lebih baik dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

Adapun diskripsi perhitungan dari tiap butir pertanyaan dalam masing-masing indikator sebagai berikut :

5.6.1.1. Indikator Ekonomi

Tabel 5.6.1. menunjukkan bahwa indikator ekonomi terdiri atas 6 butir pertanyaan dengan skor masing-masing 538, 405, 552, 541, 582, 451, secara keseluruhan skor berjumlah = 3.069 atau 67 % dari skor ideal indikator ekonomi. Apabila skor 50 % sebagai batas skor antara rendah dan tinggi, maka skor indikator ekonomi di atas skor rendah atau bernilai lebih dari cukup.

Diskripsi jawaban persetujuan dari keseluruhan butir pertanyaan dalam indikator ekonomi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6.1.1.
Frekwensi Indikator Ekonomi

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	107	9,3 %
Setuju	625	54,5 %
Tidak Setuju	333	29%
Sangat Tidak Setuju	82	7,2 %
Jumlah	1147	100%

Tabel di atas memperlihatkan jawaban persetujuan (sangat setuju dan setuju) sebesar 63,8 % sedangkan ketidaksetujuan 46,2 %, yang berarti nilai indikator ekonomi dalam pemakaian kompor LPG lebih banyak bernilai positif dibandingkan penilaian negatif dari pemakaian kompor LPG. Nilai tersebut dapat dijelaskan melalui diskripsi dari tiap butir pertanyaan , yaitu :

Pertanyaan nomor satu tentang kemudahan untuk mendapatkan LPG, dalam penelitian didapatkan bahwa nilai butir ini sebesar = 538 atau 70,47 % dari skor ideal = 764. Dari skor ini menunjukkan bahwa LPG relatif tidak sulit didapatkan oleh masyarakat. Adapun kejadian demo yang memprotes kelangkaan LPG menurut penelitian ini tidak mempengaruhi terhadap pendapat masyarakat akan kesulitan LPG.

Nilai ekonomi yang berhubungan dengan kemudahan pembelian LPG dalam skala kecil (kurang 1 kg) mendapatkan skor 405 atau 53 % dari skor ideal, nilai tersebut berkategori kurang, yang berarti masyarakat kesulitan untuk dapat membeli LPG kurang dari 1 kg atau bahkan secara resmi tidak ada penjualan LPG kurang dari 1 kg.

Untuk kategori harga LPG berkaitan dengan pendapatan keluarga memiliki skor 552 atau 72,3 % dari skor ideal. Skor ini menunjukkan bahwa harga LPG selama ini tidak menyulitkan dihadapkan dengan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dalam posisi dissaving ketika mengkonsumsi LPG untuk keperluan rumah tangga.

Nilai ekonomi dalam hal kemudahan dalam membawa dan menyimpan LPG memiliki skor = 541 atau 70,8 % dari skor ideal. Skor tersebut menunjukkan bahwa LPG relatif mudah untuk dibawa dan disimpan. Dengan demikian tabung 3 kg yang merupakan tabung standar untuk dibagikan kepada masyarakat dinilai tidak merepotkan baik untuk menyimpan maupun membawanya.

Sedangkan nilai ekonomi dalam hal kemudahan memasak dengan LPG memiliki skor 582 atau 76,2 % dari skor ideal 764. Skor ini merupakan skor tertinggi dalam indikator ekonomi. Skor tersebut menunjukkan bahwa memasak dengan kompor LPG dinilai tidak menyulitkan bagi anggota keluarga.

Adapun skor ekonomi kemudahan untuk memperbaiki kompor LPG seandainya mengalami kerusakan = 451 atau 59 % dari skor ideal. Skor berkategori kurang dan dibandingkan dengan skor indikator ekonomi lainnya termasuk rendah, sehingga dapat ditunjukkan bahwa masyarakat mengalami

kesulitan jika kompor LPG tiba-tiba rusak. Hal ini erat kaitannya dengan sifat bahan bakar gas yang harus ditempatkan pada tabung yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, termasuk didalamnya perlengkapan untuk keperluan memasak, sehingga dibutuhkan teknologi relatif tinggi yang tidak setiap orang mampu untuk memperbaiki ketika terjadi kerusakan.

5.6.1.2. Indikator Sosial

Indikator sosial dalam pemakaian kompor LPG terdiri dari tiga butir pertanyaan dengan skor masing-masing 421, 530, 557. Skor tersebut digambarkan dalam tabel frekwensi jawaban sebagai berikut :

Tabel 5.6.1.2.
Frekwensi Indikator Sosial

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	50	8,8%
Setuju	297	51,8
Tidak Setuju	191	33,3
Sangat Tidak Setuju	35	6,1
Jumlah	573	100%

Tabel di atas dapat dihitung perbandingan tingkat persetujuan dengan ketidaksetujuan, yakni tingkat persetujuan = 60,6 %, sedangkan ketidaksetujuan 39,4 %. Dengan demikian nilai indikator sosial pemakaian LPG relatif cukup (6,1 %) atau dapat dikatakan konversi minyak tanah ke LPG tidak membuat kehidupan sosial keluarga menjadi baik.

Diskripsi dari tingkat persetujuan tersebut dapat dijelaskan melalui ketiga butir pertanyaan dalam penelitian, yakni :

Pertanyaan pertama tentang nilai sosial yang berkaitan dengan adanya saling kerja sama diantara keluarga dalam masyarakat yang sama-sama

menggunakan LPG untuk memasak yang mendapatkan skor = 421 atau 55,1 % dari skor ideal. Skor tersebut memperlihatkan bahwa pemakaian LPG kurang mendukung terciptanya kehidupan sosial untuk saling kerja sama diantara keluarga..

Skor untuk nilai sosial dalam kenyamanan memasak dengan memakai kompor LPG berjumlah 530 atau 69,4 % dari skor ideal, skor tersebut berkategori kurang lebih baik, sehingga memasak dengan LPG relatif membuat nyaman bagi anggota keluarga yang melakukannya.

Adapun kategori kesukaan maupun kenyamanan yang dikaitkan dengan jenis dan jumlah masakan, pemakaian dengan kompor LPG memiliki nilai 557 atau sekitar 72,9 % dari skor ideal. Skor tersebut menunjukkan bahwa memasak dengan LPG jenis masakan apapun dan dengan jumlah berapapun tidak membuat jenuh atau lelah. Skor untuk kategori ini merupakan skor tertinggi dalam indikator sosial.

5.6.1.3. Indikator Keamanan

Skor indikator keamanan dalam pemakaian LPG berturut-turut terdiri dari 463 untuk nilai keamanan dalam hal bahaya kebakaran, 402 untuk resiko adanya ledakan dan 469 bagi kekuatiran adanya bahaya bagi orang yang memasang perlengkapan kompor LPG. Secara keseluruhan jumlah skor indikator keamanan pemakaian LPG = 1.334 atau 58,2 % dari skor ideal indikator keamanan ($764 \times 3 = 2.292$). Kategori skor tersebut pada posisi kurang, sehingga indikator keamanan sebagai dampak pemakaian LPG berkategori kurang aman.

Keseluruhan skor tersebut dapat dilihat frekwensi jawaban atau persetujuan dari masing-masing butir pertanyaan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6.1.3.

Frekwensi Indikator Keamanan Pemakaian LPG

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	30	5,4 %
Setuju	192	34,7 %
Tidak Setuju	287	51,9 %
Sangat Tidak Setuju	44	8 %
Jumlah	553	100 %

Tabel frekwensi tingkat persetujuan di atas menunjukkan tingkat persetujuan lebih kecil dari ketidaksetujuan, sehingga indikator keamanan pada pemakaian LPG berkategori kurang. Masyarakat menilai bahwa kompor LPG dapat membahayakan bagi keselamatan baik diri, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Adapun rincian tersebut dapat digambarkan dari skor masing-masing butir pertanyaan penelitian.

Indikator keamanan pertama berkaitan dengan bahaya kebakaran yang ditimbulkan akibat menggunakan kompor minyak tanah untuk keperluan memasak yang memiliki skor = 463 atau sekitar 60,6 % dari skor ideal, yang menunjukkan pemakaian LPG cukup dapat menimbulkan terjadinya kebakaran.

Kategori keamanan kedua berkaitan dengan adanya ancaman ledakan dari LPG akibat kerusakan atau gangguan perlengkapan kompor yang bernilai 402 atau 52,6 % dari skor ideal. Nilai tersebut berkategori kurang, sehingga kekuatiran kemungkinan terjadinya ledakan LPG sangat tinggi terjadi di masyarakat. Hasil ini diperkuat dengan adanya peristiwa yang pernah terjadi, yakni kerusakan berupa kebocoran LPG sampai menimbulkan ledakan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan untuk memperhatikan kembali aspek keamanan dari tabung LPG. Skor ini merupakan skor terendah dari keseluruhan butir pertanyaan dalam pemakaian LPG.

Indikator keamanan ketiga berkenaan dengan keamanan diri bagi orang yang memasang perlengkapan maupun peralatan kompor yang memiliki skor = 469 atau 61,4 % dari skor ideal. Skor ini dalam indikator keamanan adalah skor tertinggi, namun kategori skor berada pada nilai cukup, sehingga pemasangan peralatan maupun perlengkapan untuk keperluan kompor LPG masih cukup aman dibandingkan dengan bahaya kebakaran maupun ledakan yang kemungkinan terjadi akibat kerusakan pada tabung maupun kompor LPG.

5.6.1.4. Indikator Lingkungan

Skor indikator lingkungan pemakaian LPG berturut-turut dari pertanyaan pertama = 601 untuk tingkat kebersihan memasak dengan kompor LPG, 582 untuk kebersihan badan ketika memasak dengan LPG, 587 dalam kategori adanya polusi udara akibat memasak dengan LPG dan 589 adanya kebisingan suara dari kompor LPG. Secara keseluruhan jumlah skor indikator lingkungan pemakaian LPG = 2.359 atau 77,2 % dari skor ideal indikator lingkungan ($764 \times 4 = 3.056$). Dengan demikian pemakaian LPG dapat dikatakan membuat lingkungan yang lebih sehat.

Frekwensi jawaban atau persetujuan dari masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat tabel di bawah :

Tabel 5.6.1.4.

Frekwensi Indikator Lingkungan Pemakaian LPG

Jawaban	Frekwensi	Prosentase
Sangat Setuju	128	16,8 %
Setuju	587	76,8 %
Tidak Setuju	37	4,8 %
Sangat Tidak Setuju	12	1,6 %
Jumlah	764	100 %

Tabel 5.6.1.4. menunjukkan bahwa pemakaian LPG tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jawaban yang ada tidak lebih dari 7 % yang mengatakan ketidaksetujuan kerusakan lingkungan akibat pemakaian LPG. Skor indikator lingkungan ini merupakan skor tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya dalam pemakaian LPG. Deskripsi dari masing-masing kategori lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kategori pertama indikator lingkungan menyangkut tingkat kebersihan yang ditimbulkan akibat memasak dengan kompor LPG memiliki skor = 601 atau 78,7 % dari skor ideal yang merupakan skor tertinggi dalam pemakaian LPG. Skor ini memperlihatkan adanya lingkungan yang tetap bersih sebagai dampak dari pemakaian LPG untuk keperluan memasak.

Ukuran kedua indikator lingkungan berkenaan dengan kebersihan diri ketika sedang memasak dengan LPG yang memiliki skor 582 atau 76,2 % dari skor ideal. Skor inipun menunjukkan bahwa pemakaian LPG tidak menimbulkan kotor bagi pemasak.

Kategori ketiga sebagai ukuran indikator lingkungan adalah tingkat polusi udara yang ditimbulkan akibat memasak dengan kompor LPG yang mempunyai skor = 587 atau 76,8 % dari skor ideal, yang memperlihatkan ketiadaan atau sedikit menimbulkan polusi akibat pemakaian LPG.

Ukuran selanjutnya menyangkut tingkat kebisingan suara akibat pemakaian LPG dengan skor 589 atau 77,1 % dari skor ideal, yang berarti pemakaian LPG tidak menimbulkan suara yang membuat bising atau berisik.

5.6.2. Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pemakaian LPG

Deskripsi tentang korelasi karakteristik responden terhadap pemakaian LPG dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6.2

Korelasi Karakteristik Responden terhadap Pemakaian LPG**Correlations**

		Jenis Kelamin	Pendidikan	Pendapatan	Pekerjaan	Pemakaian Elpiji
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	-.168*	.027	.008	-.057
	Sig. (2-tailed)		.020	.710	.917	.432
	N	191	191	191	191	191
Pendidikan	Pearson Correlation	-.168*	1	.614**	-.312**	-.037
	Sig. (2-tailed)	.020		.000	.000	.610
	N	191	191	191	191	191
Pendapatan	Pearson Correlation	.027	.614**	1	-.493**	.049
	Sig. (2-tailed)	.710	.000		.000	.497
	N	191	191	191	191	191
Pekerjaan	Pearson Correlation	.008	-.312**	-.493**	1	.124
	Sig. (2-tailed)	.917	.000	.000		.088
	N	191	191	191	191	191
Pemakaian Elpiji	Pearson Correlation	-.057	-.037	.049	.124	1
	Sig. (2-tailed)	.432	.610	.497	.088	
	N	191	191	191	191	191

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji korelasi menggunakan korelasi Product Moment Pearson dan mengikutsertakan seluruh karakteristik responden, yang berarti pengaruh karakteristik keseluruhan responden tidak berdiri sendiri. Hasil korelasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.2.1. Karakteristik jenis kelamin.

Korelasi antara karakteristik jenis kelamin dengan pemakaian LPG = - 0,057. Oleh karena $- 0,057 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Nilai negatif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yang berarti bahwa semakin banyak persamaan jenis kelamin akan membuat semakin berbeda pendapat tentang pemakaian minyak tanah.

Tingkat signifikan korelasi (Sig. (2 tailed) = 0,432 . Oleh karena $0,432 > 0,05$ (Probalitas 0,432 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti

tidak terdapat hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis kelamin dengan pemakaian LPG.

5.6.2.2. Karakteristik Pendidikan

Korelasi antara karakteristik pendidikan dengan pemakaian LPG = -0,037. Oleh karena $-0,037 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Nilai negatif dari korelasi menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan akan membuat semakin berkurang atau semakin negatif pendapat tentang pemakaian LPG.

Tingkat signifikan korelasi = 0,610. Oleh karena $0,610 > 0,05$ (Probabilitas 0,610 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik pendidikan dengan pemakaian LPG.

5.6.2.3. Karakteristik Pendapatan

Korelasi antara karakteristik pendapatan responden dengan pemakaian LPG = 0,049. Oleh karena $0,049 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Sedangkan arah hubungan bersifat sama yang ditunjukkan dengan nilai positif korelasi keduanya. Hubungan yang sama berarti bahwa semakin tinggi pendapatan akan membuat semakin positif pendapat tentang pemakaian LPG.

Tingkat signifikan korelasi = 0,497. Oleh karena $0,497 > 0,05$ (Probabilitas 0,497 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik pendapatan dengan pemakaian LPG.

5.6.2.4. Karakteristik Jenis Pekerjaan

Korelasi antara karakteristik jenis pekerjaan responden dengan pemakaian LPG = 0,124. Oleh karena $0,124 < 0,5$, maka korelasi keduanya rendah. Sedangkan arah hubungan adalah sama, yang ditunjukkan dengan nilai positif korelasi keduanya, yang berarti bahwa semakin beragam jenis pekerjaan

responden akan membuat semakin bertambah atau berpendapat positif tentang pemakaian LPG.

Tingkat signifikan korelasi = 0,088. Oleh karena $0,088 > 0,05$ (Probabilitas 0,088 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik jenis pekerjaan dengan pemakaian LPG.

Dari uji korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara karakteristik responden terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian LPG secara keseluruhan sangat rendah dan tingkat signifikansi korelasi tidak satupun karakteristik responden berkorelasi secara signifikan terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian LPG.

5.7. Komparasi Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dengan LPG

Untuk mengkomparasikan atau membandingkan hasil ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dengan LPG akan digunakan pengujian melalui uji t dua sampel yang berpasangan (paired), oleh karena sifat sampel penelitian yang terdiri dari sampel yang sama namun berbeda dalam perlakuan atau pengukuran. Seluruh pengujian perbandingan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan SPSS.

5.7.1. Komparasi Variabel Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Tabel 5.7.1.a.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pemakaian Minyak Tanah	39.2775	191	6.08289	.44014
	Pemakaian Elpiji	43.2984	191	5.12270	.37067

Tabel di atas menunjukkan perbedaan rata-rata (mean) antara ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dengan LPG, yakni rata-rata ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah sebesar 39,28 dan pemakaian LPG sebesar 43,3, yang berarti jumlah rata-rata ketahanan keluarga pada pemakaian LPG lebih besar daripada minyak tanah. Dengan demikian secara umum pemakaian LPG lebih memperkuat ketahanan keluarga.

Tabel 5.7.1.b.

Paired Samples Correlations

Pair	N	Correlation	Sig.
1 Pemakaian Minyak Tanah & Pemakaian Elpiji	191	.026	.717

Korelasi antara variabel pemakaian minyak tanah dengan pemakaian LPG = 0,026. Oleh karena $0,026 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat lemah. Adapun tingkat signifikan korelasi = 0,717. Oleh karena $0,717 > 0,05$ (Probabilitas 0,717 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara karakteristik pemakaian minyak tanah dengan LPG.

Tabel 5.7.1.c.

Paired Samples Test

		Pair 1
		Pemakaian Minyak Tanah - Pemakaian Elpiji
Paired Differences	Mean	-4.02094
	Std. Deviation	7.84854
	Std. Error Mean	.56790
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-5.14114
	Upper	-2.90074
t		-7.080
df		190
Sig. (2-tailed)		.000

Tabel di atas menyebutkan angka t hitung sebesar $-7,080$. Apabila ditulis hipotesis :

H_0 = Rata-rata ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah adalah identik dengan rata-rata pemakaian LPG (rata-rata keduanya tidak berbeda secara nyata)

H_1 = Rata-rata antara ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dengan tingkat signifikansi (α) 10 %, karena output untuk dua sisi (two tailed), maka batas kritis menolak/menerima H_0 adalah $10\% : 2 = 5\%$ (0,05). Oleh karena akan diketahui apakah rata-rata ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah sama atau tidak sama dengan pemakaian LPG, sehingga memungkinkan adanya dua jawaban lebih besar atau lebih kecil, untuk itu uji dilakukan dua sisi.

Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan = jumlah data - 1 = $191 - 1 = 190$. Dari tabel t didapat angka 1,645. Oleh karena $-7,080 > 1,645$, maka H_0 ditolak, yang berarti menerima H_1 , maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata antara ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa tingkat signifikan (Sig . (2-tailed)) bernilai = 0,000, sedangkan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Dengan demikian ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dibandingkan dengan pemakaian LPG secara nyata memiliki perbedaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan konversi minyak tanah ke LPG memiliki dampak perbedaan secara nyata terhadap ketahanan keluarga, yakni semakin tinggi tingkat ketahanan keluarga.

Diskripsi rincian perbandingan antara indikator ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah dengan LPG dapat dijelaskan dalam sub bab berikut.

5.7.2. Perbandingan Indikator Ekonomi Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Tabel 5.7.2.

Skor Perbandingan Indikator Ekonomi Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Butir Pertanyaan	Skor Pemakaian Minyak Tanah	Skor Pemakaian LPG
1	418	538
2	435	405
3	471	552
4	452	541
5	508	582
6	520	451
Jumlah	2804	3069

Tabel 5.7.2. memperlihatkan skor indikator ekonomi pada pemakaian minyak tanah dan LPG. Skor pemakaian minyak tanah berjumlah 2804, sedangkan pemakaian LPG = 3069. Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa pada sub-sub indikator (butir pertanyaan) yang berjumlah 6 butir, 5 diantaranya pemakaian LPG memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan skor pemakaian minyak tanah, meskipun terdapat satu skor yang berkaitan dengan nilai ekonomi dalam hal kemudahan untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan peralatan, skor minyak tanah lebih tinggi dari pada pemakaian LPG. Namun demikian secara umum indikator ekonomi pada pemakaian LPG lebih tinggi dari pada pemakaian minyak tanah. Selanjutnya hasil analisis perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.7.2.a.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Ekonomi Minyak Tanah & Ekonomi Elpiji	14.6806	191	2.70430	.19568
		16.0681	191	2.85999	.20694

Tabel 5.7.2.b.

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Ekonomi Minyak Tanah & Ekonomi Elpiji	191	-.056	.444

Tabel 5.7.2.c.

Paired Samples Test

		Pair 1	
		Ekonomi Minyak Tanah - Ekonomi Elpiji	
Paired Differences	Mean		-1.38743
	Std. Deviation		4.04405
	Std. Error Mean		.29262
95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-1.96463
	Upper		-.81024
t			-4.741
df			190
Sig. (2-tailed)			.000

Tabel 5.7.2.a. memperlihatkan rata-rata skor indikator ekonomi pada pemakaian minyak tanah dan LPG dengan perbandingan = 14,6806 : 16,0681 dari jumlah 191 responden. Tabel 5.6.2.b. menunjukkan tingkat korelasi indikator ekonomi pemakaian minyak tanah dan LPG = - 0,056. Oleh karena - 0,056 < 0,5, maka korelasi keduanya sangat rendah, dengan tingkat signifikansi korelasi =

0,444. Oleh karena $0,444 > 0,05$ (Probabilitas 0,444 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara indikator ekonomi pemakaian minyak tanah dengan LPG.

Tabel 5.7.2.c. menyebutkan angka t hitung sebesar $= -4,741$. Apabila ditulis hipotesis :

H_0 = Rata-rata indikator ekonomi pemakaian minyak tanah adalah identik dengan rata-rata indikator ekonomi pemakaian LPG (rata-rata keduanya tidak berbeda secara nyata)

H_1 = Rata-rata antara indikator ekonomi pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dengan tingkat signifikansi (α) 10 %, karena output untuk dua sisi (two tailed), maka batas kritis menolak / menerima H_0 adalah $10\% : 2 = 5\%$ (0,05). Dan oleh karena akan diketahui apakah rata-rata pemakaian minyak tanah sama atau tidak sama dengan pemakaian LPG, sehingga memungkinkan adanya dua jawaban lebih besar atau lebih kecil, untuk itu uji dilakukan dua sisi.

Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan = jumlah data - 1 = $191 - 1 = 190$. Dari tabel t didapat angka 1,645. Oleh karena $-4,741 > 1,645$, maka H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator ekonomi antara pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa tingkat signifikan (Sig . (2-tailed)) bernilai = 0,000, sedangkan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Dengan demikian nilai ekonomi pemakaian LPG secara nyata berbeda dengan nilai ekonomi pemakaian minyak tanah. Dalam hal ini perbedaan rata-rata pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) dengan pemakaian LPG (sesudah dilaksanakan konversi) sebesar -1,38743 (tanda negatif menunjukkan indikator ekonomi sebelum pelaksanaan konversi (pemakaian minyak tanah) lebih kecil dari sesudah konversi (pemakaian LPG) dengan range antara batas bawah / lower = -1,96463 sampai batas atas / upper sebesar -

0,81024. Dari uji t terbukti bahwa perbedaan tersebut signifikan membuktikan pemakaian LPG mampu menaikkan ekonomi masyarakat.

5.7.3. Perbandingan Indikator Sosial Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Tabel 5.7.3.

Skor Perbandingan Indikator Sosial Minyak Tanah dan LPG

Butir Pertanyaan	Skor Pemakaian Minyak Tanah	Skor Pemakaian LPG
1	448	421
2	448	530
3	482	557
Jumlah	1378	1508

Tabel 5.7.3. menunjukkan skor indikator perbandingan indikator sosial pada pemakaian minyak tanah dan LPG. Skor pemakaian minyak tanah berjumlah 1378, sedangkan pemakaian LPG = 1508. Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa pada sub-sub indikator (butir pertanyaan) yang berjumlah 3 butir, 2 diantaranya pemakaian LPG memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan skor pemakaian minyak tanah. Dua skor tersebut berkaitan dengan kenikmatan dan kenyamanan dalam memasak. Adapun pemakaian minyak tanah lebih unggul satu skor dalam hal nilai sosial yang berhubungan langsung dengan tetangga, yakni adanya saling pinjam-meminjam seandainya terjadi kerusakan ataupun kehabisan minyak atau isi tabung gas.

Hasil analisis perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.7.3.a

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sosial Minyak Tanah	7.2147	191	1.81543	.13136
Sosial Elpiji	7.8953	191	1.39907	.10123

Tabel 5.7.3.b.

Paired Samples Correlations

Pair		N	Correlation	Sig.
1	Sosial Minyak Tanah & Sosial Elpiji	191	.154	.033

Tabel 5.7.3.c

Paired Samples Test

		Pair 1	
		Sosial Minyak Tanah - Sosial Elpiji	
Paired Differences	Mean		-.68063
	Std. Deviation		2.11451
	Std. Error Mean		.15300
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-.98243
		Upper	-.37883
t			-4.449
df			190
Sig. (2-tailed)			.000

Tabel 5.7.3.a. menunjukkan rata-rata skor indikator sosial pemakaian minyak tanah dan LPG dengan perbandingan = 7,2147 : 7,8953 dari jumlah 191 responden terdiri atas 3 butir pertanyaan. Tabel 5.7.3.b. memperlihatkan tingkat korelasi indikator sosial pemakaian minyak tanah dan LPG = 0,154. Oleh karena $0,154 < 0,5$, maka korelasi keduanya rendah. Adapun tingkat signifikan korelasi = 0,033. Oleh karena $0,033 < 0,05$ (Probabilitas 0,033 lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan secara signifikan antara indikator sosial pemakaian minyak tanah dengan indikator sosial pemakain LPG LPG. Dalam hal ini hubungan bersifat positif, dimana jika indikator sosial pemakaian minyak tanah naik maka indikator sosial pemakaian LPG bertambah pula.

Tabel 5.7.3.c. menyebutkan angka t hitung sebesar = - 4,449. Apabila ditulis hipotesis :

- Ho = Rata-rata indikator sosial pemakaian minyak tanah adalah identik dengan rata-rata indikator sosial pemakaian LPG (rata-rata keduanya tidak berbeda secara nyata)
- H1 = Rata-rata antara indikator sosial pemakaian minyak tanah dengan indikator pemakaian LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dengan tingkat signifikansi (α) 10 %, karena output untuk dua sisi (two tailed), maka batas kritis menolak / menerima Ho adalah $10 \% : 2 = 5 \% (0,05)$. (Oleh karena akan diketahui apakah rata-rata pemakaian minyak tanah sama atau tidak sama dengan pemakaian LPG, sehingga memungkinkan adanya dua jawaban lebih besar atau lebih kecil, untuk itu uji dilakukan dua sisi).

Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan = jumlah data - 1 = $191 - 1 = 190$. Dari tabel t didapat angka 1,645. Oleh karena $-4,449 > 1,645$, maka Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator sosial antara pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa tingkat signifikan (Sig . (2-tailed)) bernilai = 0,000, sedangkan $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Dengan demikian nilai sosial pemakaian LPG secara nyata berbeda dengan nilai sosial pemakaian minyak tanah. Dalam hal ini perbedaan rata-rata indikator sosial pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) dengan indikator sosial pemakaian LPG (sesudah dilaksanakan konversi) rata-rata sebesar -0,68063 (tanda negatif menunjukkan indikator sosial sebelum pelaksanaan konversi (pemakaian minyak tanah) lebih kecil dari sesudah konversi (pemakaian LPG) dengan range antara batas bawah / lower = - 0,98243 sampai dengan batas atas / upper sebesar - 0,37883. Dari uji t terbukti bahwa perbedaan tersebut signifikan yang membuktikan bahwa pemakaian LPG bernilai sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah.

5.7.4. Perbandingan Indikator Keamanan Pemakaian Minyak Tanah dan LPG.

Tabel 5.7.4.

Skor Perbandingan Indikator Keamanan Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Butir Pertanyaan	Skor Pemakaian Minyak Tanah	Skor Pemakaian LPG
1	497	463
2	435	402
3	514	469
Jumlah	1446	1334

Tabel di atas menunjukkan skor perbandingan indikator keamanan pada pemakaian minyak tanah dan LPG. Skor pemakaian minyak tanah berjumlah 1446, sedangkan pemakaian LPG = 1334. Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa pada sub-sub indikator (butir pertanyaan) keseluruhan yang berjumlah 3 butir pemakaian minyak tanah memiliki skor lebih tinggi daripada pemakaian LPG. Perbandingan selisih skor terbanyak pada aspek keamanan pemakai langsung, yakni adanya kekuatiran membahayakan bagi pemasang perlengkapan kompor/tabung minyak tanah atau LPG. Dengan demikian pemakaian minyak tanah secara mutlak lebih dapat memberikan rasa keamanan yang tinggi dibandingkan pemakaian LPG.

Hasil analisa perbandingan indikator keamanan pemakaian minyak tanah dengan LPG sebagai berikut :

Tabel 5.7.4.a

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Keamanan Minyak Tanah	7.5707	191	1.52660	.11046
	Keamanan Elpiji	6.9843	191	1.55420	.11246

Tabel 5.7.4.b

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Keamanan Minyak Tanah & Keamanan Elpiji	191	-.085	.243

Tabel 5.7.4.c

Paired Samples Test

		Pair 1 Keamanan Minyak Tanah - Keamanan Elpiji
Paired Differences	Mean	.58639
	Std. Deviation	2.26916
	Std. Error Mean	.16419
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	.26252
	Upper	.91026
t		3.571
df		190
Sig. (2-tailed)		.000

Dalam tabel 5.7.4.a. memperlihatkan rata-rata skor indikator keamanan pemakaian minyak tanah dan pemakaian LPG dengan perbandingan = 7,5707 : 6,9843 dari jumlah 191 responden yang terdiri atas 3 butir pertanyaan. Tabel 5.7.4.b memperlihatkan tingkat korelasi indikator keamanan pemakaian minyak tanah dan LPG = -0,085. Oleh karena $-0,085 < 0,5$, maka korelasi keduanya sangat rendah. Adapun tingkat signifikan korelasi = 0,243. Oleh karena $0,243 > 0,05$ (Probabilitas 0,243 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan secara signifikan antara indikator keamanan pemakaian minyak tanah dengan indikator keamanan pemakain LPG. Dalam hal ini hubungan bersifat searah (nilai positif), dimana jika indikator keamanan pemakaian minyak tanah naik maka indikator keamanan pemakaian LPG akan naik pula.

Tabel 5.7.4.c. menunjukkan angka t hitung sebesar = 3,571. Apabila ditulis hipotesis :

- Ho = Rata-rata indikator keamanan pemakaian minyak tanah adalah identik dengan rata-rata indikator keamanan pemakaian LPG (rata-rata keduanya tidak berbeda secara nyata)
- H1 = Rata-rata antara indikator keamanan pemakaian minyak tanah dengan indikator keamanan pemakaian LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dengan tingkat signifikansi (α) 10 %, karena output untuk dua sisi (two tailed), maka batas kritis menolak / menerima Ho adalah $10 \% : 2 = 5 \% (0,05)$. Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan = jumlah data - 1 = 191 - 1 = 190. Dari tabel t didapat angka 1,645. Oleh karena $3,571 > 1,645$, maka Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator keamanan antara pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa tingkat signifikan (Sig . (2-tailed)) bernilai = 0,000, sedangkan $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Dengan demikian nilai keamanan pemakaian minyak tanah secara nyata berbeda dengan nilai keamanan pemakaian LPG. Dalam hal ini perbedaan rata-rata indikator keamanan pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) dengan indikator keamanan pemakaian LPG (sesudah dilaksanakan konversi) rata-rata sebesar 0,58639 (tanda positif menunjukkan indikator keamanan sebelum pelaksanaan konversi (pemakaian minyak tanah) lebih besar dari sesudah konversi (pemakaian LPG) dengan range antara batas bawah / lower = 0,26252 sampai dengan batas atas / upper sebesar 0,91026. Dari uji t terbukti bahwa perbedaan tersebut signifikan yang membuktikan bahwa pemakaian minyak tanah menurut penelitian ini lebih aman dibandingkan dengan pemakain LPG.

5.7.5. Perbandingan Indikator Lingkungan Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Tabel 5.7.5.
Skor Perbandingan Indikator Lingkungan
Pemakaian Minyak Tanah dan LPG

Butir Pertanyaan	Skor Pemakaian Minyak Tanah	Skor Pemakaian LPG
1	420	601
2	464	582
3	441	587
4	549	589
Jumlah	1874	2359

Tabel 5.7.5. memperlihatkan skor perbandingan indikator lingkungan pada pemakaian minyak tanah dan LPG. Skor pemakaian minyak tanah berjumlah 1874, sedangkan pemakaian LPG = 2359. Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa pada sub-sub indikator (butir pertanyaan) secara keseluruhan yang berjumlah 4 butir pemakaian LPG memiliki skor lebih tinggi dari pada pemakaian minyak tanah, yang berarti indikator lingkungan mutlak pemakaian LPG memiliki skor lebih tinggi dibandingkan minyak tanah. Perbandingan selisih skor yang sangat menyolok terjadi pada aspek keberhasilan rumah ketika memasak dengan LPG maupun minyak tanah. Menurut penelitian tingkat kebersihan memasak dengan LPG jauh lebih baik dibandingkan memasak dengan minyak tanah.

Data hasil analisis perbandingan indikator lingkungan pemakaian minyak tanah dengan LPG adalah :

Tabel 5.7.5.a.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Lingkungan Minyak Tanah	9.8115	191	1.83707	.13293
	Lingkungan Elpiji	12.3508	191	1.37935	.09981

Tabel 5.7.5.b.

Paired Samples Correlations

Pair		N	Correlation	Sig.
1	Lingkungan Minyak Tanah & Lingkungan Elpiji	191	-.007	.923

Tabel 5.7.5.c

Paired Samples Test

		Pair 1
		Lingkungan Minyak Tanah - Lingkungan Elpiji
Paired Differences	Mean	-2.53927
	Std. Deviation	2.30498
	Std. Error Mean	.16678
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-2.86825
	Upper	-2.21028
t		-15.225
df		190
Sig. (2-tailed)		.000

Tabel 5.7.5.a. memperlihatkan rata-rata skor indikator lingkungan pada pemakaian minyak tanah dan pemakaian LPG dengan rata-rata perbandingan = 9.8115 : 12,3508 dari jumlah 191 responden yang terdiri atas 4 butir pertanyaan. Tabel 5.7.5.b ditunjukkan adanya tingkat korelasi indikator lingkungan pemakaian minyak tanah dan LPG sebesar = - 0,007. Oleh karena - 0,007 < 0,5, maka korelasi keduanya sangat lemah. Adapun tingkat signifikansi korelasi =

0,923. Oleh karena $0,923 > 0,05$ (Probabilitas 0,923 lebih besar dari 0,05), maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan secara signifikan antara indikator lingkungan pemakaian minyak tanah dengan indikator lingkungan pemakaian LPG.

Tabel 5.7.5.c. menunjukkan angka t hitung sebesar $= -15,225$. Apabila ditulis hipotesis :

- H_0 = Rata-rata indikator lingkungan pemakaian minyak tanah adalah identik dengan rata-rata indikator lingkungan pemakaian LPG (rata-rata keduanya tidak berbeda secara nyata)
- H_1 = Rata-rata antara indikator lingkungan pemakaian minyak tanah dengan indikator lingkungan pemakaian LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dengan tingkat signifikansi (α) 10 %, karena output untuk dua sisi (two tailed), maka batas kritis menolak / menerima H_0 adalah $10 \% : 2 = 5 \% (0,05)$. Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan = jumlah data - 1 = $191 - 1 = 190$. Dari tabel t didapat angka 1,645. Oleh karena $-15,225 > 1,645$, maka H_0 ditolak, yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata indikator lingkungan antara pemakaian minyak tanah dengan LPG tidak identik (rata-rata keduanya berbeda secara nyata).

Dari tabel dapat ditunjukkan bahwa tingkat signifikan (Sig . (2-tailed)) bernilai $= 0,000$, sedangkan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian indikator lingkungan pemakaian LPG secara nyata berbeda dengan indikator lingkungan pemakaian minyak tanah. Dalam hal ini perbedaan rata-rata indikator lingkungan pemakaian minyak tanah (sebelum pelaksanaan konversi) dengan indikator lingkungan pemakaian LPG (sesudah dilaksanakan konversi) rata-rata sebesar $-2,53927$ (tanda negatif memperlihatkan indikator lingkungan sebelum pelaksanaan konversi (pemakaian minyak tanah) lebih kecil dari pada sesudah konversi (pemakaian LPG) dengan range antara batas bawah / lower $= -2,86825$ sampai dengan batas atas / upper sebesar $-2,21028$. Dari uji t terbukti bahwa perbedaan tersebut signifikan yang menunjukkan bahwa pemakaian LPG

lebih baik dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah.

5.8. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

Hasil penelitian membuktikan bahwa :

Pertama, Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 telah diselenggarakan dengan hasil yang baik. Namun demikian untuk mengoptimalkan hasil terutama dalam hal tepat sasaran terhadap objek kebijakan, yang didalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan perlengkapan LPG oleh karena tidak memiliki kartu keluarga harus melaksanakan kebijakan tanpa bantuan perlengkapan. Di lain pihak sebagian masyarakat yang kurang membutuhkan perlengkapan, karena sebelumnya sudah menggunakan LPG untuk keperluan memasak, masih mendapatkan pembagian perlengkapan LPG. Oleh karena itu dibutuhkan satu program untuk mengeleminir kondisi semacam berulang di daerah lain.

Kedua, Pemakaian minyak tanah dibandingkan dengan pemakaian LPG untuk keperluan memasak secara signifikan berbeda. Secara umum pemakaian LPG memiliki skor lebih tinggi dari pada pemakaian minyak tanah yang berarti ketahanan keluarga akan meningkat jika memasak dengan LPG. Namun secara rincian tiap indikator ketahanan keluarga tidak secara keseluruhan pemakaian LPG secara nyata dan signifikan lebih unggul dari pada pemakaian minyak tanah. Penelitian menunjukkan bahwa skor indikator keamanan pemakaian minyak tanah lebih tinggi dari pada LPG.

Indikator ketahanan keluarga yang terdiri atas indikator ekonomi, sosial, keamanan dan lingkungan yang kesemuanya saling melengkapi untuk tercapainya ketahanan keluarga, sehingga merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Adanya satu indikator yang kurang mendukung atau berperan terhadap indikator lainnya akan sangat mempengaruhi tercapainya ketahanan keluarga yang tangguh. Dari hasil penelitian terbukti bahwa indikator keamanan secara signifikan

memiliki nilai lebih tinggi pemakaian minyak tanah dibandingkan dengan pemakaian LPG. Sedangkan indikator lainnya secara signifikan pemakaian LPG lebih tinggi dari pada pemakaian dengan minyak tanah. Berpijak dari penelitian ini, maka untuk memperoleh ketangguhan ketahanan keluarga dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dibutuhkan kebijakan untuk peningkatan indikator keamanan dalam pemakaian LPG.

Indikator keamanan yang meliputi keamanan diri, peralatan dan keamanan rumah tangga (tempat tinggal) dalam pemakaian LPG masih dirasakan belum aman oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan satu langkah atau program untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Program tersebut merupakan satu program yang dapat merubah persepsi masyarakat dari rasa ketidakamanan memasak dengan LPG menjadi perasaan aman. Program ini merupakan satu rangkaian dalam kebijakan konversi minyak tanah ke LPG sebagai satu bentuk atau wujud evaluasi kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan pemakaian LPG diantaranya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap pemakain LPG sesuai prosedur yang benar, sehingga dapat menepis kemungkinan terjadi kecelakaan akibat kesalahan prosedur pemakaian.
- b. Mengusahakan peralatan kompor pada umumnya dan khususnya tabung LPG memenuhi standar keamanan, dalam arti bahan maupun proses pembuatan dapat dipertanggungjawabkan untuk keamanannya.
- c. Melakukan pencegahan dan penanganan serta pemeriksaan secara intensif terhadap kecelakaan sekecil apapun yang diakibatkan oleh karena pemakaian LPG, sehingga dapat diantisipasi terhadap kejadian serupa yang dapat membuat ketakutan masyarakat terhadap pemakaian LPG.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Ketahanan Keluarga, dengan studi kasus di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

6.1.1. Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG

a. Secara keseluruhan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG memiliki skor baik, yakni 76 % dari ideal keseluruhan skor pelaksanaan. Skor tertinggi dari program pelaksanaan konversi pada pemberian informasi atau pelatihan penggunaan peralatan kompor LPG yang mencapai 84,25 % dari skor ideal. Sedangkan skor terendah pada pelaksanaan pembagian perlengkapan LPG kepada masyarakat yang memiliki skor 67,5 % dari skor ideal atau mendapatkan nilai cukup (lebih dari cukup).

b. Hasil penelitian dikaitkan dengan karakteristik responden yang terdiri atas karakteristik jenis kelamin, pendidikan, pendapatan serta jenis pekerjaan menunjukkan secara keseluruhan kerelasi karakteristik responden terhadap pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG sangat rendah dan tidak ada yang berkorelasi secara signifikan.

6.1.2. Ketahanan Keluarga pada Pemakaian Minyak Tanah.

a. Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah memiliki skor 61,4 % dari skor skor ideal atau memiliki kategori cukup. Dari keseluruhan skor, indikator keamanan memiliki skor tertinggi dengan angka 63,1 % dari skor ideal, sementara itu indikator sosial bernilai paling kecil = 60,1 %.

b. Analisis korelasi karakteristik responden terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah menunjukkan keseluruhan karakteristik memiliki

tingkat korelasi sangat rendah, namun demikian terdapat dua karakteristik, yaitu bahwa karakteristik jenis kelamin dan pendapatan yang memiliki hubungan secara signifikan terhadap ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah.

6.1.2. Ketahanan Keluarga pada Pemakaian LPG.

- a. Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG memiliki skor 68 % dari skor ideal, atau dapat disebut lebih dari cukup. Indikator lingkungan memiliki skor paling tinggi mendapatkan skor dibandingkan indikator lainnya yang mencapai 77 %, sementara itu indikator keamanan memiliki nilai paling rendah = 58 %.
- b. Analisis korelasi karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan, secara keseluruhan berkorelasi sangat lemah dan tak satupun yang berkorelasi secara signifikan, yang berarti bahwa karakteristik masyarakat Jakarta Timur secara signifikan tidak mempengaruhi ketahanan keluarga akibat pemakaian LPG.

6.1.4. Perbandingan Ketahanan keluarga pemakaian Minyak tanah dengan LPG.

- a. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketahanan keluarga pemakaian LPG lebih tinggi dibandingkan pemakaian minyak tanah. Rata-rata perbandingan adalah sekitar 43 % : 39 %. Adapun perbandingan tiap-tiap indikator ketahanan keluarga menunjukkan bahwa ketiga indikator, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara nyata perbandingan menunjukkan perbedaan, bahwa ketahanan keluarga pada pemakaian LPG lebih baik dibandingkan pemakaian minyak tanah. Sementara itu untuk indikator keamanan secara nyata membuktikan bahwa pemakaian minyak tanah lebih baik dari pada pemakaian LPG.
- b. Dengan demikian dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG secara umum dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan catatan bahwa indikator keamanan masih memerlukan program pembenahan, sehingga dampak kebijakan semakin signifikan dapat mempertinggi ketahanan keluarga.

6.2. **Saran**

- a. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya perlu diperhatikan pembagian paket perlengkapan LPG terhadap masyarakat sebagai sasaran program, sehingga dapat dieleminir masyarakat yang tadinya sudah memakai LPG tidak terbagi lagi, sementara masyarakat yang sebelumnya memakai minyak tanah dan betul-betul membutuhkan dapat terbagi. Pada gilirannya pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan.
- b. Dibutuhkan program kebijakan lain untuk menyempurnakan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, yakni program yang dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap aspek keamanan dari pemakaian LPG, sehingga akan tercapai ketahanan keluarga yang semakin mantap dengan adanya kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Nasir, dkk, "*Peralihan Sistem Energi, dari Konvensional menuju Sistem Energi Modern*" (Jakarta, BAKORNAS LTMI PB HMI, 2005).
- Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", PT Rineka Cipta, Semarang, 1990.
- Antonius Tarigan, "*Mencermati Dampak kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan*", 2001.
- Anthony Giddens, *The Third Way and It's Critics*, 2000, diterjemahkan oleh Iman Khoiri, "*Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya*", Irchisod, 2005.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur, "*Jakarta Timur Dalam Angka*", 2008.
- Carunia M Firdausy, "*Strategi dan Kebijakan Ekonomi dalam Mengembangkan Energi Alternatif Pengganti Minyak Bumi*", (Jakarta, LIPI, 2003).
- Consuelo G. Sevilla (et, all), *Pengantar Metode Penelitian*, Penerjemah Alimuddin Tuwu, Jakarta, UI Press, 1993
- Donald Van Meter and Carl Van Horn, "*The Policy Implementation Process, Conceptual Frame Work*", (Sage Publication, 1975).
- Edi Suharto, "*Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*", Alfabeta Bandung 2005.
- Evita H. Legowo, "*Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Ketahanan Energi dan Peran Minyak dan Gas Bumi*", Makalah Seminar Membangun Strategi Ketahanan Energi yang berkelanjutan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional, September 2008.
- F. Luthans, *Organizational Behavior* , Graw Hill International Book Company, New York, 1981.
- Grindle, M, (ed), "*Politics and Policy Implementation in The Third World*", (Princeton University Press, 1980).
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, "*Policy Analysis For The Real World*, (Oxford University Press, 1986).

- Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Mardalis, *"Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet pertama, 1990.
- Martin Allbrow dan Elizabeth King, eds, *"Globalization, Knowledge and Society"*, London:Sage Publication, 1990.
- M. Bernstein, dkk, *"Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025"*, (Jakarta, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2005).
- Patton, Carl V dan David S. Sawicky, *"Basic Methods of Policy Analisis and Planning"*, London, Prentice, 1993.
- Prasetya Irawan, *"Logika dan Prosedur Penelitian"*, (Jakarta STIA LAN Press, 2002).
- Ramesh Thakur, *"Human Security Regimes"*, in William T. Tow et al (ed) *"Asia's Emerging Regional Order Reconciling Traditional and Human Security"*, 2000
- Riant Nugroho D, *"Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"*, (PT Gramedia Jakarta, 2003).
- Riduwan, *"Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian"*, Bandung, Alfabeta, 2007.
- RM Sunardi, *"Teori Ketahanan Nasional"*, (PKN UI, tidak dipublikasikan, 1999).
- Singgih Santoso, *"Mengatasi Berbagai Masalah Statistik Dengan SPSS"*, Jakarta, Elek Media Kompetindo, 2004
- Soemarno Soedarsono, *"Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai tumpuan Ketahanan Nasional"*, PT Intermasa, 1997
- Solichin Abdul Wahab, *"Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara"*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990).
- Sudjadi dan Siti Wahyu Iryani, *"Profil Kesejahteraan Sosial keluarga melalui Home Industri"*, 1998
- Sugiyono, *"Metodologi Penelitian Administrasi"*, (Bandung, CV Alfabeta, 2004).

Sukanto Reksohadiprodjo, "*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*", BPEE-Yogyakarta, 1998.

Wan Usman, dkk, "*Daya Tahan Bangsa*", (Jakarta, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003).

William N. Dunn, "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*", Gadjah Mada University Press, 1999.

TERBITAN KHUSUS

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 -2025, ESDM 2005

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Bersubsidi.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1661 Tahun 2008, tentang Harga Patokan LPG Bersubsidi tahun 2008.

Yandianto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M 2 S Bandung.

SURAT KABAR

----- Majalah Sabili No. 01 Tahun XVI tanggal 24 Juli 2008

----- Kompas Edisi 25 Juli 2007

----- Kompas Edisi 28 Agustus 2007

----- Kompas Edisi 24 Oktober 2007

----- Kompas Edisi 10 Nopember 2007

----- Sinar Harapan Edisi 25 Juli 2008

----- Tempo Edisi 30 Agustus 2006

PUBLIKASI ELEKTRONIK

<http://www.antara.co.id/arc/2007/9/29>

<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/24>

<http://www.article.com /2007/06/12>

<http://www.kalyanamitra.or.id/index.php. 5/19/2008>

<http://www.KPPU.co.id/2008/10/21>

<http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/>

<http://www.tempointeraktif.Com/hg/ekbis/2006/08/30>.

<http://www.tempointeraktif.Com/hg/ekbis/2007/25>.

<http://www.UT Library.co.id/2005/>

<http://Zahidayat.wordpress.com/2007/08/28>.



PROGRAM PASCA SARJANA
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2009

Sekretariat : Gedung C FKG –UI Lantai IV, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat
10430 Telp 3907691

ANGKET / KUESIONER
DAMPAK KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Timur)

Pertanyaan yang diajukan diperlukan untuk kepentingan studi, jumlah pertanyaan seluruhnya 37 pertanyaan, terbagi atas 5 pertanyaan tentang pelaksanaan konversi, 16 pertanyaan tentang pemakaian minyak tanah (sebelum konversi) dan 16 pertanyaan tentang pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan). Mohon Bapak/Ibu/Sdr/Sdri berkenan mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan dan perasaan yang dialami.

I. Identitas Responden

Nama (Boleh tidak diisi) :

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan terakhir : a. SD b. SMP c. SMA
d. D III e. S-I f. S2/S3

Penghasilan seluruh anggota keluarga per bulan :
a. Rp 100.000 - Rp 500.000
b. Rp 501.000 - Rp 1.000.000
c. Rp 1.001.000 - Rp 1.500.000
d. Lebih dari Rp 1.501.000

Pekerjaan Utama : a. TNI/Polri b. PNS/BUMN c. Swasta
d. Pedagang e. Lain-lain

II. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri paling benar/sesuai.

III. Daftar Pertanyaan

A. Pelaksanaan Konversi minyak tanah

1. Konversi minyak tanah ke LPG adalah perubahan pemakaian minyak tanah ke LPG untuk keperluan memasak ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
2. Pembagian perlengkapan berupa 1 kompor gas 1 pit, selang, 1 buah tabung Elpiji 3 kg yang sudah ada isinya, semuanya dapat dipakai dengan baik
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
3. Semua warga masyarakat yang tadinya menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak telah mendapatkan pembagian paket kompor gas beserta perlengkapannya secara merata ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
4. Pemberian paket kompor gas beserta perlengkapannya dibagi secara Cuma-Cuma/gratis ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
5. Sebelum dibagikan paket kompor gas, terlebih dahulu diberikan pengarahan / pelatihan tentang tata cara penggunaannya.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

B. Memasak dengan minyak tanah (Sebelum pelaksanaan Konversi).**Ekonomi**

1. Saya dengan mudah mendapatkan minyak tanah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
2. Saya dapat membeli minyak tanah kurang dari satu liter
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
3. Dengan penghasilan saya beserta keluarga, minyak tanah tidak memberatkan keuangan rumah tangga
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
4. Minyak tanah mudah disimpan dan dibawa
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
5. Saya beserta anggota keluarga merasa tidak sulit memasak dengan minyak tanah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
6. Apabila kompor minyak tanah rusak dengan mudah saya atau anggota keluarga dapat memperbaiki
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

Sosial

7. Apabila sewaktu memasak tiba-tiba kompor rusak atau kehabisan minyak tanah, saya dapat saling meminjamkan kepada tetangga
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

8. Saya tetap menikmati/ gembira memasak dengan minyak tanah, meskipun jumlah masakan banyak dan membutuhkan waktu lama

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

9. Dengan minyak tanah, jenis masakan apapun saya suka memasaknya

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

Keamanan

10. Saya merasa tidak takut kebakaran karena saya percaya memasak dengan minyak tanah tidak berbahaya

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

11. Saya pernah mendengar atau melihat kompor minyak tanah meledak

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

12. Dalam pemasangan perlengkapan kompor minyak tanah saya tidak kuatir membahayakan bagi diri saya

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

Lingkungan

13. Memasak dengan minyak tanah lingkungan rumah/dapur tetap bersih

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

14. Pada waktu memasak dengan minyak tanah badan terasa jadi kotor

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

15. Memasak dengan minyak tanah berakibat polusi udara

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

16. Memasak dengan minyak tanah dapat menimbulkan suara berisik (tidak enak didengar)

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | b. Setuju |
| c. Tidak setuju | d. Sangat tidak setuju |

C. Memasak dengan LPG / Elpiji (Setelah Konversi).

Ekonomi

1. Saya dengan mudah mendapatkan elpiji

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju
2. Saya dapat membeli elpiji kurang dari satu kg

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju
3. Dengan penghasilan saya dan keluarga, elpiji tidak memberatkan keuangan rumah tangga

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju
4. Elpiji mudah disimpan dan dibawa

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju
5. Saya beserta anggota keluarga merasa tidak sulit memasak dengan elpiji

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju
6. Apabila kompor elpiji rusak dengan mudah saya dapat memperbaiki

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju

Sosial

7. Apabila sewaktu memasak tiba-tiba kompor gas rusak atau kehabisan elpiji, saya dapat saling meminjamkan kepada tetangga

a. Sangat setuju	b. Setuju
c. Tidak setuju	d. Sangat tidak setuju

8. Saya tetap menikmati/ gembira memasak dengan elpiji, meskipun jumlah masakan banyak dan membutuhkan waktu lama
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
9. Dengan elpiji jenis masakan apapun saya suka memasaknya
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

Keamanan

10. Saya merasa tidak takut kebakaran karena memasak dengan elpiji tidak akan membahayakan
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
11. Saya pernah mendengar/melihat kompor elpiji meledak
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
12. Dalam pemasangan perlengkapan kompor elpiji saya tidak kuatir membahayakan bagi diri saya
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

Lingkungan

13. Memasak dengan elpiji lingkungan rumah/dapur tetap bersih
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
14. Pada waktu memasak dengan elpiji badan terasa jadi kotor
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

15. Memasak dengan elpiji berakibat polusi udara
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
16. Memasak dengan elpiji dapat menimbulkan suara berisik (tidak enak didengar)
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

Terima kasih atas kerja sama dan bantuan Bp/Ibu/Sdr/Sdri dalam pengisian kuesioner ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu serta para pembuat kebijakan.

Jakarta, Januari 2009
Peneliti



Agung Karyanto
NPM 0706190332

LAMPIRAN 2

DATA HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN KONVERSI (X)

NO RESP	PENDIDIKAN	PENDAPATAN	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	SKOR UNFUK ITEM NO :					SKOR TOT
					1	2	3	4	5	
1	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	4	2	2	3	3	14
2	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	4	15
3	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	4	2	2	3	3	14
4	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	4	3	3	3	3	16
5	S-1	1500 jt lebih	Lain-lain	L	3	3	3	3	3	15
6	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	4	3	16
7	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	1	1	3	3	4	12
8	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	2	3	4	14
9	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	4	4	3	4	3	18
10	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	2	3	3	14
11	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	3	3	3	4	17
12	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	4	4	4	4	4	20
13	SMP	100 - 500	Lain-lain	P	3	3	3	2	3	14
14	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	2	2	4	14
15	DIII	1500 jt lebih	swasta	L	4	4	4	4	4	20
16	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	2	2	3	3	13
17	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	4	4	3	4	4	19
18	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	2	2	3	3	13
19	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	4	4	4	4	4	20
20	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	4	4	17
21	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	3	3	2	3	2	13
22	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	4	4	4	4	20
23	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	4	4	17
24	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	3	3	3	3	15
25	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	3	3	4	4	18
26	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	4	3	3	4	4	18
27	SMP	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	4	4	4	4	19
28	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	3	3	3	4	16
29	SD	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	3	4	4	4	19
30	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	4	3	3	3	17
31	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	4	3	3	3	16
32	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	3	3	15
33	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	3	4	4	17
34	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	4	3	3	4	4	18
35	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	2	3	4	15
36	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	2	3	4	14
37	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	4	3	3	4	4	18
38	DIII	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	2	3	4	15
39	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	3	4	4	17
40	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	4	4	17
41	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	4	3	4	4	18
42	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	2	4	4	16
43	SMP	500 - 1 jt	PNS	L	3	2	2	1	4	12
44	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	2	3	4	14
45	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	4	4	4	3	18
46	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	1	1	3	3	3	11
47	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	3	4	16
48	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	1	2	1	3	10
49	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	4	2	1	4	15
50	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	3	3	3	1	4	14
51	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	3	3	3	15
52	DIII	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	2	3	3	14
53	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	2	3	3	13

54	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	4	2	2	4	4	16
55	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	4	4	2	4	3	17
56	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	3	2	14
57	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	2	3	4	15
58	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	4	3	4	3	17
59	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	3	4	4	17
60	D111	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
61	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	1	4	4	14
62	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	4	4	3	17
63	SMA	100 - 500	swasta	P	3	3	3	4	3	16
64	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	3	3	3	15
65	SMP	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	2	4	2	14
66	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	4	4	4	4	3	19
67	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	3	3	3	3	4	16
68	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	4	4	4	4	20
69	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	4	3	3	3	3	16
70	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	3	3	15
71	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	4	4	3	3	4	18
72	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	4	3	3	3	3	16
73	S-2	1500 jt lebih	PNS	P	3	3	2	3	3	14
74	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	3	4	16
75	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	4	4	17
76	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	3	3	3	4	4	17
77	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	4	4	3	16
78	SMP	100 - 500	Pedagang	P	3	3	3	4	4	17
79	SMP	100 - 500	Pedagang	P	4	3	2	3	3	15
80	SD	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	2	3	11
81	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	3	3	15
82	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	3	3	12
83	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	2	3	4	13
84	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	3	2	14
85	SI	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	2	4	14
86	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	3	2	14
87	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	4	3	3	4	4	18
88	D3	1500 jt lebih	PNS	P	3	3	3	3	4	16
89	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	3	4	16
90	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	4	3	1	3	4	15
91	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	3	4	16
92	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	4	2	1	3	4	14
93	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	1	3	2	3	12
94	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	3	3	3	15
95	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	1	1	1	3	3	9
96	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	2	3	2	13
97	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	4	4	4	4	4	20
98	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	3	3	15
99	D111	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	4	4	4	4	19
100	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	3	2	2	3	3	13
101	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	3	4	4	4	19
102	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	3	2	2	4	4	15
103	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
104	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	3	2	2	3	3	13
105	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	4	3	16
106	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
107	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	4	4	3	4	4	19
108	SI	1500 jt lebih	TNI	P	3	2	2	3	3	13
109	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	1	1	2	1	2	7
110	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	3	3	3	3	3	15
111	SMA	1 jt - 1500	TNI	L	2	2	1	1	3	9

112	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	2	4	3	3	16
113	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	4	4	4	4	19
114	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	1	1	2	2	8
115	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	2	2	2	3	12
116	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	3	3	3	15
117	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	3	3	15
118	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	3	3	15
119	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	3	3	3	15
120	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	3	2	3	14
121	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	2	3	3	14
122	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	2	3	3	14
123	S1	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	2	3	3	14
124	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	2	4	3	15
125	SD	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	4	4	3	17
126	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	3	3	4	3	17
127	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	4	3	4	3	18
128	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	3	3	4	3	17
129	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	4	3	3	4	3	17
130	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	4	4	4	3	18
131	S1	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	3	3	2	14
132	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	3	4	16
133	D111	1500 jt lebih	TNI	P	3	4	4	4	4	19
134	D111	1500 jt lebih	TNI	P	4	3	3	3	3	16
135	S2	1500 jt lebih	TNI	P	3	3	2	3	4	15
136	S1	1500 jt lebih	TNI	P	4	4	2	3	4	17
137	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	2	4	4	15
138	S1	1500 jt lebih	swasta	P	4	4	1	4	4	17
139	D111	1500 jt lebih	PNS	P	4	3	2	4	3	16
140	S1	1500 jt lebih	POLRI	P	3	3	2	4	4	16
141	DIII	1500 jt lebih	POLRI	P	4	3	3	4	2	16
142	S1	1500 jt lebih	PNS	P	3	3	3	3	3	15
143	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	2	3	3	14
144	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	3	3	3	15
145	S1	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	2	3	3	14
146	D111	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	3	4	16
147	D111	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	4	4	4	18
148	S1	1 jt - 1500	PNS	P	3	3	3	3	3	15
149	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	4	3	4	4	4	19
150	DIII	1500 jt lebih	PNS	P	3	2	2	4	4	15
151	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	3	3	15
152	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	3	3	3	3	3	15
153	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	3	3	3	15
154	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	14
155	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	2	3	2	12
156	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	2	2	3	3	13
157	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	3	4	4	17
158	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	4	3	4	17
159	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	4	3	3	4	17
160	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	3	3	3	3	3	15
161	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	2	3	2	3	3	13
162	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	4	4	4	3	18
163	S1	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	3	3	15
164	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	3	3	15
165	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
166	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	3	3	2	14
167	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	2	3	2	3	3	13
168	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
169	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	4	4	17

170	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
171	SD	100 - 500	swasta	P	3	3	3	4	4	17
172	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	3	2	2	3	3	13
173	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	2	4	4	15
174	S1	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	2	3	3	14
175	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	4	4	3	4	3	18
176	SD	500 - 1 jt	swasta	L	1	1	1	1	2	6
177	SMP	100 - 500	swasta	P	3	3	3	3	3	15
178	SD	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	4	1	4	4	17
179	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	4	3	3	3	15
180	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	2	3	2	12
181	S1	1 jt - 1500	swasta	P	1	1	1	4	4	11
182	D3	1 jt - 1500	swasta	P	4	3	1	1	3	12
183	S1	1500 jt lebih	PNS	L	4	2	1	2	4	13
184	D3	1500 jt lebih	swasta	P	2	3	2	3	3	13
185	SMP	500 - 1 jt	swasta	L	4	4	4	4	4	20
186	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	4	3	4	4	17
187	SMP	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	2	4	2	14
188	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	15
189	S1	1500 jt lebih	swasta	P	4	4	3	2	2	15
190	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	2	3	3	13
191	SMP	100 - 500	swasta	P	3	3	3	2	3	14
					599	554	516	616	636	2921

LAMPIRAN 3

DATA HASIL PENELITIAN KONDISI KETAHANAN KELUARGA
PADA PEMAKAIAN MINYAK TANAH (Y 1)

NO RESP	PENDIDIKAN	PENDAPATAN	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	SKOR UNTUK ITEM NOMOR :						
					1	2	3	4	5	6	7
1	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	3	2	3	3	2
2	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	3	2	2	3	3
3	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	3	2
4	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	2	3	2	3	2	3	2
5	S-1	1500 jt lebih	Lain-lain	L	2	2	3	3	3	3	2
6	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	2	2	2	3	2	3	2
7	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	2	3	3	3	2	2	2
8	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	3	2
9	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	2	3	2	2
10	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	3	3	3	3
11	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	3	3	2	3	3	2
12	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	1	1	1	1	1	1	1
13	SMP	100 - 500	Lain-lain	P	3	3	3	2	3	3	2
14	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	2	3	3	2	2	3	2
15	DIII	1500 jt lebih	swasta	L	2	1	3	2	3	2	1
16	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	2	3	2	3	3	3	2
17	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	2	2	3	2	3	3	2
18	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	3	2	3	3	3	2
19	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	1	1	3	1	1	1	1
20	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	2	1	2	3	2	2	2
21	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	2	4	3	1	3	3	2
22	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	3	2	4	3	3	3
23	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	3	2	2	2
24	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	2	2
25	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	2	2
26	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	2	2
27	SMP	1 jt - 1500	Lain-lain	P	2	2	1	2	2	2	2
28	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	1	3	2	2	2	1	2
29	SD	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	3	2
30	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	2	2	3	2
31	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	2	2	3	2
32	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	2	2	2	3	3
33	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	2	1	2	2	3	2	2
34	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	2	2	3	3	3	2
35	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	2	2	3	2	3	2	2
36	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	2	2	3	3	2
37	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	2	3	2	3	3	3	2
38	D111	1500 jt lebih	swasta	L	3	3	2	3	3	3	2
39	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	L	2	3	2	3	3	3	3
40	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	2	3	3	3	2
41	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	2	1	3	3	3
42	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	2	2	3	3	3	2
43	SMP	500 - 1 jt	PNS	L	2	3	3	2	3	3	2
44	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	2	2	2	2	3	3	2
45	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	1	2	2	3	3	2
46	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	2	2	3	3	2
47	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	3	2	2	3	3	2
48	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	1	2	2	3	3	2
49	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	1	2	2	3	3	2
50	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	2	3	2	3	3	3	2
51	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	2	3	2	2	3	3	2
52	D111	1500 jt lebih	swasta	L	2	2	3	2	3	2	2

NO RESP	SKOR UNTUK ITEM NOMOR :									SKOR TOT
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1,	2	2	2	2	3	2	2	2	2	36
2,	3	3	3	3	3	4	2	2	3	43
3,	3	3	3	2	3	2	2	3	3	39
4,	3	3	3	2	3	2	2	2	2	39
5,	2	3	3	2	3	2	2	2	2	39
6,	3	2	3	3	2	2	2	2	3	38
7,	2	2	2	2	3	2	2	2	2	36
8,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	46
9,	2	2	2	2	3	2	2	2	2	34
10,	3	3	3	2	3	2	2	4	4	47
11,	2	3	2	2	3	3	2	2	3	40
12,	1	1	3	2	3	3	2	2	3	27
13,	3	3	3	3	3	2	2	3	3	44
14,	1	2	2	2	2	2	3	2	3	36
15,	2	2	2	3	1	3	2	2	3	34
16,	3	3	3	2	3	3	2	3	3	43
17,	3	2	2	2	2	2	2	2	3	37
18,	3	3	3	2	3	2	2	3	3	42
19,	1	3	3	2	2	2	2	2	2	28
20,	3	3	3	2	3	2	2	2	2	36
21,	3	2	3	2	3	2	3	2	3	41
22,	3	3	2	1	3	2	2	2	3	41
23,	2	2	2	2	2	2	2	2	3	34
24,	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
25,	2	2	4	2	2	2	2	2	2	34
26,	2	2	4	2	2	2	2	2	2	34
27,	1	1	2	3	2	2	1	4	3	32
28,	1	2	2	2	2	2	2	2	3	31
29,	3	3	2	2	2	2	2	2	3	40
30,	2	2	2	2	2	2	2	2	3	34
31,	2	2	2	2	2	2	2	2	3	34
32,	2	3	2	2	2	2	3	2	2	36
33,	2	2	2	2	3	2	3	3	4	37
34,	2	3	2	2	2	2	3	3	4	41
35,	2	2	2	2	2	2	3	3	3	37
36,	2	2	2	2	2	2	3	3	3	38
37,	2	2	3	2	3	2	3	3	4	42
38,	2	3	3	2	3	2	3	3	4	44
39,	2	2	3	2	3	2	3	3	4	43
40,	2	2	3	2	3	2	3	3	4	43
41,	3	3	3	2	3	2	2	2	2	40
42,	2	2	3	2	3	2	3	3	3	41
43,	2	2	2	2	3	2	3	3	3	40
44,	2	2	2	2	2	2	3	3	4	38
45,	2	3	2	2	2	2	3	3	3	37
46,	2	2	3	2	3	2	3	3	4	42
47,	2	2	3	2	3	3	3	3	3	41
48,	3	3	3	2	3	2	2	2	3	38
49,	2	2	2	2	3	2	3	3	4	38
50,	2	3	3	2	2	2	2	2	3	39
51,	2	3	3	2	3	2	3	3	4	42
52,	2	2	2	2	3	2	3	3	3	38

53	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	4	3	2	3	3	1
54	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	1	3	2	3	4	3	2
55	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	2	3	3	3	2	2	2
56	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	2	2	2	3	2	3	2
57	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	2	3	2	3	2
58	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	2	2	1	3	3	4	3
59	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	3	2	3	2
60	DI11	1 jt - 1500	swasta	L	3	1	2	2	3	3	2
61	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	3	3	3	3	3
62	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	3	3	4	3	4
63	SMA	100 - 500	swasta	P	1	2	2	2	2	3	2
64	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	2	2	2	3	3	3	2
65	SMP	1 jt - 1500	swasta	P	1	2	2	3	3	3	2
66	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	2	3	4	2	3	3	4
67	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	2	4	3	2	3	4	4
68	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	1	3	4	1	4	4	3
69	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	1	1	1	2
70	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	1	1	1	2	2
71	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	1	2	2	1	2	1	1
72	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	1	2	3	2	3	3	2
73	S-2	1500 jt lebih	PNS	P	2	3	3	2	2	2	2
74	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	2	2	1	1	1
75	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	3	2	2	2	2
76	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	2	1	2	2	2	2	2
77	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	1	2	1	3	1
78	SMP	100 - 500	Pedagang	P	1	2	2	3	2	2	3
79	SMP	100 - 500	Pedagang	P	2	2	3	3	3	3	2
80	SD	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	2	1	2	3	3	1
81	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	3	2	3	3	2
82	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	3	2	2	3	2	3
83	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	2	3	3	3
84	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	3	3	3	3	3
85	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	1	3	2	3	3
86	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	3	3	3
87	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	2	2	2	2	2
88	D3	1500 jt lebih	PNS	P	2	2	3	3	3	3	3
89	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	1	3	4	4	4	4
90	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	1	2	2	2	2	2
91	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	3	1	1	2	1	1
92	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	2	2	1	3	4	4	4
93	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	1	1	3	2	1	2	3
94	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	2	2	2	2
95	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	1	1	4	4	4	4	4
96	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	4	4	3
97	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	1	1	4	4	1	4	1
98	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	2	2	2	2	2
99	DI11	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	2	2
100	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	2	2	2	2	2	2	3
101	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	3	2	1	2	2	1
102	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	3	1	2	2	2	2	3
103	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	2	3	3	1
104	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	2	2	3	3	3	3	3
105	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	4	1	4	2	3	4	3
106	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	4	1	4	3	4	4	2
107	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	1	1	2	2	2	3	1
108	S1	1500 jt lebih	TNI	P	2	2	1	1	2	1	1
109	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	1	2	1	1	2	1	2
110	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	2	2	2	2	3	4	4
111	SMA	1 jt - 1500	TNI	L	1	4	1	1	1	1	1

53,	3	3	4	3	4	2	3	3	3	47
54,	2	3	4	2	4	4	3	2	3	45
55,	2	2	2	2	2	2	3	3	3	38
56,	2	3	3	2	3	3	2	2	3	39
57,	2	2	2	2	3	2	3	3	3	40
58,	2	2	4	2	4	2	2	1	3	40
59,	2	2	3	2	3	2	2	2	3	37
60,	2	3	3	3	3	3	3	3	3	42
61,	3	3	3	2	3	2	3	2	3	43
62,	3	4	3	2	4	2	2	2	3	48
63,	2	2	3	2	3	3	3	3	3	38
64,	2	2	3	2	3	2	3	3	3	40
65,	2	2	3	2	3	2	3	3	3	39
66,	2	3	3	2	3	2	3	2	3	44
67,	3	2	2	2	3	2	2	3	3	44
68,	2	2	3	2	4	2	2	2	3	42
69,	1	1	1	3	1	1	3	3	3	31
70,	1	1	2	2	1	2	1	2	4	27
71,	1	1	2	2	4	1	1	2	3	27
72,	2	2	3	2	3	1	2	1	3	35
73,	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
74,	2	1	2	2	2	2	2	2	3	29
75,	2	2	2	3	2	2	1	2	3	34
76,	2	2	2	2	2	2	2	2	3	32
77,	1	3	3	2	1	1	1	1	3	28
78,	2	3	2	1	3	2	1	1	2	32
79,	2	2	2	3	3	2	2	2	3	39
80,	1	1	3	2	3	3	2	2	3	36
81,	2	3	3	2	3	2	2	2	2	38
82,	3	3	3	4	3	2	3	3	3	45
83,	3	3	3	3	3	3	3	3	4	47
84,	2	3	2	2	2	2	3	2	3	40
85,	3	3	3	4	3	2	3	2	3	43
86,	2	3	2	2	2	2	3	2	3	41
87,	2	2	2	2	2	2	1	1	2	30
88,	2	3	2	2	2	2	3	2	3	40
89,	3	3	4	3	4	3	3	3	3	52
90,	2	2	3	2	3	2	2	2	2	33
91,	1	1	1	2	2	1	1	1	1	22
92,	4	4	4	2	4	1	1	1	4	45
93,	2	1	2	4	4	3	3	2	2	36
94,	2	2	2	2	2	2	2	1	3	34
95,	4	4	4	2	4	4	4	4	4	56
96,	3	3	4	3	4	3	3	4	4	53
97,	1	2	4	4	4	3	4	1	4	43
98,	2	2	1	2	2	1	2	2	3	31
99,	2	2	2	3	2	2	2	2	3	34
100,	2	2	2	2	2	1	2	2	3	33
101,	2	2	2	2	2	4	1	1	2	33
102,	2	1	1	3	1	2	2	2	3	32
103,	3	3	3	2	2	2	2	2	3	40
104,	2	3	3	2	3	2	2	2	2	40
105,	4	3	4	4	4	3	3	3	3	52
106,	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50
107,	2	3	3	2	3	2	2	1	3	33
108,	2	3	2	3	2	2	1	1	1	27
109,	1	2	1	4	1	1	4	3	3	30
110,	2	2	3	3	3	4	3	2	3	44
111,	1	1	1	2	4	2	2	3	3	29

112	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	3	4	4	3	3	4
113	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	1	1	1	1	4	1	1
114	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	1	1	1	2	2	2
115	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	2	2	3	3	3	3	3
116	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	1	2	2	2	4	3	2
117	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	3	3	3	3
118	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	3	3	3	3
119	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	2	2	1	2	2	2	2
120	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	2	3	3	2
121	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	2	2	2	2	2	3	2
122	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	2	2	2	3	2
123	SI	1 jt - 1500	swasta	L	2	2	2	2	2	3	2
124	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	2	3	3	3	3	3
125	SD	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	2	3	3	3	3	3
126	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	1	2	3	2	2	2	2
127	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	4	4	2	2	2	2
128	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	3	3	2	2	2	2
129	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	3	2	2	2	2
130	SI	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	2	1	2	2	1
131	SI	1 jt - 1500	swasta	P	2	3	3	2	3	3	3
132	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	4	4	4	4	3
133	D111	1500 jt lebih	TNI	P	1	3	2	2	3	3	3
134	D111	1500 jt lebih	TNI	P	3	2	2	3	3	3	3
135	S2	1500 jt lebih	TNI	P	2	2	3	3	3	3	2
136	SI	1500 jt lebih	TNI	P	2	2	3	2	1	2	2
137	SI	1500 jt lebih	swasta	P	2	3	2	3	2	3	3
138	SI	1500 jt lebih	swasta	P	1	1	4	1	3	3	3
139	D111	1500 jt lebih	PNS	P	1	2	2	3	3	2	2
140	SI	1500 jt lebih	POLRI	P	2	2	1	2	1	3	2
141	DIII	1500 jt lebih	POLRI	P	2	3	3	2	3	3	2
142	SI	1500 jt lebih	PNS	P	2	2	2	3	3	3	2
143	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	3	2	3	2	2	2
144	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	2	2	3	2	2	2	2
145	SI	1 jt - 1500	swasta	P	2	3	3	3	2	2	2
146	D111	1500 jt lebih	swasta	P	2	3	3	3	3	3	3
147	D111	500 - 1 jt	swasta	L	1	3	3	2	4	4	1
148	SI	1 jt - 1500	PNS	P	3	2	2	2	2	2	2
149	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	4	2	2	3	3
150	DIII	1500 jt lebih	PNS	P	1	4	2	4	4	4	2
151	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	3	2	3	2	3
152	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	2	2	3	2	3	3	3
153	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	2	2	3	2	3	3	3
154	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	2	3	3	3
155	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	3	3	3	3	3	3
156	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	3	3	3	3	3
157	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	4	4	1	1	4
158	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	1	2	2	2	3	2	3
159	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	1	3	3	2	2	3	3
160	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	3	2	2	4	3	3	2
161	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	3	2	3	3	3	3	3
162	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	3	3	3	3	3
163	SI	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	3	3	3	3
164	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	3	3	3	3	3	3
165	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	3	3
166	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	2	2	3	3	3
167	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	2	3	2	2	3	3	3
168	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	3	3	3	3
169	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	4	2	3	3	3	3	3
170	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	2	3	3	3	3

112,	4	4	4	2	3	1	4	3	1	51
113,	1	4	1	1	1	1	4	4	4	31
114,	2	1	1	3	1	1	4	3	3	30
115,	3	3	2	2	3	2	2	2	3	41
116,	3	3	1	2	3	2	2	2	3	37
117,	2	3	2	2	2	2	3	2	3	40
118,	2	3	2	2	2	2	3	2	3	40
119,	3	3	3	3	3	3	4	1	3	39
120,	2	3	3	3	3	2	3	2	3	42
121,	3	3	3	2	3	2	3	2	3	39
122,	3	3	3	2	3	2	3	2	3	39
123,	3	3	3	3	3	2	3	2	3	40
124,	2	2	2	2	3	3	2	3	1	40
125,	2	2	2	2	3	2	2	3	2	40
126,	2	2	2	2	3	1	2	2	2	32
127,	2	2	2	2	2	1	1	1	3	34
128,	1	2	2	2	2	1	1	1	2	30
129,	2	2	1	2	2	1	2	2	2	31
130,	1	2	1	2	1	2	4	2	2	29
131,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
132,	3	3	3	3	3	2	2	2	3	47
133,	3	3	4	3	3	2	2	2	3	42
134,	3	2	3	2	3	3	2	2	3	42
135,	3	3	3	2	3	2	3	3	2	42
136,	2	2	2	2	2	2	1	1	2	30
137,	3	3	3	2	3	2	3	3	3	43
138,	1	1	1	1	1	1	1	1	4	28
139,	2	2	3	2	2	2	2	2	3	35
140,	1	1	3	2	2	2	2	2	3	31
141,	2	3	3	2	3	1	2	2	2	38
142,	2	2	3	2	3	2	3	2	3	39
143,	2	2	3	2	3	2	2	2	3	37
144,	2	3	2	3	2	2	2	2	3	36
145,	2	2	3	2	3	2	2	2	3	38
146,	3	3	2	2	2	2	2	2	3	41
147,	3	4	4	3	4	2	3	3	4	48
148,	3	3	3	3	3	2	3	2	3	40
149,	2	3	3	2	3	2	3	3	3	42
150,	4	4	4	1	4	4	3	3	1	49
151,	2	3	2	2	2	2	3	2	2	37
152,	2	3	2	2	2	2	2	2	2	37
153,	3	3	2	2	2	2	3	2	3	40
154,	3	3	2	2	3	2	2	2	3	40
155,	3	3	3	2	3	2	3	2	3	44
156,	2	3	3	2	3	3	3	3	3	46
157,	3	3	4	3	1	3	1	2	2	42
158,	2	3	2	3	3	3	1	2	2	36
159,	3	3	4	2	2	3	2	2	3	41
160,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43
161,	3	3	3	2	3	4	1	1	1	41
162,	3	3	3	3	3	3	3	2	2	45
163,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
164,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
165,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
166,	4	4	2	2	4	3	3	3	4	47
167,	3	2	3	3	3	2	2	2	3	41
168,	3	3	2	3	3	3	3	2	3	46
169,	3	3	2	2	2	2	3	2	3	43
170,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45

171	SD	100 - 500	swasta	P	3	2	3	2	4	4	3
172	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	1	3	3	2	3	3	2
173	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	1	3	2	1	3	1	1
174	S1	1500 jt lebih	swasta	L	2	2	2	2	3	3	3
175	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	3	3	3	4	3	3	3
176	SD	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	3	3	4	3	3
177	SMP	100 - 500	swasta	P	2	2	2	3	3	3	2
178	SD	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	4	1	3	4	4	4
179	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	2	3	3	4	3	3
180	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	2	1	2	2
181	S1	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	2	3	3	2
182	D3	1 jt - 1500	swasta	P	1	3	2	2	4	4	3
183	S1	1500 jt lebih	PNS	L	2	2	2	2	3	4	3
184	D3	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	3	3
185	SMP	500 - 1 jt	swasta	L	4	4	4	4	4	4	4
186	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	1	3	3	3
187	SMP	500 - 1 jt	swasta	P	2	3	2	2	2	2	1
188	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	3	3	3	3
189	S1	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	3	2	2	2	2
190	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	2	3	3	3
191	SMP	100 - 500	swasta	P	3	3	3	2	3	3	2
					418	435	471	452	508	520	448

171,	3	3	3	1	2	2	1	1	3	40									
172,	3	3	2	2	3	3	3	2	3	41									
173,	1	3	3	4	3	3	3	2	3	37									
174,	1	2	2	2	3	2	2	2	4	37									
175,	3	3	3	2	3	4	3	3	3	49									
176,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48									
177,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44									
178,	4	2	2	3	2	2	3	3	3	46									
179,	3	3	4	2	3	2	3	3	3	48									
180,	2	1	3	3	3	2	2	3	2	34									
181,	2	2	3	3	3	3	3	3	3	43									
182,	3	3	3	2	4	2	2	3	3	44									
183,	3	3	2	3	3	2	3	3	3	43									
184,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47									
185,	4	4	4	3	4	4	3	3	3	60									
186,	4	3	4	2	3	2	2	2	3	44									
187,	1	2	2	2	3	2	2	2	3	33									
188,	3	3	3	3	2	3	3	2	3	45									
189,	2	2	3	2	4	1	2	2	3	36									
190,	3	3	3	2	3	2	3	3	3	42									
191,	3	4	2	2	2	1	3	3	3	42									
										448	482	497	435	514	420	464	441	549	7502

LAMPIRAN 4

DATA HASIL PENELITIAN KETAHANAN KELUARGA
PADA PEMAKAIAN LPG (Y 2)

NO RESP	PENDIDIKAN	PENDAPATAN	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	SKOR UNTUK ITEM NOMOR :						
					1	2	3	4	5	6	7
1	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	3	2
2	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	4	3	2	2	2
3	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	2	3	2	3	2	2
4	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	3	2	3	3	3	3	2
5	S-1	1500 jt lebih	Lain-lain	L	2	2	3	3	3	3	2
6	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	2	3	3	3	3	3
7	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	2	3
8	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	2	2	2	3	3	2	2
9	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	3	4	4	4	3	3	3
10	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	2	1	3	3	3	3	2
11	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	3	3	3	3	3	2
12	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	3	2
13	SMP	100 - 500	Lain-lain	P	2	2	3	3	3	2	2
14	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	4	4	2	4	2	2
15	DIII	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	3	2
16	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	3	3	3	3	2	2
17	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	2	3	3	3	3	2
18	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	3	3	3	3	2	2
19	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	3	1
20	DIII	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	3	2
21	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	2	2	3	3	3	3	1
22	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	3	4	3	4	3	2
23	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	3	2
24	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	2	3	3	3	2	3
25	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	2	3	3	3	3	3
26	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	3	2	3	3	3	3	3
27	SMP	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	2	4	4	4	4	4
28	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	P	3	2	3	3	4	3	3
29	SD	500 - 1 jt	Pedagang	P	4	2	4	3	4	2	2
30	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	2	2
31	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	2	2
32	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	3	3
33	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	1	3	3	3	2	2
34	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	1	3	3	3	2	2
35	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	1	3	3	3	2	2
36	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
37	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	1	2	3	3	2	2
38	D111	1500 jt lebih	swasta	L	3	1	3	3	3	2	2
39	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	1	3	3	3	2	2
40	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	2	3	3	2	2
41	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	4	3	3	3	3
42	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	1	2	3	3	2	2
43	SMP	500 - 1 jt	PNS	L	3	2	3	3	3	2	2
44	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
45	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	3	3	2	2
46	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	1	3	3	3	2	2
47	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	2	3	3	2	2
48	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	2	3	3	2	2
49	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	1	2	3	3	2	2
50	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	3	2	2	3	3	2	2
51	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
52	D111	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2

NO RESP	SKOR UNTUK ITEM NOMOR :									SKOR TOT
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
2,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	40
3,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	41
4,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
5,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
6,	4	3	3	3	3	3	3	3	3	48
7,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43
8,	2	2	2	2	2	2	3	3	3	37
9,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
10,	3	3	1	1	3	3	3	3	4	41
11,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	46
12,	4	4	3	3	3	4	3	3	3	49
13,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
14,	3	3	2	2	2	4	3	3	3	46
15,	3	3	3	2	3	4	3	3	3	46
16,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	44
17,	4	3	3	2	3	4	3	4	4	49
18,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	43
19,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
20,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
21,	3	3	2	1	3	4	3	3	1	40
22,	4	4	3	2	3	4	3	3	3	52
23,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
24,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
25,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	46
26,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	46
27,	4	3	3	3	3	4	3	3	3	54
28,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
29,	4	4	3	2	2	3	3	2	3	47
30,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
31,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
32,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
33,	3	3	3	2	3	3	3	3	4	44
34,	2	2	2	2	2	2	3	3	4	39
35,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	39
36,	3	3	2	2	2	2	3	3	3	41
37,	2	3	2	2	2	3	3	3	4	40
38,	2	2	2	2	3	2	3	3	4	40
39,	2	2	2	2	3	3	3	3	4	41
40,	2	2	3	2	3	3	3	3	3	41
41,	3	3	3	2	3	4	3	3	3	48
42,	2	2	2	2	3	3	3	3	4	40
43,	2	3	2	2	2	2	4	3	4	42
44,	2	2	3	2	3	3	3	3	3	42
45,	2	3	2	2	2	3	3	3	4	41
46,	3	3	2	3	3	3	3	3	3	42
47,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	39
48,	2	3	2	2	3	3	3	3	3	41
49,	3	3	3	3	3	3	3	3	4	43
50,	2	2	2	2	2	3	3	3	4	40
51,	2	3	2	2	2	3	3	3	4	42
52,	2	2	2	2	3	3	3	3	4	42

53	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	4	3	3	3	2	1
54	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	4	4	4	4	4	2	2
55	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	3	2	3	3	4	3	3
56	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	3	2	2	3	3	2	2
57	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	3	2	3	2	2
58	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	2	3	2	4	3	2
59	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
60	DI11	1 jt - 1500	swasta	L	3	1	3	3	3	2	2
61	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	2	3	2	2
62	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
63	SMA	100 - 500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
64	SMA	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	2	3	2	2
65	SMP	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	2	3	3	2	2
66	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	2	3	2	3	3	3	3
67	SMA	1 jt - 1500	TNI	P	3	2	3	2	4	3	4
68	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	3	2	2	1	4	4	2
69	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	3	2	3	2	2
70	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	3	1	3	3	3	3	3
71	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	3	1	3	3	4	1	1
72	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	4	1	3	3	3	2	3
73	S-2	1500 jt lebih	PNS	P	3	2	3	3	3	3	2
74	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	2	3
75	S-1	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	2	3	3	2	2
76	SMP	1 jt - 1500	PNS	L	3	2	4	4	3	2	2
77	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	2	4	4	4	1	1
78	SMP	100 - 500	Pedagog	P	2	2	3	2	4	2	3
79	SMP	100 - 500	Pedagog	P	2	3	3	3	3	2	3
80	SD	500 - 1 jt	Pedagog	P	3	1	1	3	3	1	3
81	SMP	500 - 1 jt	Pedagog	P	3	2	3	3	3	2	2
82	SMP	500 - 1 jt	Pedagog	P	1	1	1	3	3	1	1
83	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	1	3	1	3	3	1	1
84	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	3	3	3
85	SI	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	3	3	3	3
86	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	3	3	3
87	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	4	3	4	4	4	3	2
88	D3	1500 jt lebih	PNS	P	3	2	3	3	3	3	3
89	SMP	500 - 1 jt	Pedagog	P	3	3	3	3	3	3	3
90	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	4	1	4	3	2	3	3
91	SMA	500 - 1 jt	Pedagog	P	3	1	3	3	3	2	1
92	S-1	1500 jt lebih	PNS	P	1	1	4	4	4	1	1
93	S-1	1500 jt lebih	PNS	L	1	2	3	1	2	2	2
94	S-1	1500 jt lebih	swasta	L	3	2	3	3	3	3	2
95	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	1	1	1	1	2	1	1
96	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	2	1	2	3	3	2	1
97	SMA	100 - 500	Lain-lain	P	4	2	4	4	4	4	1
98	SMP	500 - 1 jt	Pedagog	L	3	3	3	3	3	3	2
99	DI11	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	3	3	3	3	3	3
100	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	3	23	3	3	2	3	3
101	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	3	1	3	3	3	3	2
102	SMA	1500 jt lebih	TNI	L	2	2	1	3	3	1	3
103	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	2	2	3	3	4	3	2
104	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	3	2	2	3	3	3	2
105	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	4	3	1	3	2
106	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	1	2	3	3	2	2
107	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	4	1	3	2	4	2	1
108	SI	1500 jt lebih	TNI	P	3	1	3	1	3	2	1
109	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	2	1	1	1	1	1	2
110	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	2	3	3	3	3	2	3
111	SMA	1 jt - 1500	TNI	L	2	1	2	2	4	4	4

53,	2	2	1	2	1	3	4	3	3	40
54,	4	4	2	3	2	4	4	4	4	55
55,	3	3	3	2	3	4	3	3	3	48
56,	3	3	2	3	2	3	3	3	3	42
57,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	38
58,	3	3	3	3	2	4	4	3	4	48
59,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
60,	2	3	2	2	2	3	3	3	3	40
61,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	39
62,	3	3	2	1	2	3	3	3	3	41
63,	2	3	2	3	2	3	3	3	3	42
64,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
65,	3	2	3	2	3	2	3	3	3	41
66,	2	2	3	2	2	2	3	3	3	41
67,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	47
68,	4	3	2	1	3	3	1	3	3	41
69,	3	3	3	4	2	3	3	2	3	44
70,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
71,	4	4	2	4	1	4	4	3	3	45
72,	4	3	3	1	3	4	3	3	3	46
73,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43
74,	3	4	3	2	3	3	3	3	3	46
75,	2	3	3	3	3	3	3	3	3	43
76,	3	3	2	2	2	4	3	3	3	45
77,	2	4	4	2	4	4	3	3	3	47
78,	2	3	2	1	2	3	3	3	3	40
79,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	44
80,	3	3	3	2	3	3	2	2	2	38
81,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
82,	1	3	1	1	4	3	4	3	3	34
83,	2	3	1	1	1	3	2	2	1	29
84,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
85,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
86,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
87,	2	4	4	3	4	4	4	4	4	57
88,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
89,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	47
90,	4	3	3	2	3	3	3	3	3	47
91,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	42
92,	1	4	4	1	1	3	4	4	4	42
93,	3	2	2	3	3	2	2	3	4	37
94,	4	4	3	1	2	4	3	4	4	48
95,	1	2	1	2	1	3	3	3	3	27
96,	2	3	1	1	2	3	3	3	3	35
97,	4	4	4	2	4	4	3	4	3	55
98,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	45
99,	3	3	3	2	3	4	3	3	3	49
100,	3	3	2	1	1	3	3	3	3	62
101,	3	3	3	2	3	4	4	3	3	46
102,	3	2	1	1	2	3	3	3	3	36
103,	2	2	2	2	2	4	3	4	3	43
104,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
105,	1	4	4	4	4	4	3	4	3	49
106,	3	3	1	4	2	3	3	3	3	41
107,	3	4	3	1	3	4	3	4	4	46
108,	3	2	1	2	1	3	4	4	4	38
109,	1	2	2	4	1	1	4	3	3	30
110,	1	3	3	2	3	3	3	3	3	43
111,	1	1	1	4	1	1	3	4	3	38

112	SMA	1500 jt lebih	TNI	P	4	2	2	1	2	1	2
113	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	1	1	1	1	1	1	1
114	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	2	2	2	2	2	3	1
115	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	2	2	3	3	3	2	2
116	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	2	2	4	4	4	1	1
117	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	3	3
118	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	3	3
119	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	3	3	3	3	2
120	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	3	3	3	3
121	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	2	3	3	3	2	2
122	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	2	2
123	S1	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
124	SMA	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	3	2	3	3	2
125	SD	1 jt - 1500	Lain-lain	L	3	3	3	4	3	3	2
126	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	3	3	3	3	3	2
127	SD	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	2	3	3	3	3	3
128	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	4	2	4	3	3	3	3
129	SMA	1500 jt lebih	swasta	P	4	2	3	3	4	3	3
130	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	1	4	4	3	3	3
131	S1	1 jt - 1500	swasta	P	3	3	2	2	2	2	2
132	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	2	3	2	2
133	D111	1500 jt lebih	TNI	P	2	1	3	1	3	1	1
134	D111	1500 jt lebih	TNI	P	3	2	3	2	3	2	2
135	S2	1500 jt lebih	TNI	P	3	2	3	3	3	3	2
136	S1	1500 jt lebih	TNI	P	4	2	4	4	4	3	2
137	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	1	2	3	3	2	2
138	S1	1500 jt lebih	swasta	P	2	2	4	4	4	4	4
139	D111	1500 jt lebih	PNS	P	3	2	2	3	3	2	2
140	S1	1500 jt lebih	POLRI	P	4	1	3	3	3	1	2
141	DIII	1500 jt lebih	POLRI	P	4	2	3	3	3	3	2
142	S1	1500 jt lebih	PNS	P	3	2	2	3	3	2	2
143	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
144	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	2	2	4	3	3	3	2
145	S1	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
146	D111	1500 jt lebih	swasta	P	3	3	3	3	3	3	3
147	D111	500 - 1 jt	swasta	L	2	1	3	3	2	1	1
148	S1	1 jt - 1500	PNS	P	3	2	3	3	3	2	2
149	DIII	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
150	DIII	1500 jt lebih	PNS	P	2	1	4	2	3	3	1
151	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	2	3	2	2
152	SMA	1 jt - 1500	PNS	P	3	2	2	2	3	3	2
153	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	P	3	2	3	3	3	2	2
154	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	3	2
155	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	3	3	3	2	2
156	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	2	3	2	3	2	2
157	SMA	1 jt - 1500	Pedagang	L	3	3	3	4	1	2	3
158	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	2	3	3	3	4	3
159	SMA	500 - 1 jt	Pedagang	L	3	3	4	3	3	3	3
160	SMA	1 jt - 1500	PNS	L	2	2	2	2	2	2	2
161	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	3	2	3	3	3	3	2
162	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	4	2	3	3	3	3	4
163	S1	1500 jt lebih	PNS	L	3	2	3	2	3	2	2
164	SMA	1500 jt lebih	PNS	L	3	2	3	2	3	2	2
165	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	2	3	2	2
166	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	3	3	3	3	3	3
167	SMA	500 - 1 jt	swasta	L	3	2	3	3	3	2	3
168	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	3	3	2	2
169	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	1	2	3	3	3	3	3
170	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	2	3	3	3	3	3

112,	3	1	2	4	1	1	3	4	3	36
113,	4	4	4	4	1	4	4	4	4	40
114,	1	1	2	3	3	1	3	4	4	36
115,	2	3	2	2	3	3	3	3	3	41
116,	3	3	1	2	2	4	2	2	1	38
117,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
118,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	44
119,	3	3	3	4	3	3	3	2	3	47
120,	3	3	2	2	3	3	2	2	2	41
121,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
122,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
123,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
124,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43
125,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	45
126,	3	2	3	2	3	4	4	4	3	49
127,	3	3	3	3	4	4	4	4	3	52
128,	4	3	3	2	4	4	4	4	3	53
129,	3	4	3	2	3	4	4	4	3	52
130,	3	3	2	2	3	4	4	3	3	48
131,	2	3	2	2	2	3	3	3	3	39
132,	3	3	3	2	1	3	3	3	3	41
133,	2	2	1	1	1	4	3	3	3	32
134,	3	2	4	2	2	3	3	3	3	42
135,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
136,	4	4	4	2	4	4	4	4	4	57
137,	2	3	2	1	1	4	3	3	3	38
138,	4	4	4	1	4	4	4	4	4	57
139,	3	3	2	3	2	3	3	3	3	42
140,	3	3	2	2	3	3	3	3	2	42
141,	2	3	2	2	3	3	3	3	3	44
142,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	41
143,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
144,	3	3	3	3	3	3	2	3	3	45
145,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
146,	3	3	3	2	2	3	3	3	3	46
147,	3	3	1	1	1	3	3	3	4	35
148,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
149,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
150,	3	2	1	4	2	3	4	4	4	43
151,	3	3	3	2	2	3	2	3	3	41
152,	3	3	3	2	3	3	3	2	3	42
153,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	42
154,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43
155,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	41
156,	2	3	3	2	2	3	3	3	3	41
157,	3	4	3	3	2	3	3	3	3	46
158,	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49
159,	2	3	3	2	3	3	3	3	3	47
160,	2	2	2	1	1	3	3	3	3	34
161,	4	1	2	1	3	4	3	3	4	44
162,	3	3	3	3	3	4	3	4	2	50
163,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	43
164,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	43
165,	3	3	3	2	3	3	3	3	3	43
166,	3	3	3	1	3	3	2	3	2	44
167,	3	2	2	2	3	3	3	2	3	42
168,	3	3	3	2	3	3	2	2	2	41
169,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	43
170,	3	3	2	2	3	3	3	3	3	45

171	SD	100 - 500	swasta	P	3	2	4	4	4	1	2
172	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	L	3	3	3	2	3	2	3
173	SMP	500 - 1 jt	Pedagang	L	2	2	2	3	3	2	2
174	S1	1500 jt lebih	swasta	L	2	1	3	3	4	2	3
175	SMP	1 jt - 1500	Pedagang	P	3	3	4	3	4	3	3
176	SD	500 - 1 jt	swasta	L	1	3	2	2	2	2	2
177	SMP	100 - 500	swasta	P	2	2	3	2	2	2	2
178	SD	500 - 1 jt	Lain-lain	P	4	4	2	2	4	4	4
179	SMA	500 - 1 jt	Lain-lain	P	3	2	3	3	3	2	2
180	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	3	2	3	3	3	2	2
181	S1	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	2	4	2	2
182	D3	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	2	4	3	1	1
183	S1	1500 jt lebih	PNS	L	2	1	2	2	3	2	3
184	D3	1500 jt lebih	swasta	P	3	2	3	2	2	2	2
185	SMP	500 - 1 jt	swasta	L	4	4	4	4	4	4	4
186	SMA	500 - 1 jt	swasta	P	3	3	3	3	3	2	2
187	SMP	500 - 1 jt	swasta	P	3	2	3	3	3	3	2
188	SMA	1 jt - 1500	swasta	L	3	3	2	2	3	3	3
189	S1	1500 jt lebih	swasta	P	3	1	3	3	3	3	1
190	SMA	1 jt - 1500	swasta	P	2	2	3	3	3	2	2
191	SMP	100 - 500	swasta	P	3	2	3	2	4	1	2
					538	405	552	541	582	451	421

171,	2	3	3	1	1	4	4	1	1	40	
172,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	43	
173,	2	3	2	2	2	3	2	3	3	38	
174,	2	3	2	1	1	3	3	3	3	39	
175,	3	3	4	2	3	3	3	3	3	50	
176,	2	2	2	3	2	3	3	3	3	37	
177,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	37	
178,	4	4	2	3	2	4	3	3	3	52	
179,	3	3	2	2	2	4	3	3	3	43	
180,	3	3	2	1	2	3	3	3	2	40	
181,	2	3	1	1	1	3	3	3	3	36	
182,	2	3	1	1	1	4	1	4	1	33	
183,	3	3	2	1	3	3	3	3	3	39	
184,	2	2	2	2	2	3	3	3	3	38	
185,	4	4	4	2	3	4	3	4	4	60	
186,	3	4	2	2	2	4	4	4	4	48	
187,	3	3	3	2	3	4	4	4	4	49	
188,	3	3	2	3	2	3	2	2	3	42	
189,	1	4	3	2	3	4	4	4	4	46	
190,	3	3	2	2	2	3	3	3	3	41	
191,	3	3	1	2	2	3	3	3	3	40	
										8270	
											530 557 463 402 469 601 582 587 589

LAMPIRAN 5

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN TERHADAP KONDISI
KETAHANAN KELUARGA PADA PEMAKAIAN MINYAK TANAH**

KARAKTERISTIK		JML	JML TIAP BUTIR PERTANYAAN					
Jenis Kelamin	Laki-Laki	90	204	202	224	215	250	248
	Perempuan	101	214	233	247	237	258	272
Pendidikan	SD	12	31	26	29	28	38	37
	SMP	24	53	61	58	59	67	65
	SMA	103	229	235	256	248	270	280
	SARJANA	52	105	113	128	117	133	138
Pendapatan	100.000 - 500.000	9	18	19	24	23	23	27
	501.000 -1 Juta	63	142	147	158	148	178	178
	1.001.000 -1.500.000	62	143	146	153	152	165	171
	Lebih dari 1.501.000	57	115	123	136	129	142	144
Pekerjaan	TNI/POLRI	15	33	39	37	30	36	39
	PNS/BUMN	28	53	62	65	70	75	77
	SWASTA	104	188	181	210	190	218	223
	PEDAGANG	44	88	96	100	98	110	110
	LAIN-LAIN	26	56	57	59	64	69	71

JML TIAP BUTIR PERTANYAAN										JML
213	213	235	232	212	247	209	235	216	271	3626
235	235	247	265	223	267	211	229	225	278	3876
28	29	29	30	26	31	26	28	28	36	480
54	55	61	64	57	69	52	60	61	72	968
250	248	264	267	232	273	233	255	236	293	4069
116	116	128	136	120	141	109	121	116	148	1985
19	21	24	26	21	25	20	21	19	26	356
155	154	169	163	145	170	140	154	143	183	2527
149	150	154	164	144	172	142	159	156	180	2500
125	123	135	144	125	147	118	130	123	160	2119
38	34	34	38	33	40	30	31	31	37	560
65	64	73	71	64	72	61	73	64	79	1088
189	196	209	218	189	225	183	202	196	243	3260
97	93	104	102	89	108	87	97	89	118	1586
59	61	62	68	60	69	59	61	61	72	1008

LAMPIRAN 6

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN TERHADAP KONDISI KETAHANAN KELUARGA PADA PEMAKAIAN LPG

KARAKTERISTIK		JML	JML TIAP BUTIR PERTANYAAN					
Jenis Kelamin	Laki-Laki	90	247	203	255	252	265	210
	Perempuan	101	291	202	297	289	317	241
Pendidikan	SD	12	34	26	31	36	38	27
	SMP	24	65	52	70	72	76	56
	SMA	103	292	234	297	285	309	248
	SARJANA	52	147	93	154	148	159	120
Pendapatan	100.000 - 500.000	9	24	19	29	26	30	19
	501.000 -1 Juta	63	177	135	181	182	189	151
	1.001.000 -1.500.000	62	171	129	175	177	187	147
	Lebih dari 1.501.000	57	166	122	167	156	176	134
Pekerjaan	TNI/POLRI	15	45	47	40	35	47	37
	PNS/BUMN	28	75	51	76	72	82	61
	SWASTA	81	226	164	239	236	245	186
	PEDAGANG	41	116	83	119	123	126	96
	LAIN-LAIN	26	76	60	78	75	82	71

JML TIAP BUTIR PERTANYAAN										JML TOTAL
201	242	254	212	199	219	279	271	275	285	3869
220	288	303	251	203	250	322	311	312	304	4401
29	33	36	29	27	29	39	36	32	34	516
54	65	67	59	48	66	76	75	75	75	1051
231	288	301	252	226	252	320	310	316	315	4476
107	144	153	123	101	122	166	161	164	165	2227
20	24	27	22	18	22	29	28	26	25	388
143	176	184	152	129	161	200	189	192	192	2733
137	164	174	147	137	148	188	184	185	186	2636
121	166	172	142	118	138	184	181	184	186	2513
35	42	37	35	30	33	43	46	49	46	647
58	77	81	69	61	64	86	88	87	91	1179
176	218	242	191	167	190	260	246	249	247	3482
92	114	122	101	85	111	129	123	122	121	1783
60	79	75	67	59	71	83	79	80	84	1179

LAMPIRAN 7

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2007
TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN,
PENDISTRIBUSIAN,
DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT Pertamina (Persero).
4. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

6. Minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

7. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.

8. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Pasal 3

1 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

2 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 4

1. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG Tabung 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.
2. Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 5

Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro; serta
- b. usulan dari Badan Usaha.

Pasal 6

Perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai :

- a. dasar penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg; dan
- b. dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 7

1. Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
2. Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

3. Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

1. Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri.

2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari Pemerintah.

3. Ketenian mengenai persyaratan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

1. Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

2. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a. perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
- b. jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri; atau
- c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

3. Ketentuan mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 10

1. Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG Tabung 3 Kg.
2. Pelaksanaan impor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 11

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 12

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 13

1. Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.
2. Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 14

Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 16

Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

PETA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MAP OF JAKARTA TIMUR MUNICIPALITY





WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 46 /-1.851.8**

TENTANG

IJIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : Ir. H. NUGRAHA K YASIN, Dipl.Ph. E
b. Jabatan : Wakil Walikota Jakarta Timur

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : Agung Karyanto
b. Tempat- Tgl Lahir : Bantul, 15 Juni 1971
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Indonesia
f. Alamat : Jl. Trikora Raya No.52 Rt.004/010 Kelurahan Halim PK
Kec Makasar

Bermaksud :

mengadakan Penelitian mulai tanggal 15 Januari s.d 15 April 2009, dengan Judul "Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liqueffied Petroleum Gas(LPG) Terhadap Ketahanan Rumha Tangga (Studi Kasus di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur)" Lokasi penelitian di 10 Kecamatan se Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan ketentuan :

1. Para Camat, Lurah, Instansi/Lembaga/Badan, RT dan RW setempat agar memberikan bantuan yang diperlukan.
2. Apabila menyangkut data-data kewilayahan, agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat dan Lurah yang bersangkutan.
3. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pengumpulan data/observasi/praktek kerja nyata dimaksud secara tertulis kepada Walikota Jakarta Timur Cq. Bagian Administrasi Wilayah Setko Administrasi Jakarta Timur.

Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Januari 2009

WAKIL WALIKOTA JAKARTA TIMUR,



**I. H. NUGRAHA K YASIN, Dipl.Ph. E
NIP. 470049232**

Tembusan:

1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kabag Tapem Setko Adm Jakarta Timur